



**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029**





WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. dang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-
2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah PD yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Jambi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

11. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan.
- (2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi serta memperhatikan:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW; dan
 - c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

- a. visi, misi, dan program Wali Kota sebagai Kepala Daerah;
- b. arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
- c. program yang menggambarkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat dan juga pemerintah yang mendukung perwujudan visi, misi dan program Wali Kota.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan
- d. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra perangkat daerah dan RKPD.
- (5) Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

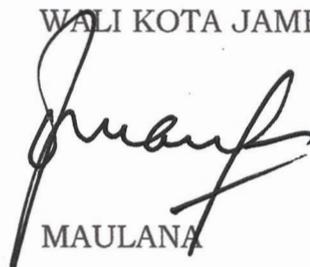
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Jambi.

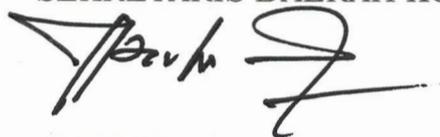
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Agustus 2025
WALI KOTA JAMBI,



MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI 3-32 / 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR ...TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2025-2029

1. UMUM

Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan kejelasan hukum dalam memberikan pedoman terhadap proses perumusan perencanaan Pembangunan. Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang telah diamanatkan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) perubahan ke-2, yaitu: "*Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*". Makna dari otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintah Pusat, lebih rinci diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perangkat peraturan perundang-undangan ini telah memberikan pedoman secara lebih jelas berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam merumuskan rencana pembangunannya.

Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi menimbulkan indikasi-indikasi ketidak seimbangan pembangunan aspek-aspek perkotaan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seiring dengan telah dilantikannya Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Penyusunan RPJMD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 5 (lima) tahunan bagi perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR \

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Jambi telah menyelesaikan Penyusunan RPJMD, yang berisi penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, dan perumusan program Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD juga telah mengakomodasi isu-isu strategis yang diperoleh dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 khususnya pada periode I yaitu tahun 2025-2029. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2025-2029 mengacu pada target RPJPD Kota Jambi di tahun berkenaan, terdapat 22 Sasaran Pokok dan 38 Arah kebijakan untuk Periode ke-1 (2025-2029) RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2025.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Jambi 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6633);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 5).

28. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 HUBUNGAN DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah, RPJMD disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Hal ini guna memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan serta mengakomodir isu-isu nasional dan regional, terutama dalam wilayah Provinsi Jambi.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMN 2025-2029, dalam perumusan Visi dan Misi diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029. Selain itu, perumusan substansi keterhubungan antar dokumen berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Terdapat 3 (Tiga) Misi RPJMD Provinsi Jambi, yaitu:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses Pendidikan, Kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045. RPJMD mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan periodisasi tahapan RPJMD.

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) tahun. Visi, Misi dan Program Prioritas kepala daerah terpilih pada setiap periode harus mempedomani RPJPD guna memastikan terjaganya kesinambungan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun meskipun kepala daerah silih berganti. RPJMD akan menjadi wujud kongkrit dari pelaksanaan arah kebijakan yang telah termaktub dalam RPJPD,

sehingga pada akhir periode dokumen perencanaan jangka panjang dapat mewujudkan misi dan visi RPJPD.

RPJMD mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan periodeisasi tahapan RPJMD. RPJPD perlu disusun dengan penekanan proyeksi dan *forecasting* yang menggambarkan dengan baik dinamika perkembangan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan sehingga saat diterjemahkan ke dalam RPJMD dapat diturunkan ke dalam satuan rencana yang lebih detail, terarah dan terukur.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Jambi

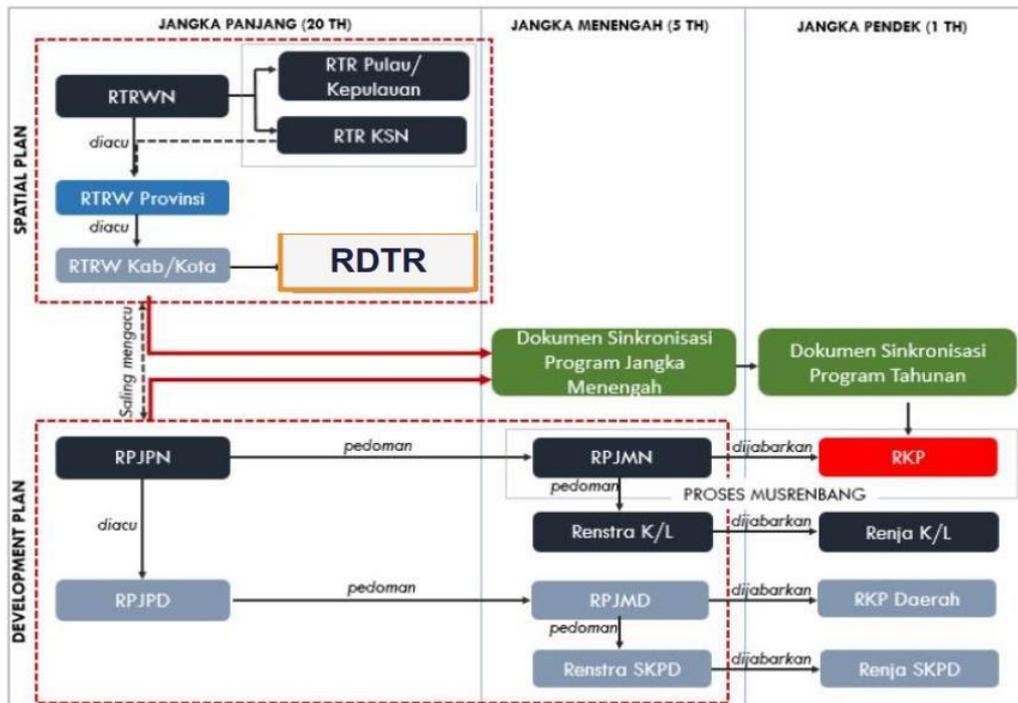
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rumusan visi dan misi yang diejawantahkan kedalam bentuk program Pembangunan selama kurun waktu (lima) tahun, sementara rencana tata ruang merupakan hasil rencana yang lebih cenderung bersifat spasial dengan jangka waktu rencana yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu 20 (dua puluh) tahun.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah memposisikan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, terutama yang bermuatan spasial sebagai pertimbangan penting dalam menentukan pokok-pokok kebijakan dan sasaran yang akan dipilih untuk periode tertentu. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun telah memenuhi aspek kelayakan dari sisi keruangan dan kewilayahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dimana keduanya sama-sama sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan sinkronisasi atau penyelarasan antara RPJMD terutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Begitupun juga dengan Pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penelaahan dokumen dalam penyusunan RPJMD dan Surat Edaran Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ mengandung makna

mempedomani RTRW melalui proses penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Perumusan RPJPD saat ini mengandung momentum yang sangat tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

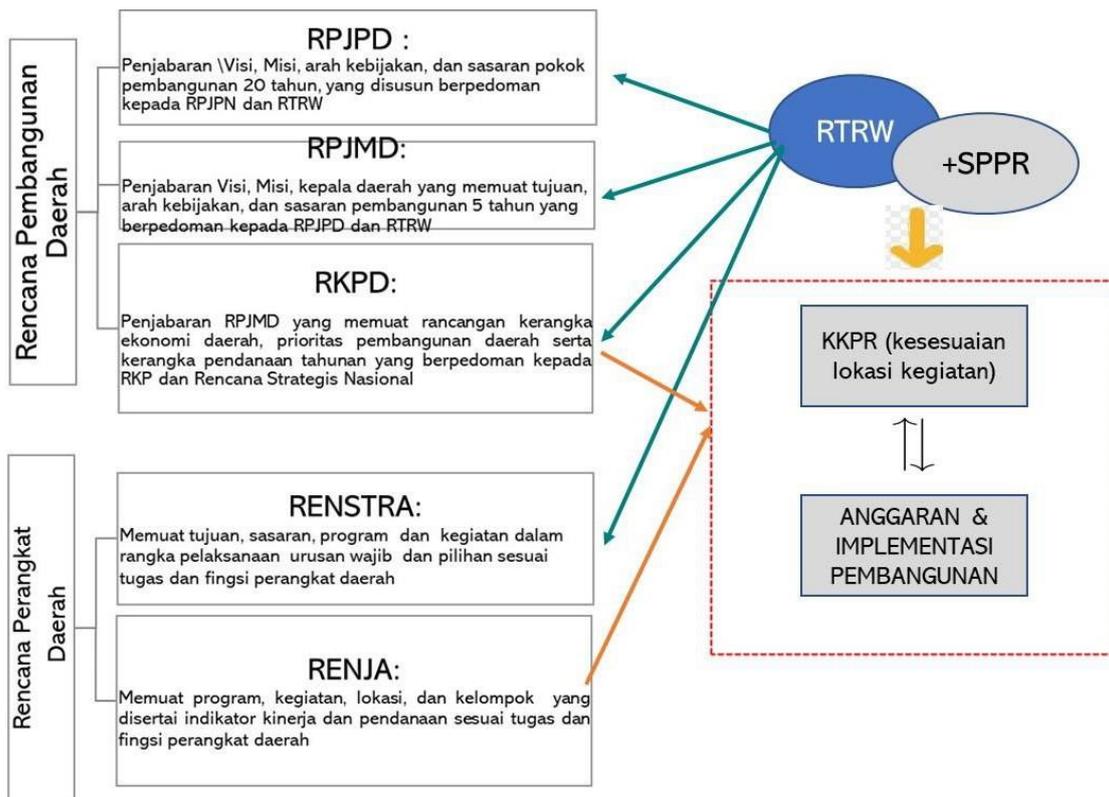
- a. pada periode sebelum ini, penyusunan dan penepatan RPJMD tidak berada pada tahun yang selaras dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. momentum Pilkada serentak pada Tahun 2024 yang juga diikuti dengan penyusunan RPJMD baru. Pada sisi lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut dilakukannya revisi RTRW. Pada saat ini pemutakhiran RTRW Kota Jambi juga sudah ditetapkan; dan
- c. sudah semakin optimalnya SDM perangkat daerah dalam memahami substansi tata ruang, sehingga lebih memahami dalam memahami tujuan, kebijakan, strategi, serta rencana perwujudan yang tertuang dalam rencana tata ruang.



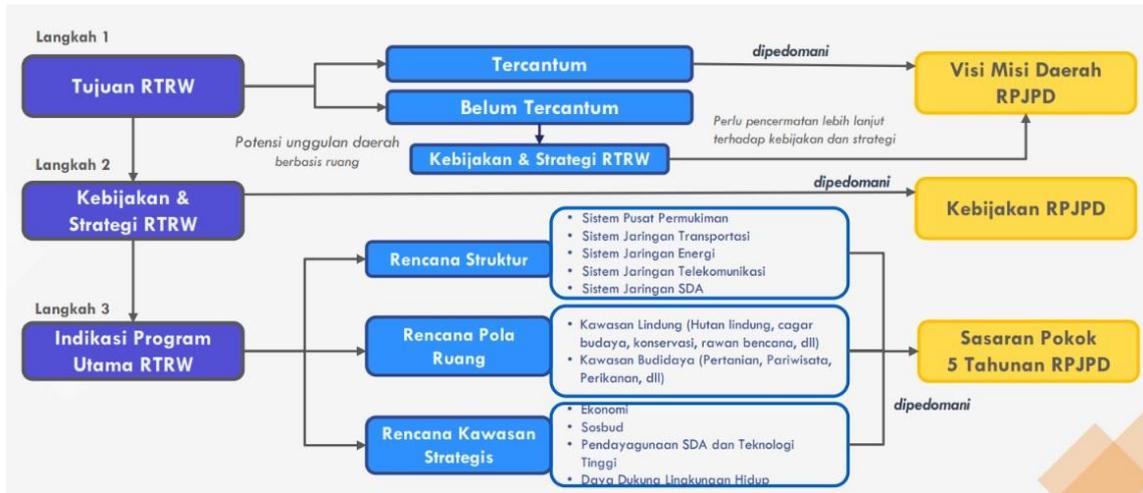
Gambar 1.1
Kedudukan RPJMD Terhadap Rencana Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan sinkronisasi program pembangunan dengan

muatan rencana tata ruang yang bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang telah memuat sinkronisasi yang merupakan hasil penyelarasan program yang akan direalisasikan. Amanat ini lahir karena latar belakang perjalanan pembangunan selama ini, dimana kesesuaian pembangunan dengan indikasi program pembangunan yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah masih berada pada kadar yang relatif rendah.



Gambar 1.2
Skema Umum Penyelarasan RPJMD Terhadap Rencana Tata Ruang



Gambar 1.3
Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

Kebijakan, Strategi, dan Sinkronisasi Program dalam pencapaian Tujuan Penataan Ruang, selaras dalam menjawab tujuan jangka panjang daerah yang diwujudkan dengan penyelarasan muatan yang terkandung dalam masing-masing dokumen rencana.

1.3.5 Hubungan Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memiliki hubungan keterkaitan yang hirarkis dan saling mendukung dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD menjadi dokumen induk yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Tabel 1.1 Hubungan Keterkaitan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD

Dokumen	Periode	Isi Pokok	Keterkaitan ke Dokumen Lain
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)	5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah - Arah kebijakan dan strategi - Indikator kinerja daerah. 	Menjadi pedoman utama penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah	5 tahun (Mengacu pada RPJMD)	<ul style="list-style-type: none"> - Visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sesuai tugas OPD - Strategi dan kebijakan sektor. 	Menjabarkan sasaran RPJMD ke lingkup sektor/OPD. Menjadi dasar penyusunan Renja OPD.
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	5 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pembangunan tahunan. - Program, kegiatan, target, lokasi, pagu anggaran - Indikator kinerja tahunan. 	Mengacu RPJMD dan Renstra OPD. Dihimpun dari Renja seluruh OPD melalui Musrenbang.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan landasan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Jambi pada tahun 2024-2026. Selanjutnya RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolak ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan

permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2029 dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025- 2029;

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan sampai dengan Tahun 2029;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan;
4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Tahun 2029.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan RPJMD Kota Jambi yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPMJD Kota Jambi dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kota Jambi yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, Standar Pelayanan Minimal, Kerjasama daerah, Rencana Pembangunan Infrastruktur dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda, Gambaran Keuangan Daerah, Proyeksi Keuangan daerah, Permasalahan pembangunan daerah dan Isu strategis daerah.

Bab III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, Indikator Program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah dan Pagu Indikatif program Perangkat Daerah. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD)

Bab V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Provinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat 01°32'48" sampai dengan 01°41'46,07' Lintang Selatan dan 103°31'27,19" sampai dengan 103°40'51,80" Bujur Timur.

Kota Jambi memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas timur pulau Sumatra. Secara administrasi wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan berbatasan langsung:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 luas keseluruhan wilayah Kota Jambi seluas 169,89 km². terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Kota Jambi dan data administrasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi

No.	Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
		(Km ²)	%	
1.	Alam Barajo	36,06	21,23	7
2.	Danau Sipin	7,28	4,28	5
3.	Danau Teluk	13,44	7,91	5
4.	Jambi Selatan	7,60	4,47	5
5.	Jambi Timur	13,68	8,05	9
6.	Jelutung	7,62	4,48	7
7.	Kota Baru	27,26	16,05	7

No.	Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
		(Km ²)	%	
8.	Paal Merah	24,25	14,28	6
9.	Pasar Jambi	1,67	0,98	4
10.	Pelayangan	10,69	6,29	6
11.	Telanaipura	20,33	11,97	7
Kota Jambi		169,89	100	68

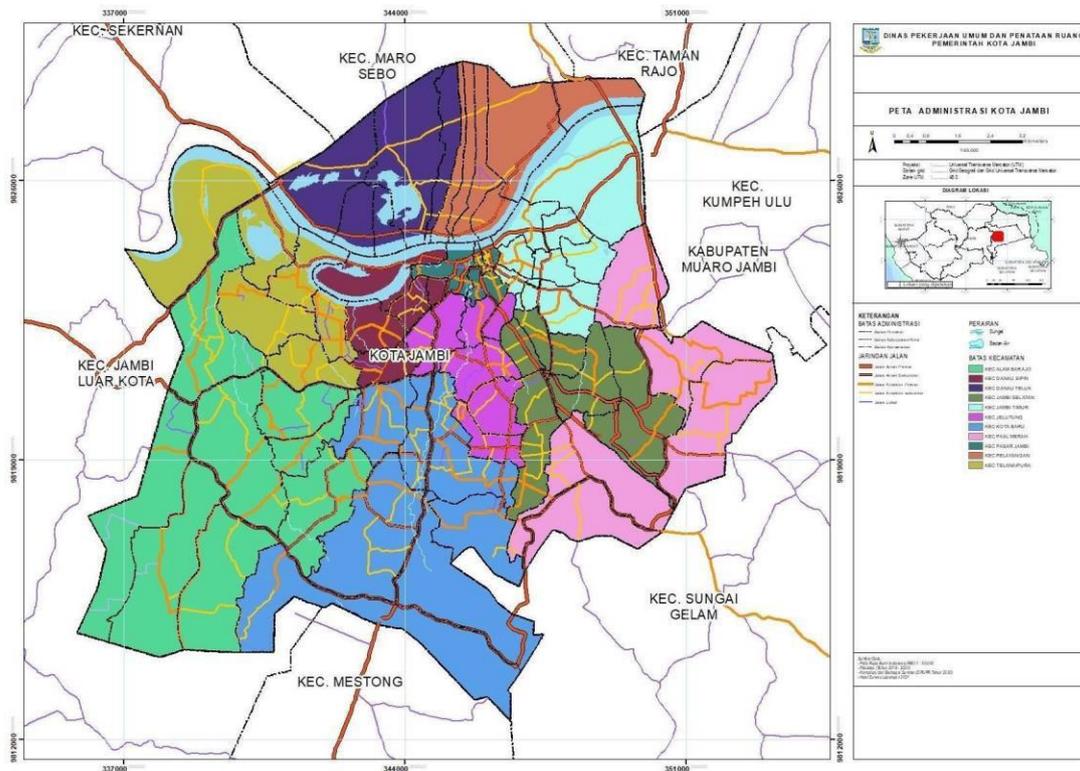
Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

Komposisi luas wilayah perkecamatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1
Komposisi Luas Kecamatan Kota Jambi

Dari gambar di atas terlihat bahwa Kecamatan Alam Barajo adalah kecamatan terluas dengan persentase luasan 21,23% dari total luas wilayah Kota Jambi. Sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Pasar Jambi sebesar 0,98% yang merupakan pusat perekonomian Kota Jambi. Letak dan batas administrasi kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.

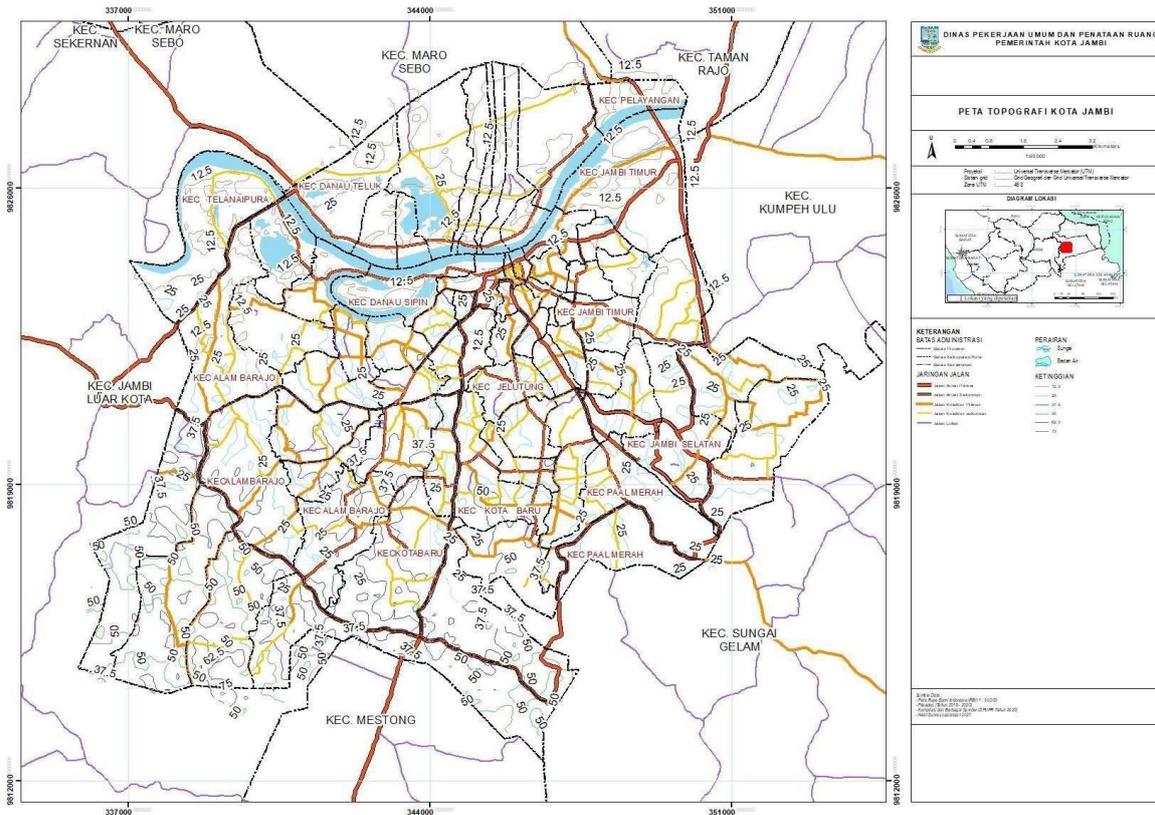


Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Jambi

2.1.1.1 Karakteristik Fisik Wilayah

A. Topografi

Secara umum Kota Jambi berada pada ketinggian antara 10 sampai dengan 60 meter dari permukaan laut (mdpl) dan sebagian besar wilayah Kecamatan seperti: Pasar Jambi, Pelayangan dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 - 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 - 40 meter dari permukaan laut

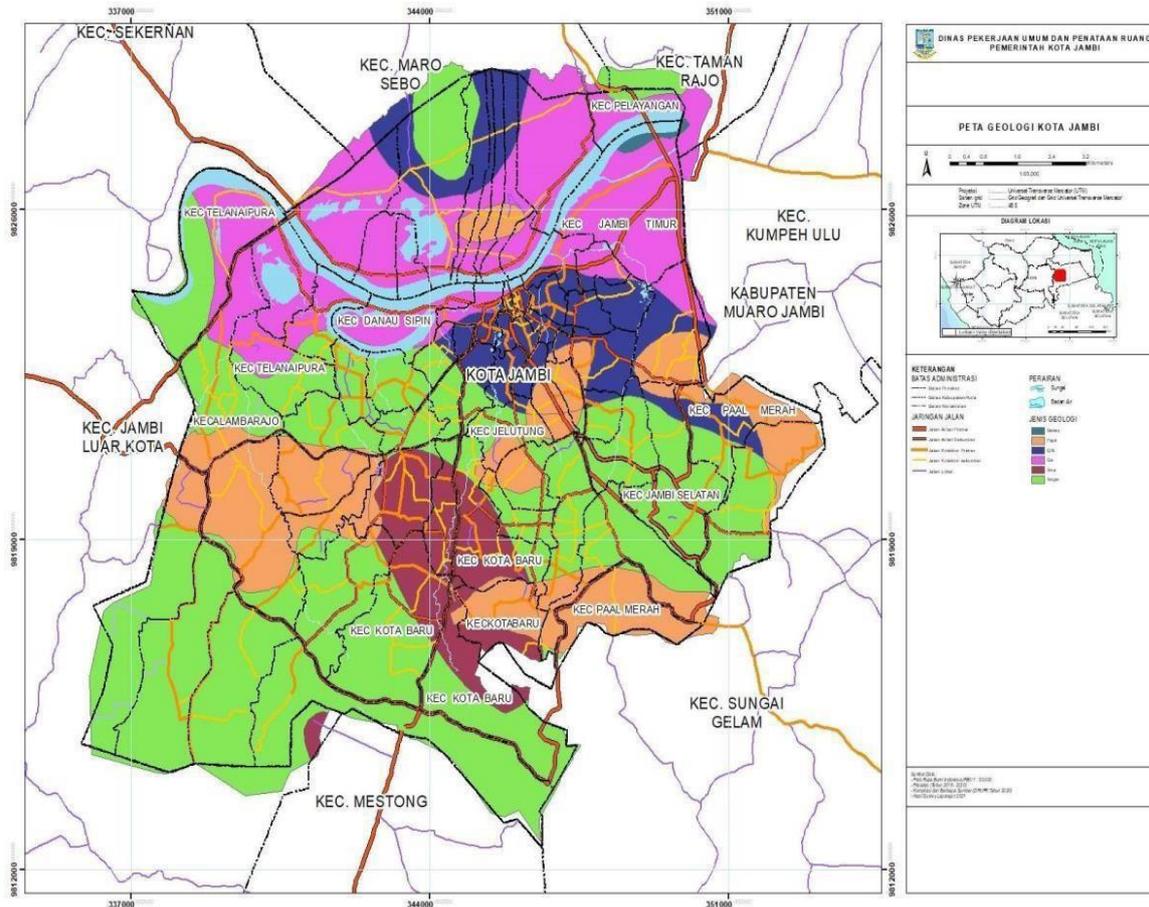


Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Jambi

B. Geologi

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Dilihat luasannya, jenis batuan endapan permukaan menempati areal seluas 10.454 hektar, batuan sedimen umur miosen seluas 8.375 hektar dan batuan sedimen umur pliosen seluas 1.709 hektar yang dapat dilihat pada Gambar berikut



Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Jambi

C. Hidrologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah kota Jambi dimana di wilayah bagian selatan ini sedikitnya terdapat 8 (delapan) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Kecil

Sungai Kenali Besar memiliki panjang 13,79 Km dan luas 3.623 Ha. Sungai ini melewati Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali.

2. Sungai Kenali Besar

Sungai Kenali Kecil memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 1.759 Ha. Sungai ini melewati Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliuang, Rawasari, dan Kenali Besar.

3. Sungai Kambang

Sungai Kambang memiliki panjang sungai 4,304 Km dan luas 488 Ha. Sungai ini melewati Simpang III Sipin, Simpang IV Sipin, Pematang Sulur, dan Telanaipura.

4. Sungai Asam

Sungai Asam memiliki panjang sungai 10,68 Km dan luas 2.930 Ha. Daerah aliran sungai meliputi Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam.

5. Sungai Tembuku

Sungai Tembuku memiliki panjang sungai 5,35 Km dan luas 684 Ha. Daerah aliran Sungai meliputi Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang.

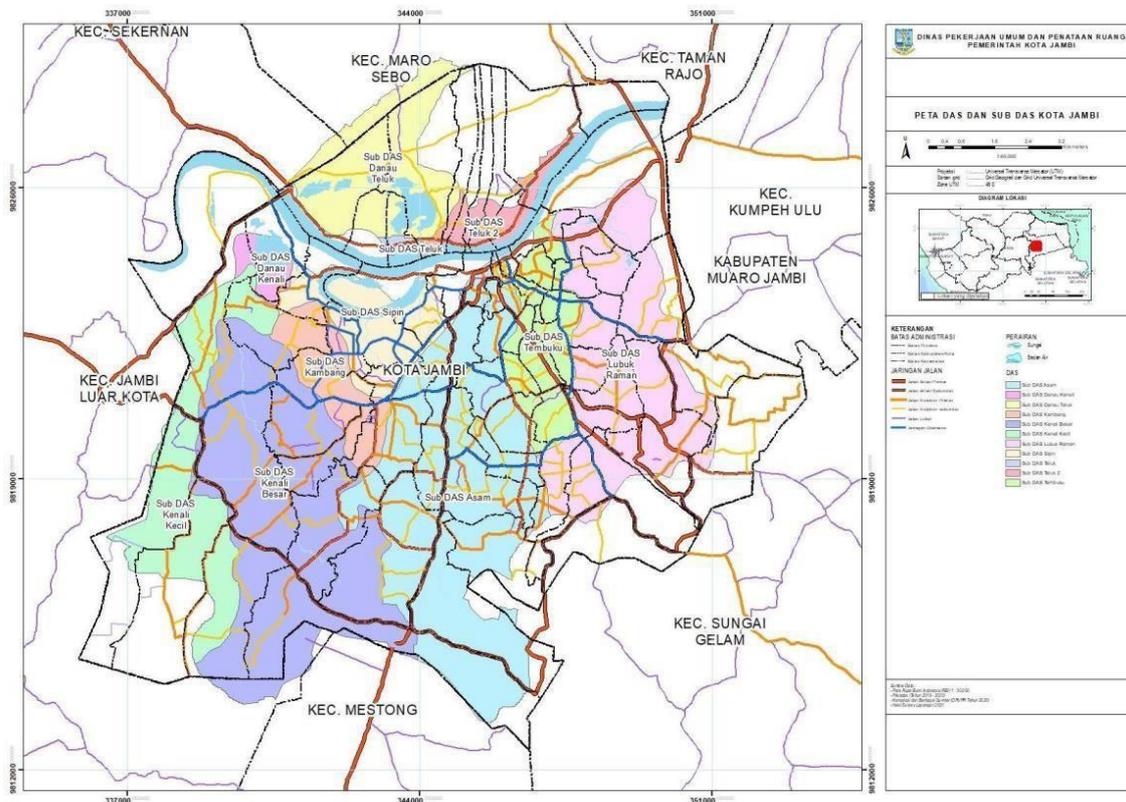
6. Sungai Sijenjang

Sungai Sijenjang memiliki panjang 8,37 Km dan luas 1.887. Daerah aliran Sungai meliputi Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya.

7. Sungai Danau Teluk

Sungai Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km dan luas 1.889 Ha. Daerah aliran Sungai Mengalir dari sungai Batanghari menuju danau Teluk di Kecamatan Danau Teluk.

Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologi juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

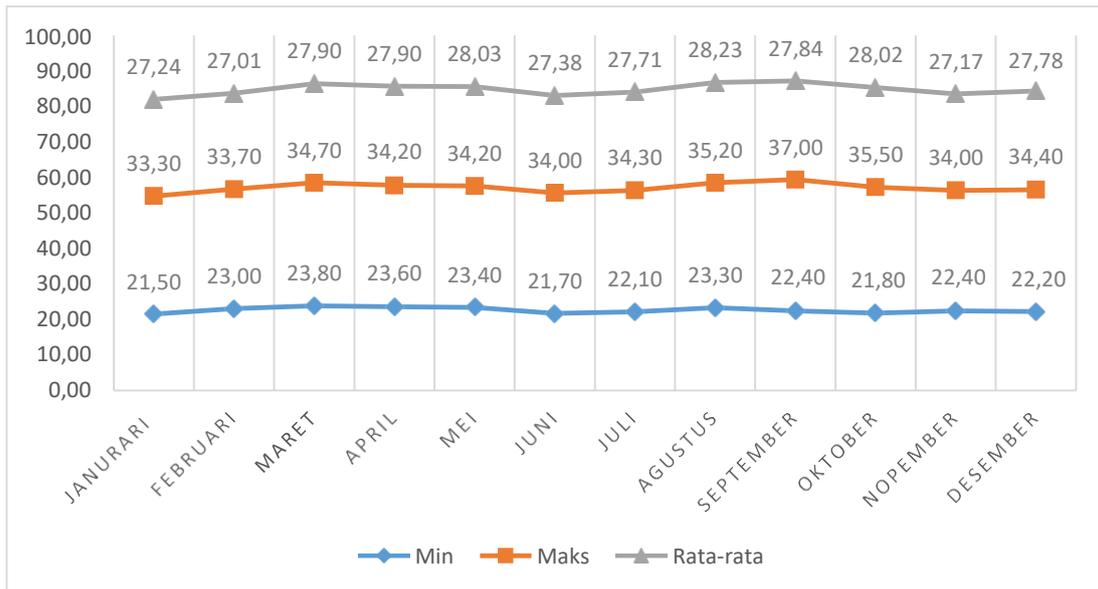


Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi

D. Klimatologi

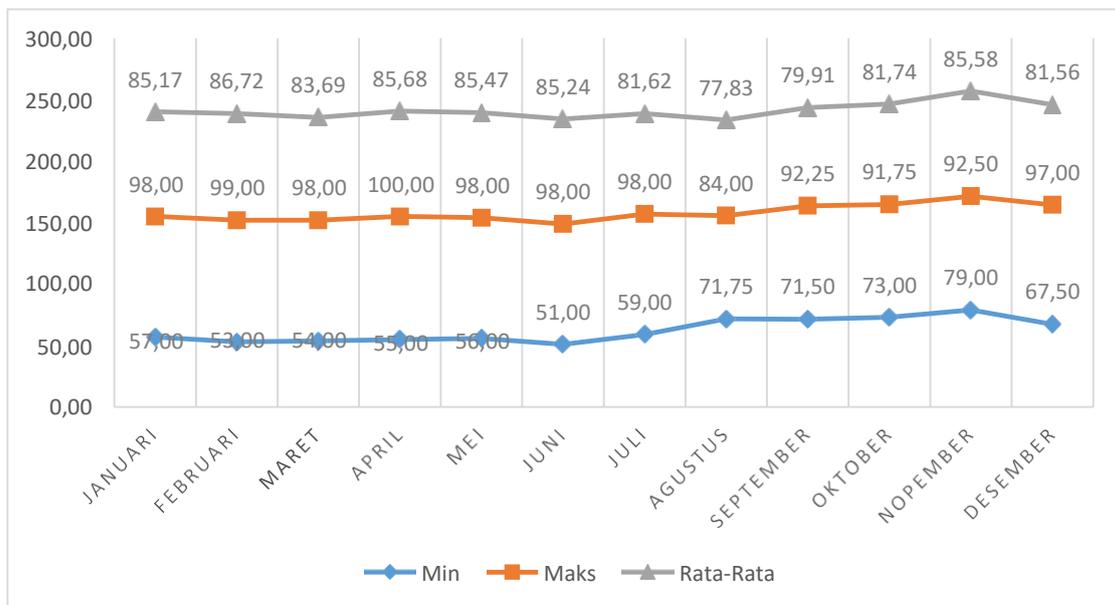
Secara klimatologi Kota Jambi dan sekitarnya beriklim tropis dengan dipengaruhi oleh angin Muson Barat dan Muson Timur. Pada saat muson barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April-Oktober, sementara muson timur angin bertiup ke arah timur dan selatan yang berlangsung pada bulan Oktober-April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

Selama tahun 2024 kelembaban udara terendah 51,00% pada bulan Juni, sedangkan tertinggi sebesar 100,0% pada bulan April. Curah hujan paling tinggi selama tahun 2024 terjadi pada bulan November yaitu 351,30 mm³ dan paling rendah terjadi pada bulan Juli yaitu 39,10 mm³. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 31 hari, dan hari hujan paling sedikit sebanyak 17 hari terjadi pada bulan Mei. Suhu, kelembaban udara, curah hujan dan hari hujan menurut bulan pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut



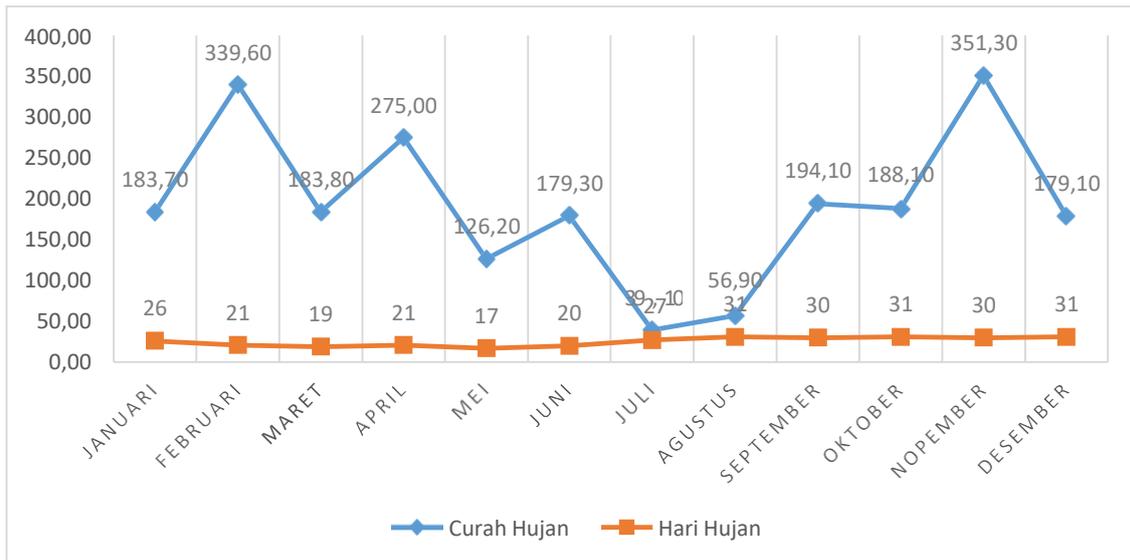
Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.6.
Suhu Minimum, Maksimum dan Rata-Rata di Kota Jambi Menurut Bulan Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.7.
Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata di Kota Jambi Menurut Bulan Tahun 2024



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.8.
Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Jambi
Menurut Bulan Tahun 2024

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kota Jambi secara geologis tidak memiliki potensi sumber daya alam tambang dan mineral. Sungai Batanghari yang membelah Kota Jambi yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berdiam di sepanjang Sungai Batanghari menyediakan sumber daya alam berbasis hewani seperti ikan dan udang. Sungai Batanghari dan Danau Sipin juga dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya perikanan tambak. Sungai Batanghari juga dimanfaatkan oleh sebagian kecil masyarakat untuk melakukan aktivitas tambang emas secara tradisional.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah, penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan berdasarkan dengan beberapa pendekatan, dimana salah satunya adalah dengan melakukan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan.

2.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

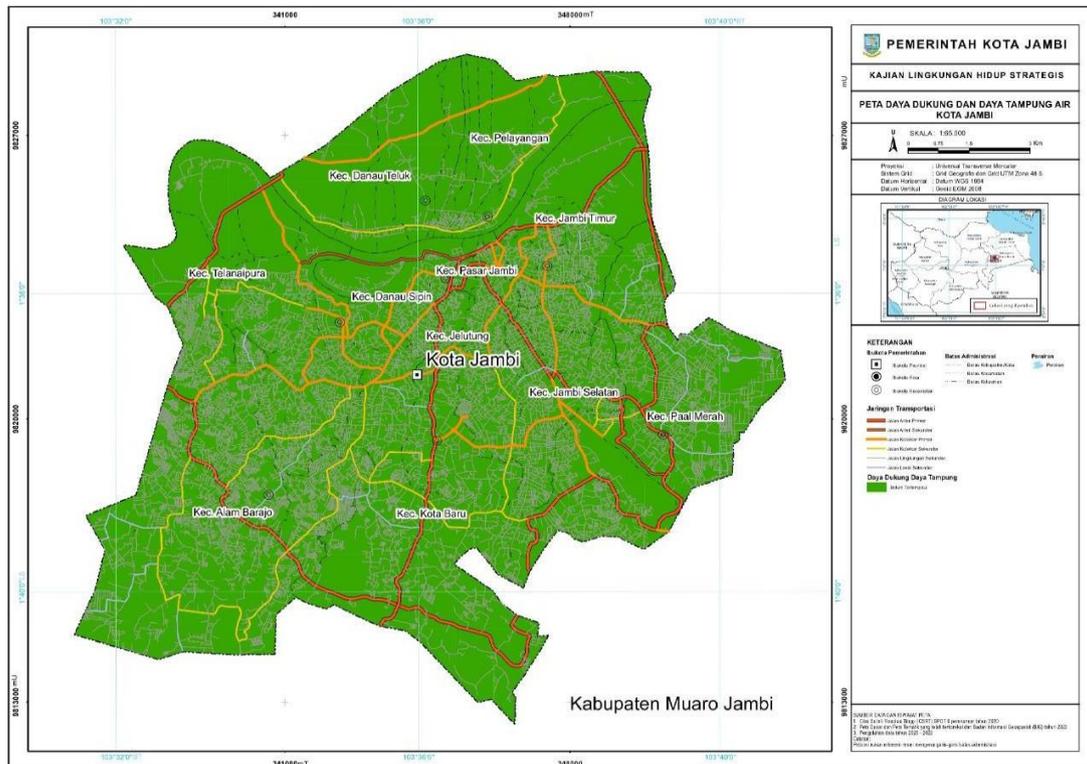
A. Kebutuhan Air

Kebutuhan air merupakan jumlah air yang digunakan untuk keperluan berbagai bentuk kegiatan masyarakat dalam suatu ruang wilayah. Dalam kasus ini kebutuhan air yang diperhitungkan yaitu kebutuhan air untuk peruntukan kegiatan rumah tangga (domestik) dan kebutuhan non domestik seperti: fasilitas umum, seperti meliputi perkantoran, pendidikan, irigasi, peternakan, industri, serta untuk pemeliharaan/ penggelontoran sungai.

Berdasarkan penghitungan kebutuhan (demand) air diperkirakan kebutuhan air di Kota Jambi adalah 991.284.800 m³/tahun

B. Ketersediaan Air

Dalam perhitungan ketersediaan air digunakan pemodelan spasial, data yang digunakan berada pada tingkat skala yang memungkinkan mengubah data tabular menjadi sebaran (spasial). Dalam penentuan kecukupan jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air sistem grid dibuat dengan memperhatikan datum geodetic, sistem koordinat, titik asal sistem koordinat. Berikut gambar daya dukung dan daya tampung air kota jambi



Gambar 2.9
Peta Daya Dukung Air

C. Daya Tampung Air

Sungai Batanghari merupakan air permukaan yang utama dan mengalir melewati Kota Jambi yang berasal dari Pegunungan Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat melewati Kota Jambi dan bermuara di Selat Berhala. Luas DAS Batanghari sekitar 37.500 km² yang meliputi sebagian dari Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi. Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian di sisi utara dan selatannya.

Sumber Daya Air yang terdapat di Kota Jambi meliputi: sumber daya air sungai, sumber daya air danau, dan sumber daya air tanah. Sumber daya air sungai sendiri terdiri atas 2 (dua), yaitu: sumber daya air Sungai Batanghari dan sumber daya air Sub DAS Batanghari yang terdiri dari 8 (delapan) Sub DAS, namun sumber daya air sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku adalah

sumber daya air Sungai Batanghari, yang merupakan sungai lintas provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat

Dari hasil Analisa terhadap kualitas air sungai di kota Jambi diketahui Indeks pencemaran air sungai adalah:

Tabel 2.2
Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Jambi

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air
1	Kenali Besar (hulu)	4,8	Ringan
2	Kenali Besar (hilir)	5,4	Sedang
3	Kenali Kecil (hulu)	4,2	Ringan
4	Kenali Kecil (hilir)	5,8	Sedang
5	Asam (hulu)	5,2	Sedang
6	Asam (hilir)	5,3	Sedang
7	Tembuku (hulu)	6,4	Sedang
8	Tembuku (hilir)	5,9	Sedang
9	Selincih (hulu)	4,3	Ringan
10	Selincih (hilir)	3,8	Ringan
11	Kambang (hulu)	5,7	Sedang
12	Kambang (hilir)	4,3	Sedang
13	Putri (hulu)	5,8	Sedang
14	Putri (hillir)	5,2	Sedang
15	Solok Sipin (hulu)	3,5	Ringan
16	Solok Sipin (hilir)	5,0	Sedang

Sumber: *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD*

Dari tabel diatas diketahui nilai indeks pencemaran (IP) berada antara 3.5-6.4 dengan nilai IP terendah berada pada hulu sungai Solok Sipin dengan kategori tercemar ringan, sedangkan IP tertinggi berada pada hulu sungai Tembuku dengan kategori tercemar sedang. Pencemaran sungai di Kota Jambi didominasi oleh tingginya kadar BOD5, COD, DO, PO4, CU dan Zn.

Tabel 2.3
Indeks Kualitas Air Danau di Kota Jambi

No	Nama Anak Sungai	IP	Status Mutu Air
1	Danau Sipin (komersil)	4,2	Ringan
2	Danau Sipin (non komersil)	2,9	Ringan
3	Danau Sipin (muara)	5,1	Sedang
4	Danau Teluk (komersil)	3,2	Ringan
5	Danau Teluk (non komersil)	2,1	Ringan
6	Danau Teluk (muara)	4,6	Ringan
7	Danau Kenali (komersil)	3,5	Ringan
8	Danau Kenali (non komersil)	2,8	Ringan
9	Danau Kenali (muara)	4,3	Ringan

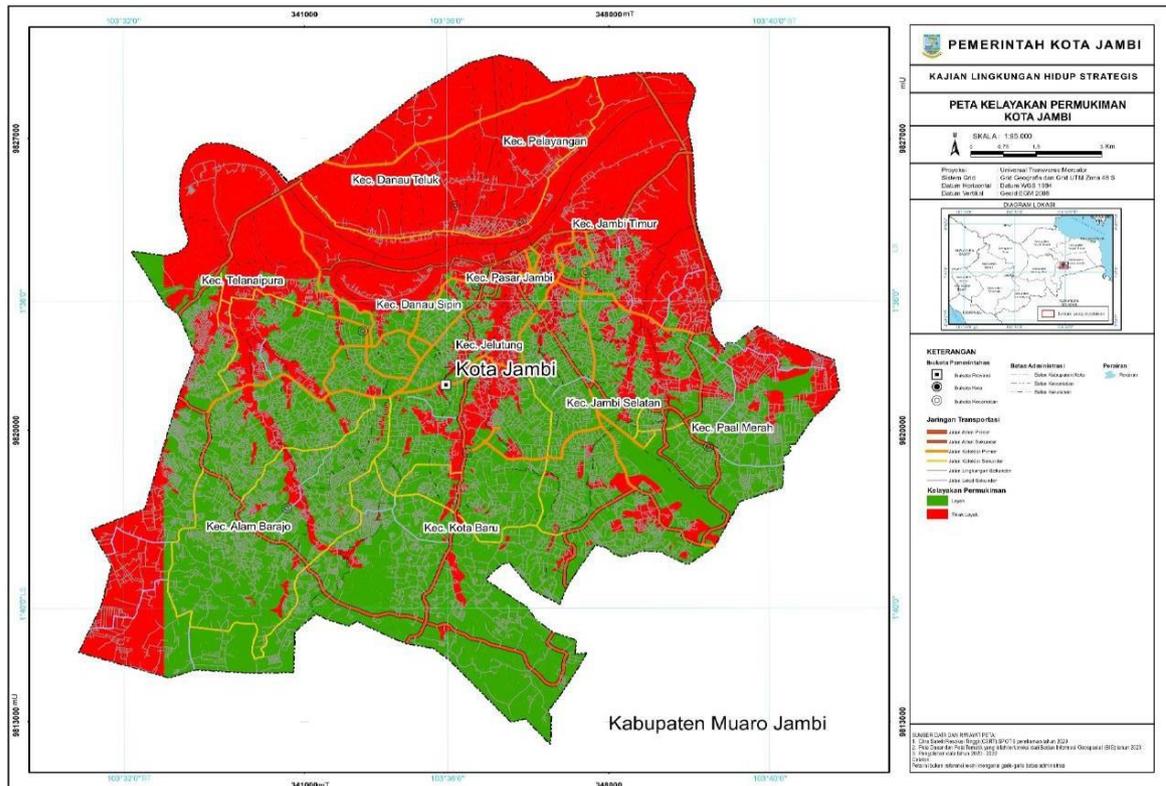
Sumber: *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD*

Pencemaran air danau di Kota Jambi di dominasi dengan tingginya kadar BOD5, COD, Nitrit, PO4, CU dan Zn. Nilai Indeks Pencemar terendah berada di Danau Teluk (non komersil) sedangkan yang tertinggi di Danau Sipin (muara).

2.1.3.2 Daya Dukung Permukiman

Merujuk pada pemanfaatan lahan, kawasan perkotaan akan didominasi dengan kegiatan untuk fungsi sebagai kawasan permukiman. Cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan akan berdampak kepada penggunaan lahan yang terlalu berlebihan sehingga melampaui kemampuan lahan, yang berakibat pada menurunnya daya dukung lahan dan berdampak pada penurunan produktivitas lahan yang selanjutnya dapat berdampak terhadap permasalahan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan akan lahan dan sumberdaya alam suatu wilayah, tidak dapat lepas dari kajian perkiraan jumlah penduduk pada masa yang akan datang,

Penduduk merupakan faktor utama dalam perencanaan, karena suatu perencanaan yang disusun untuk keperluan pada masa datang didasari oleh pengetahuan tentang masalah yang sama pada masa sebelumnya. Angka pertambahan penduduk tidak lepas dari data-data penduduk sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi angka pertambahan penduduk seperti masalah kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Populasi berubah dengan angka–angka kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk. Jadi faktor–faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi.

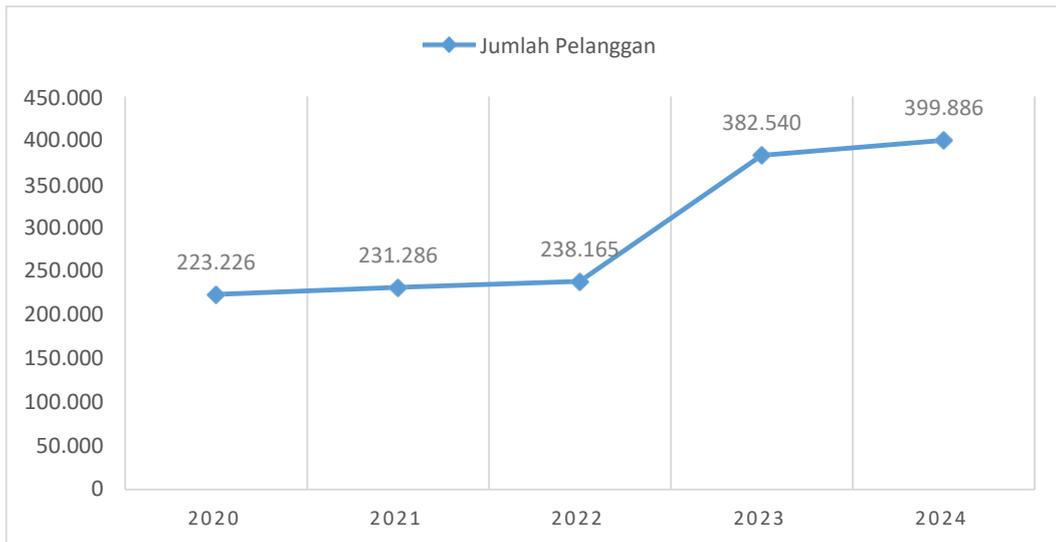


Gambar 2.10
Peta Potensi Kelayakan Permukiman di Kota Jambi

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Jaringan Energi Kelistrikan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pelanggan listrik pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, dimana pelanggan listrik pada tahun 2020 sebanyak 223.226 pelanggan meningkat menjadi 399.886 pada tahun 2024. Gambaran mengenai jumlah pelanggan di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut.



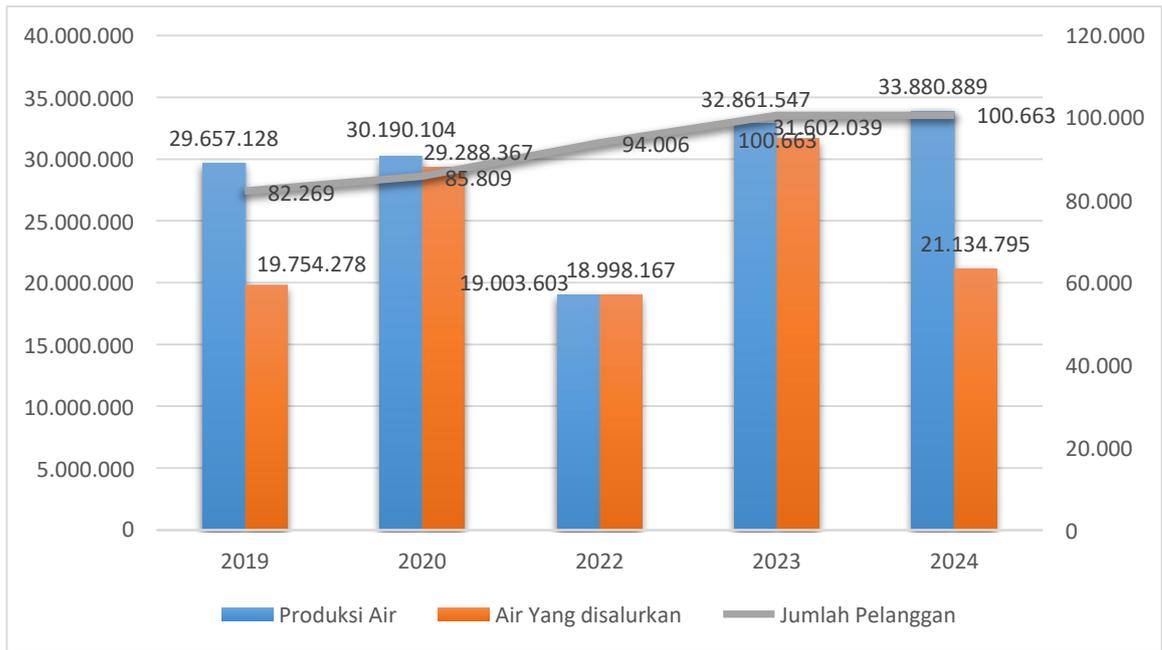
Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.11
Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Jambi
Tahun 2020-2024

2.1.4.2 Ketersediaan Air Bersih

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air bersih di Kota Jambi mengalami perkembangan relatif meningkat setiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Jambi pada tahun 2019 sebanyak 82.269 pelanggan, meningkat menjadi 104.013 pelanggan pada tahun 2024. Demikian pula untuk produksi air dan pemakaian air, pada tahun 2019 masing-masing sebesar Rp 29.657.128 m³ dan 19.754.278 menjadi 33.880.889 m³ dan Rp 21.134.795 di tahun 2024.

Secara lengkap data perkembangan jumlah pelanggan, pemakaian dan penjualan air bersih PDAM dapat dilihat pada tabel berikut



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 2.12
Produksi Air, Penyaluran dan Jumlah Pelanggan
PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi Tahun 2019-2024

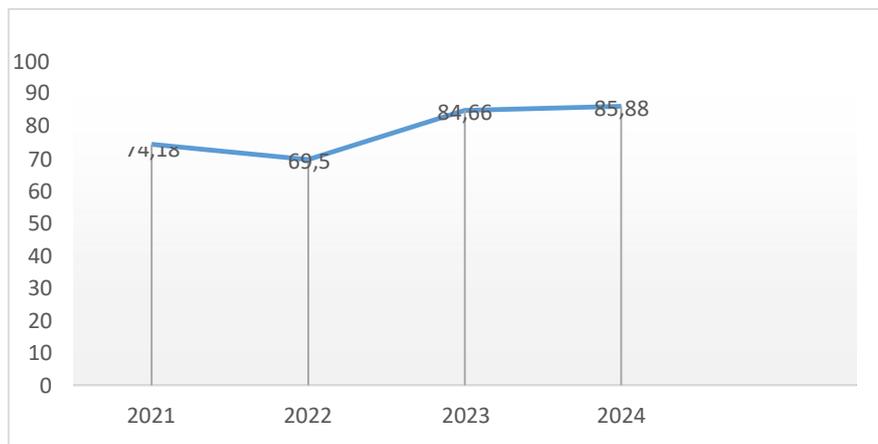
2.1.4.3 Kemandirian Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis

pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain : beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.



Gambar 2.13 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan Pangan Kota Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yaitu sebesar 85,88 lebih tinggi dari

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian. Situasi kemandirian pangan di Kota Jambi tahun 2022 dibuktikan dari segi ketersediaan Angka Kecukupan Energi (AKE) Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.005 kkal/kap/hari dari AKE yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 321 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 169,6 gr/kap/hari. Segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar deviasi *error* yang kecil. Data estimasi

ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Survey Ekonomi Nasional. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut diasumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka *over supply* diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

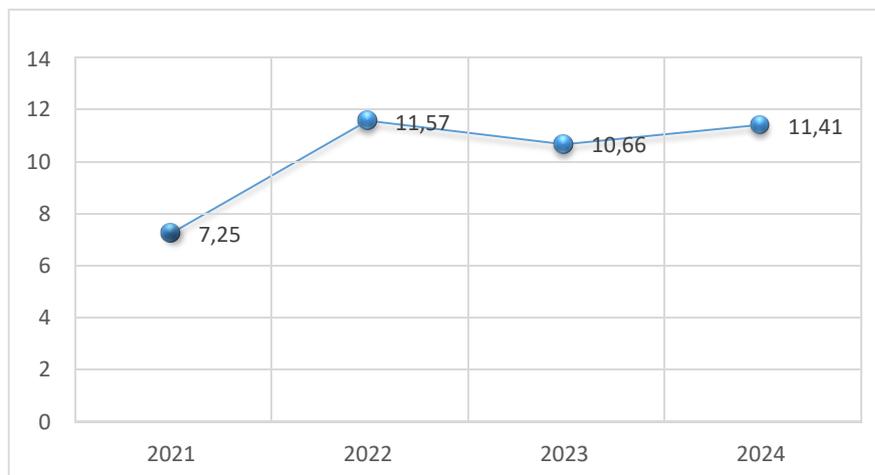
Tabel 2.4
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2024

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	264,3	1.046	52,2	49,8	0,5	26,01	24,9	25,0	24,9
Umbi-umbian	53,3	54	2,7	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,2
Pangan Hewani	169,6	321	16,0	15,3	2,0	32,0	30,5	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	31,3	281	14,0	13,4	0,5	7,0	6,7	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	1,9	10	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,2
Kacang-kacangan	25,2	65	3,3	3,3	2,0	6,5	6,2	10,0	6,2
Gula	18,5	68	3,4	3,4	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
Sayur dan Buah	249,8	125	6,2	6,2	5,0	31,2	29,8	30,0	29,8
Lain-lain	61,1	34	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.005	100,0	95,5	11,5	106,1	101,3	100	93,1

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2024, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 93,1 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90. Hal ini menunjukkan telah beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,2

Berkaitan dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah persentase penduduk yang mengkonsumsi energy (kalori) lebih rendah dari kebutuhan minimal harian untuk hidup sehat dan beraktivitas normal. Standar kebutuhan energy minimal biasanya mengacu pada angka ± 2.100 kkal per kapita per hari. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah untuk memberikan gambaran nyata tentang kerentanan pangan di masyarakat. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah indikator yang menggambarkan persentase penduduk suatu wilayah yang asupan energinya (kalori) lebih rendah dari kebutuhan minimal untuk hidup sehat dan beraktivitas normal.



Gambar 2.14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Pada tahun 2024 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan mengalami kenaikan sebesar 11,41 dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 10,66. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang tidak mampu memenuhi kecukupan energy minimum sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk rawan pangan.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan dan pengendalian terhadap status mutu air di Kota Jambi ditetapkan pada 8 Sub-DAS dan 3 danau. Berdasarkan hasil analisis laborat terhadap sampel air sungai yang diobservasi/diuji dan dilakukan penghitungan Indeks Pencemaran, secara umum menunjukkan indikasi tercemar ringan sampai sedang.

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada tahun 2023 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 100. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2023 mencapai 100%.

Tabel 2.5
Indikator Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemantauan status mutu air (sungai)	%	100	100	100	100	100
2.	Pemantauan kualitas air	Titik	29	41	38	36	36
3.	Pemantauan kualitas udara	Titik	9	4	4	4	4
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Jlh Dok	2	1	2	8	4
5.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	Jlh Dok	59	60	100	100	44
6.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100
7.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024

Penanganan sampah selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2020 jumlah sampah yang ditangani sebanyak 117.445 ton (79,24%) meningkat menjadi 133.995 ton (82,54%) pada tahun 2024. Hal ini seiring dengan volume produksi sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut Penanganan Sampah di Kota Jambi.

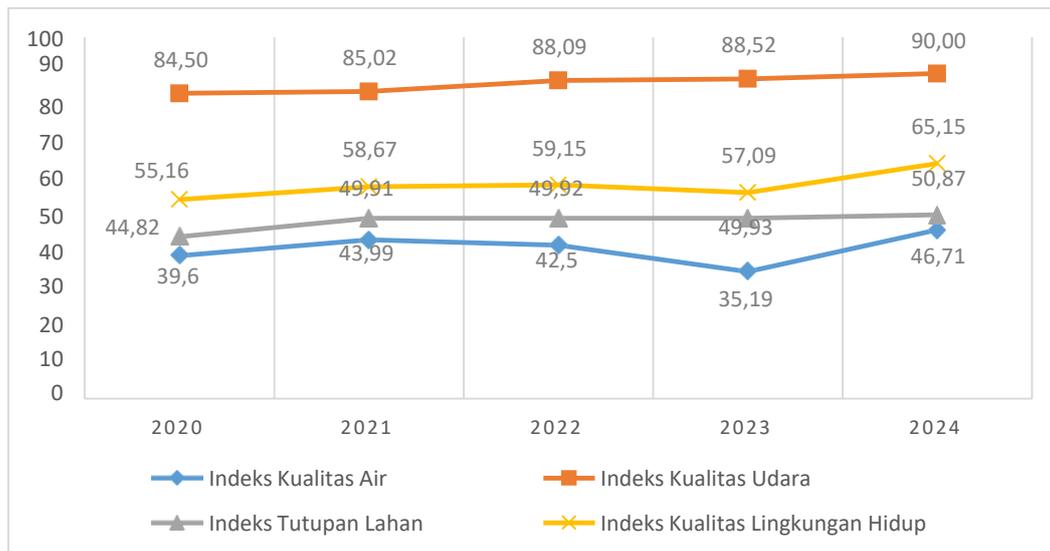
Tabel 2.6
Penanganan Sampah Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Sampah yang ditangani	117.445,26	118.999,31	119.723,96	119.723,96	133.995,63
2.	Volume Produksi Sampah	158.106,98	159.688,01	159.688,01	161.897,58	162.341,13
3.	Persentase Penanganan Sampah (%)	79,24	75,27	74,97	73,95	82,54
4.	Jumlah TPS	445	445	445	455	382
5.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³ /hari)	1.018	1.018	1.018	1.018	955
6.	Jumlah Penduduk	611.353	618.814	618.814	633.650	639.986
7.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2024

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan setiap tahunnya, guna mengetahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup

suatu kota dari segi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 35-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Sedangkan kriteria Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun masih Sangat Baik, dengan indeks di atas 84,50.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2025

Gambar 2.15

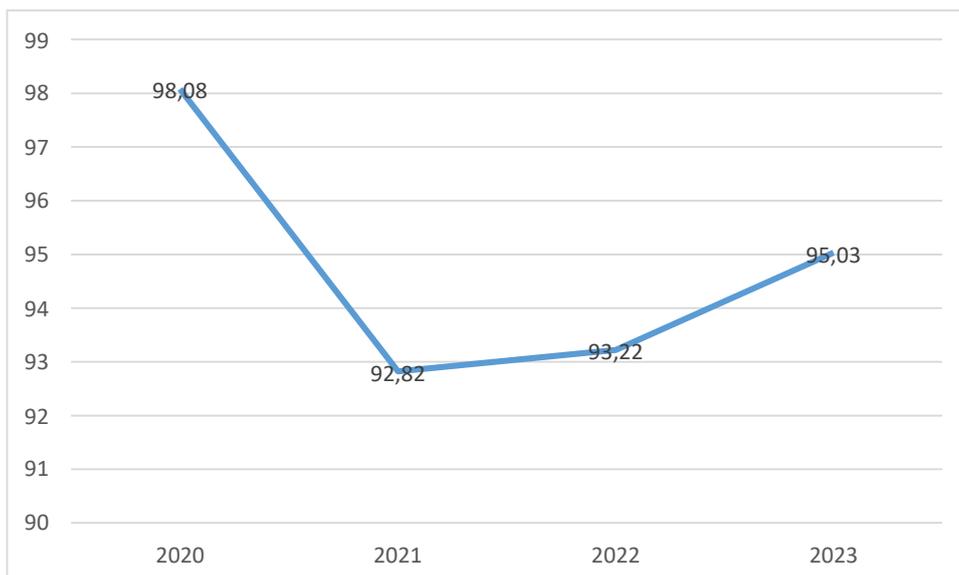
Indikator Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Kota Jambi Tahun 2020-2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Jambi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

IKLH	=	(IKAx30%)	+	(IKUx30%)	+	(ITLX40%)
IKLH 2023	=	(35,19x30%)	+	(88,52x30%)	+	(49,93x40%)
IKLH 2023	=	57,09				

IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan indeks tahun 2019 ke tahun 2023 yaitu dari 52,46 menjadi 57,09

Indikator Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman/Layak merupakan hal penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.



Gambar 2.16

Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman/Layak

Kota Jambi menunjukkan kemajuan luar biasa dalam akses sanitasi layak sepanjang tahun 2020–2023. Pada tahun 2024 Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman/Layak di Kota Jambi sebesar 95,03. Hal ini menggambarkan bahwa di Kota Jambi cakupan Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Aman/Layak sudah sangat tinggi dan terus membaik, sehingga risiko penyakit berbasis lingkungan makin kecil dan target SDGs semakin dekat tercapai.

2.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Kejadian Bencana di Kota Jambi

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), terjadi sebanyak 41 kejadian bencana yang tercatat dari tahun 2010 sampai tahun 2022 di Kota Jambi. Kejadian bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir, bencana angin puting beliung dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Kejadian Bencana di Kota Jambi

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban				Kerusakan			
			Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Peribadatan	Perkantoran
2020										
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	54	2	-	-	-	19	-	-	-
	Jumlah									
2021										
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	50	-	-	-	-	24	-	-	-
	Jumlah									
2022										
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	66	-	-	-	-	33	-	-	1
	Jumlah									
2023										
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	175	1	1	-	-	47	2	-	2
	Jumlah									
2024										
1	Banjir									
2	Puting beliung									
3	Kebakaran	156	-	4	-	-	32	2	-	1
	Jumlah	501	3	5	-	-	155	4	-	4

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, 2025.

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Jambi adalah bencana banjir yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 501 kejadian, korban meninggal sebanyak 3 orang, terluka sebanyak 5 orang. Rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 155 unit, fasilitas pendidikan sebanyak 4 unit dan perkantoran sebanyak 4 unit. Sepanjang tahun 2020-2024, bencana yang terjadi di Kota Jambi seluruhnya berupa kebakaran.

Tabel 2.8
Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
Tahun 2021			
Jambi Timur	Budiman	Kebakaran	1
	Tanjung Pinang	Kebakaran	1
Jelutung	Lebak Bandung	Kebakaran	1
	Jelutung	Rumah Roboh	5
Alam Barajo	Kenali Besar	Kestrum Listrik	1
	Mayang Mangurai	Kebakaran	3
	Rawa Sari	Rumah Roboh	2
	Bagan Pete	Kebakaran	2
Danau Teluk	Olak Kemang	Kebakaran	1
Kota Baru	Simpang III Sipin	Kebakaran	6
Danau Sipin	Legok	Kebakaran	6
	Sungai Putri	Kebakaran	1
	Sungai Putri	Tanah Lonsor	2
Talanai Pura	Telanai Pura	Kebakaran	1
	Buluran Kenali	Tenggelam	1
	Pematang Sujur	Rumah Roboh	1
Paal Merah	Eka Jaya	Kebakaran	3
Jambi Selatan	Pasir Putih	Kebakaran	1
Pelayangan	Arab Melayu	Kebakaran	2
Jumlah			41
Tahun 2022			
Alam Barajo	Kenali Besar	Kebakaran	3
	Kenali Besar	Tanah Longsor	1
	Rawa Sari	Kebakaran	2
	Rawa Sari	Angin Putting Beliung	1
	Rawa Sari	Tenggelam	1
	Bagan Pete	Kebakaran	4
	Beliung	Tertimpa Pohon	1
Jambi Timur	Kasang	Kebakaran	6
	Kasang	Angin Putting Beliung	1
	Kasang	Tenggelam	3
	Tanjung Pinang	Kebakaran	2
	Sijenjang	Kebakaran	1
	Tanjung Sari	Tenggelam	1
Jelutung	Jelutung	Kebakaran	3
	Lebak Bandung	Kebakaran	5
	Handil Jaya	Kebakaran	2
	Handil Jaya	Tenggelam	1
	Payo Lebar	Tertimpa Pohon	1
	Payo Lebar	Kebakaran	6
	Cempaka Putih	Tenggelam	1
Kota Baru	Kenali Asam	Kebakaran	4
	Suka Karya	Kebakaran	2
	Simpang III Sipin	Kebakaran	1
Talanai Pura	Buluran Kenali	Kebakaran	1
	Teluk Kenali	Kebakaran	1

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
Paal Merah	Lingkar Selatan	Kebakaran	2
	Payo Selincah	Kebakaran	3
	Eka Jaya	Kebakaran	2
Danau Sipin	Legok	Angin Putting Beliung	1
	Legok	Kebakaran	2
	Legok	Tanah Longsor	1
	Solok Sipin	Kebakaran	11
	Sungai Putri	Tanah Longsor	1
Jambi Selatan	Thehok	Kebakaran	1
Pelayangan	Mudung Laut	Kebakaran	1
	Tahtul Yaman	Kebakaran	3
Jumlah			76

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, 2022.

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kejadian bencana yang dialami penduduk di Kota Jambi diantaranya bencana kebakaran rumah, tanah longsor, angin puting beliung. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 41 orang, dan pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan atas kejadian bencana sebanyak 76 orang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selaku instansi yang terkait langsung dengan penanganan perumahan dan kawasan permukiman belum memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan.

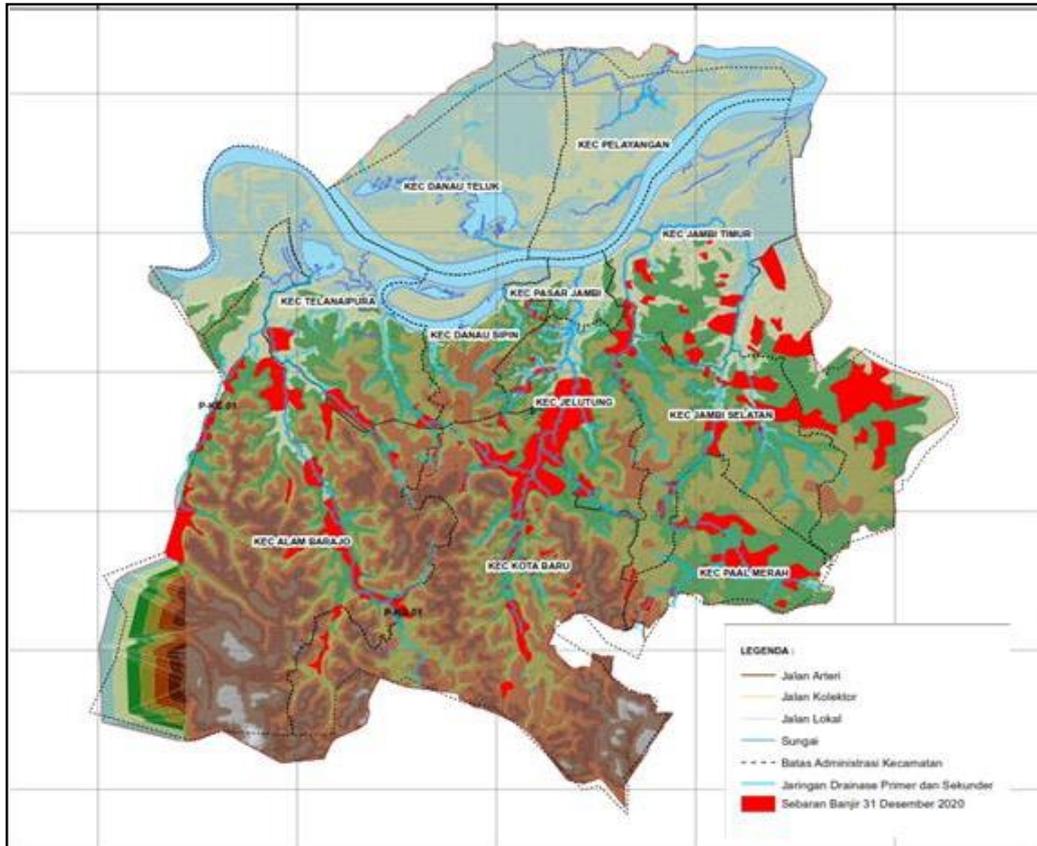
B. Kawasan Rawan Bencana di Kota Jambi

Kota Jambi merupakan wilayah yang berada pada dataran rendah dengan tingkat kelerengan lahan sebagian besar 0 – 2% memiliki 5 anak sungai dengan 8 Daerah Aliran Sungai. Pembangunan yang bersifat fisik di wilayah Kota Jambi berlangsung pesat sehingga terjadi perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kawasan yang pada awalnya sebagai daerah tangkapan air berubah menjadi lahan perumahan dan permukiman atau lahan dengan fungsi lainnya. Intensitas hujan yang tinggi, akibat perubahan fungsi lahan tersebut menjadikan air hujan tidak terserap ke dalam tanah sehingga meluap kepermukaan.

Tabel 2.9
Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kecamatan	Kelurahan	Luas Permukiman (Terdampak Banjir) (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
Alam Barajo	Bagan Pete	1,3	15
	Beliung	4,92	129
	Kenali Besar	51,55	463
	Kenali Kecil	79,27	1324
	Mayang Mangurai	25,93	282
	Rawasari	14,87	575
	Simpang Rimbo	57,83	839
Telanaipura	Pematang Sulur	21,93	200
	Simpang IV Sipin	37,61	1049
Danau Sipin	Murni	6,68	348
	Solok Sipin	0,1	8
Jambi Selatan	Pakuan Baru	3,16	113
	Pasir Putih	56,24	1269
	Talang Bakung	48,38	940
	Tambak Sari	10	315
	The Hok	12,38	357
	Wijayapura	4,03	162
Jambi Timur	Budiman	0,23	4
	Kasang Jaya	4,16	98
	Rajawali	14,87	575
	Sulanjana	9,07	379
	Talang Banjar	38,45	931
	Tanjung Pinang	0,05	16
	Tanjung Sari	12,51	329
Jelutung	Cempaka Putih	1,27	53
	Handil Jaya	17,08	429
	Jelutung	84,06	1995
	Lebak Bandung	7,46	245
	Payo Lebar	8,24	307
	Talang jauh	23,15	400
Kota Baru	Kenali Asam	20,31	241
	Kenali Asam Atas	4,99	39
	Kenali Asam Bawah	30,72	334
	Paal V	102,79	1891
	Simpang III Sipin	41,17	940
	Suka Karya	52,19	827
	Talang Gulo	18,61	85
Paal Merah	Bakung Jaya	56,35	748
	Eka Jaya	109,41	2376
	Lingkar Selatan	47,98	1140
	Paal merah	84,85	1014
	Payo Selincah	75,08	2451
Pasar Jambi	Beringin	0,15	5
Jumlah		1.301	26.240

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan diolah dengan hasil digitasi dan interpretasi peta citra satelit



Gambar 2.17
Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi

C. Indikator Penurunan Emisi GRK

Penurunan emisi GRK adalah upaya mengurangi jumlah gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pengelolaan limbah, dan kegiatan pertanian. Tujuan dari penurunan emisi GRK untuk mengurangi pemanasan global, menjaga ketahanan iklim, mendorong pembangunan rendah karbon, dan mendukung target nasional dan global.

Indikator penurunan emisi GRK mencakup jumlah emisi aktual, persentase penurunan dari BAU, intensitas emisi per unit aktivitas, serta indikator sektoral (energi, hutan, pertanian, limbah). Dalam RPJPD Kota Jambi 2025–2045, ditetapkan target penurunan intensitas emisi GRK sebesar 70–75% dengan baseline tahun 2025 sebesar 16,87%. Penurunan emisi GRK adalah inti dari *mitigasi perubahan iklim*. Caranya dengan beralih ke energi bersih, menjaga hutan, mengelola limbah, serta mendorong pertanian & industri rendah karbon.

D. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang disusun oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk menggambarkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah.

Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa besar potensi kerugian atau dampak bencana yang mungkin dialami masyarakat, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tertentu. Komponen utama Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu:

a. *Bahaya (Hazard)*

Potensi kejadian bencana alam yang bisa terjadi di suatu daerah seperti banjir, gempa, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan/lahan.

b. *Kerentanan (Vulnerability)*

- Tingkat ketidakmampuan masyarakat menghadapi bencana
- Dilihat dari factor social, ekonomi, fisik dan lingkungan

Kerentanan dapat dilihat kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, kualitas rumah, pendidikan dan akses layanan kesehatan

c. *Kapasitas (Capacity)*

- Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi, merespons, dan pulih dari bencana.
- Termasuk ketersediaan sarana prasarana, regulasi, sumber daya manusia, serta sistem peringatan dini

Fungsi Indeks Risiko Bencana, yaitu:

1. Alat Perencanaan, sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun program mitigasi & kesiapsiagaan.
2. Prioritas Anggaran, untuk menentukan wilayah mana yang butuh dana lebih besar untuk pengurangan risiko bencana.
3. Indikator Pembangunan Berkelanjutan, untuk membantu mengukur ketahanan wilayah terhadap bencana.
4. Informasi Publik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bahaya di daerahnya

Tabel 2.10
Nilai Indeks Risiko Bencana untuk Kota Jambi
Tahun 2021-2024

Tahun	Nilai IRB	Kelas Risiko
2021	127,23	Sedang
2022	119,49	Sedang
2023	123,24	Sedang
2024	124,67	Sedang

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kota Jambi dalam Kelas Risiko “Sedang” yang artinya Kota Jambi memiliki potensi bencana yang perlu dikelola secara serius. Indeks Risiko Bencana adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan potensi kerugian akibat bencana. Nilainya dipengaruhi oleh bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Indeks ini penting untuk perencanaan pembangunan agar lebih tangguh bencana.

E. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai tingkat ketahanan dan kerentanan suatu daerah terhadap berbagai potensi risiko, baik itu risiko bencana, krisis pangan, maupun gangguan pembangunan lainnya.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi bagian dari instrumen perencanaan pembangunan daerah agar pemerintah bisa mengantisipasi ancaman, memanfaatkan peluang, dan mengurangi kerentanan masyarakat. Secara umum, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dibangun dari tiga komponen besar:

1. Indeks Risiko

- Mengukur seberapa besar ancaman atau potensi gangguan yang dihadapi daerah. Contoh: risiko bencana (banjir, gempa), risiko ketidakcukupan pangan, risiko lingkungan.

2. Indeks Kerentanan

- Menilai sejauh mana masyarakat atau wilayah rentan terkena dampak risiko. Indikator: tingkat kemiskinan, ketergantungan ekonomi, kepadatan penduduk, gizi buruk.

3. Indeks Kapasitas (Daya Tahan)

- Menggambarkan kemampuan daerah untuk mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari risiko.
- Indikator: infrastruktur dasar, layanan kesehatan, akses pendidikan, jaringan sosial, kesiapan pemerintah.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) biasanya ditampilkan dalam skala tertentu. Skor dan Interpretasi (misalnya 0–100) atau dikategorikan Tinggi (tahan) untuk daerah cukup kuat menghadapi risiko Sedang (cukup rentan) untuk kerentanan tertentu yang harus diatasi, dan Rendah (rentan) untuk daerah sangat rentan, kapasitas rendah, perlu intervensi serius. Fungsi Indeks Ketahanan Daerah (IKD), antara lain:

1. Pemetaan kerentanan daerah → untuk mengetahui wilayah yang paling berisiko.
2. Dasar perencanaan pembangunan baik perencanaan strategis dan kebijakan → sebagai acuan dalam RPJMD, RKPD, dan program strategis.
3. Mitigasi risiko → membantu pemerintah menyiapkan langkah pencegahan bencana, krisis pangan, atau krisis sosial.
4. Monitoring & evaluasi → untuk melihat kemajuan daya tahan daerah dari waktu ke waktu.
5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Menyediakan dasar bagi komunikasi risiko dan kesiapsiagaan kebencanaan.
6. Indeks Ketahanan Daerah: Mulai tahun 2024, IKD menjadi indikator kinerja utama (IKU) bagi BPBD di tingkat provinsi/kabupaten/kot

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran komposit yang menggambarkan keseimbangan antara risiko, kerentanan, dan kapasitas daerah. Semakin tinggi nilai IKD, semakin kuat daerah tersebut menghadapi tantangan dan ancaman di masa depan.

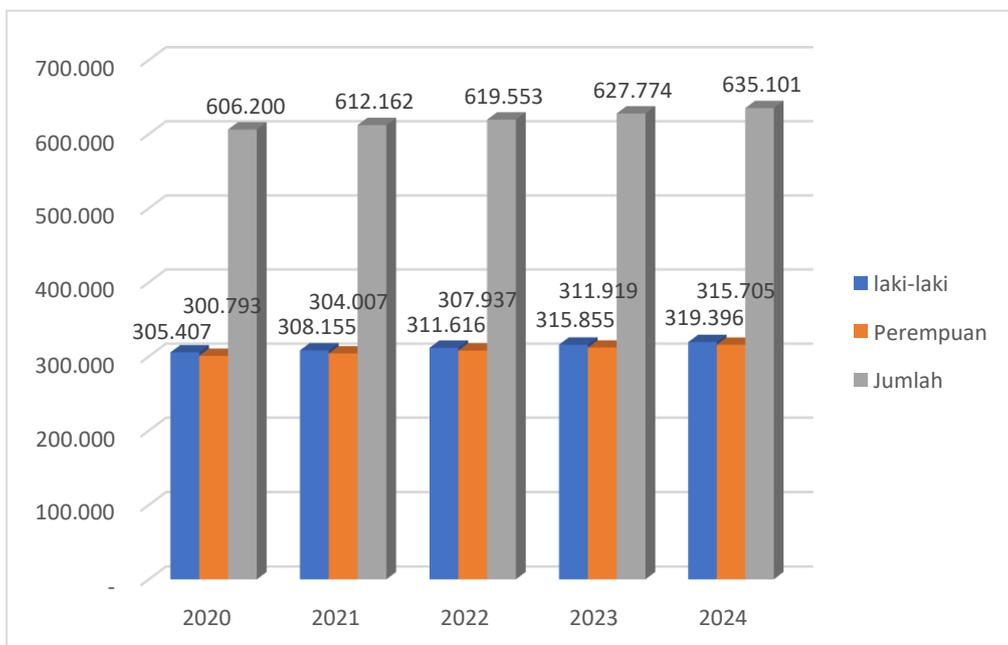
2.1.7 Demografi

2.1.7.1 Jumlah dan Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kota Jambi yang disajikan berikut ini didasarkan pada jenis kelamin dan kelompok umur.

A. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk kota Jambi pada tahun 2024 sebanyak 635.101 jiwa yang terdiri dari 319.396 jiwa laki-laki dan 315.705 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Jambi selama kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 606.200 jiwa, dan terus meningkat menjadi 635.101 jiwa pada tahun 2024 yang dapat dilihat pada gambar berikut.



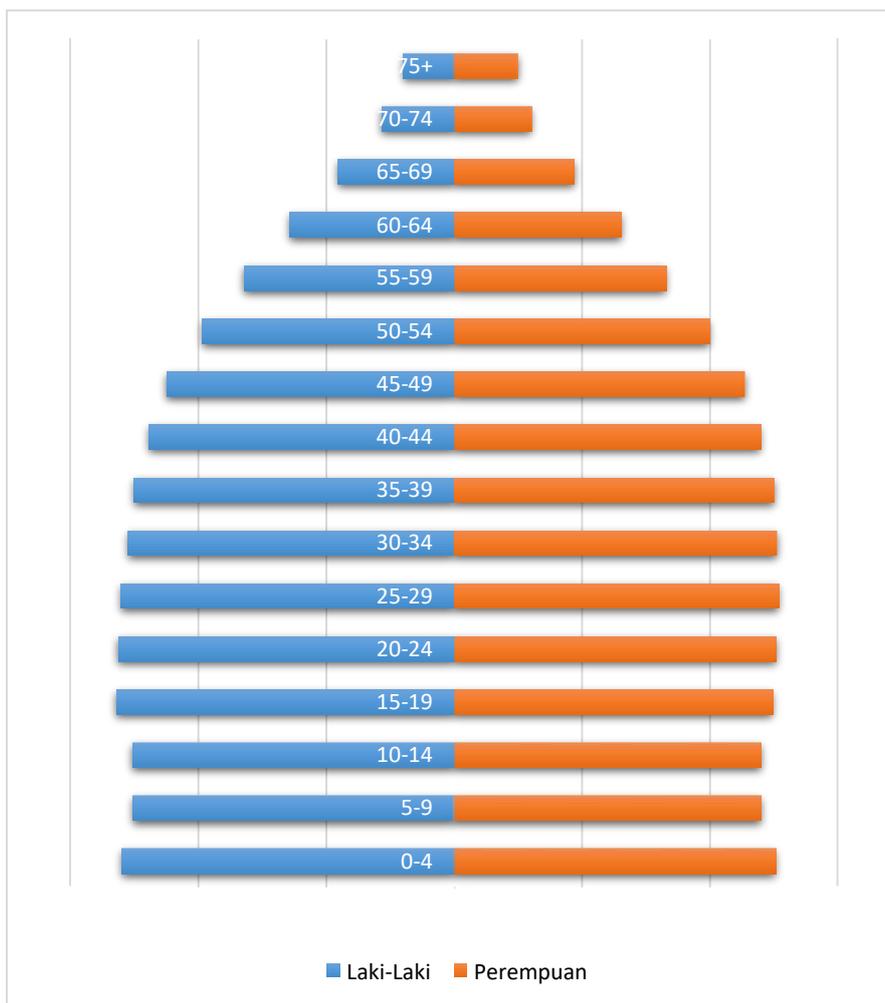
Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 2.18
Jumlah Penduduk Kota Jambi menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

B. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut Struktur Usia penduduk Kota Jambi dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kota Jambi adalah piramida penduduk muda yang menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang.

Pada tahun 2024 penduduk Kota Jambi paling banyak berada pada usia produktif yaitu rentang usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 51.429 jiwa atau sekitar 8,20% dari jumlah penduduk, diikuti rentang usia 25-29 tahun sebanyak 51.421 jiwa atau sekitar 8,20% dari jumlah penduduk. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 71.056 jiwa atau sekitar 11,21% dari jumlah penduduk. Proporsi tersebut menggambarkan besarnya potensi sumber daya manusia yang memiliki usia produktif dan menjadi modal sumber daya manusia pada pembangunan di Kota Jambi. Menurut kelompok umur (jiwa) disajikan pada gambar berikut.



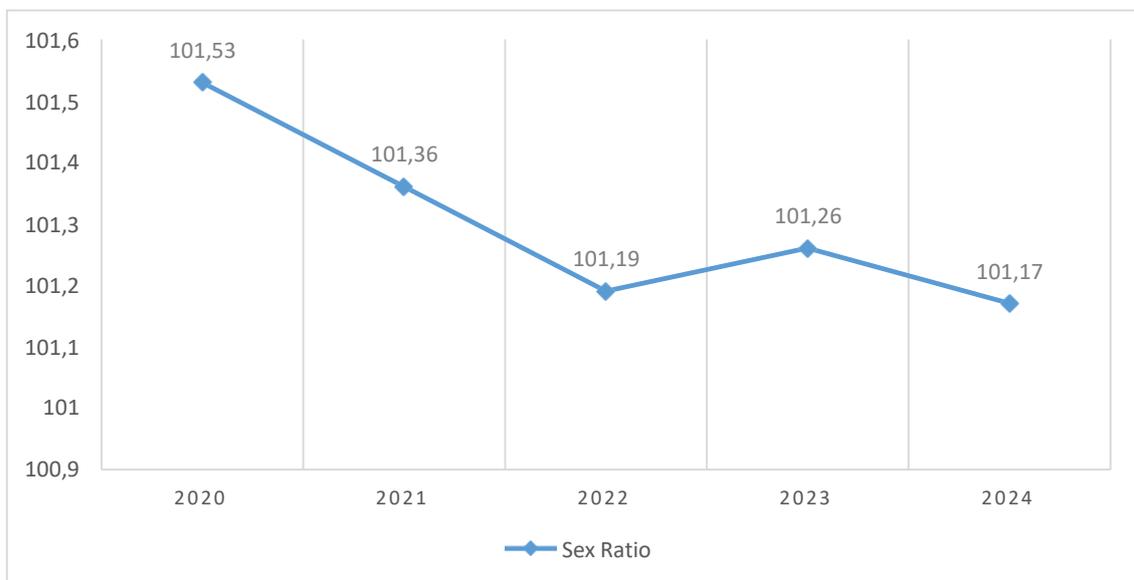
Gambar 2.19
Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

2.1.7.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah metode geometrik. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2020 hingga 2024 laju pertumbuhan penduduk di Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 1,22%. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun melambat.

2.1.7.3 Ratio Penduduk

Menurut jenis kelamin Kota Jambi memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (*sex ratio*) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,17 sampai dengan 101,53 untuk kurun waktu tahun 2020-2024. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Seperti dilihat pada gambar berikut.

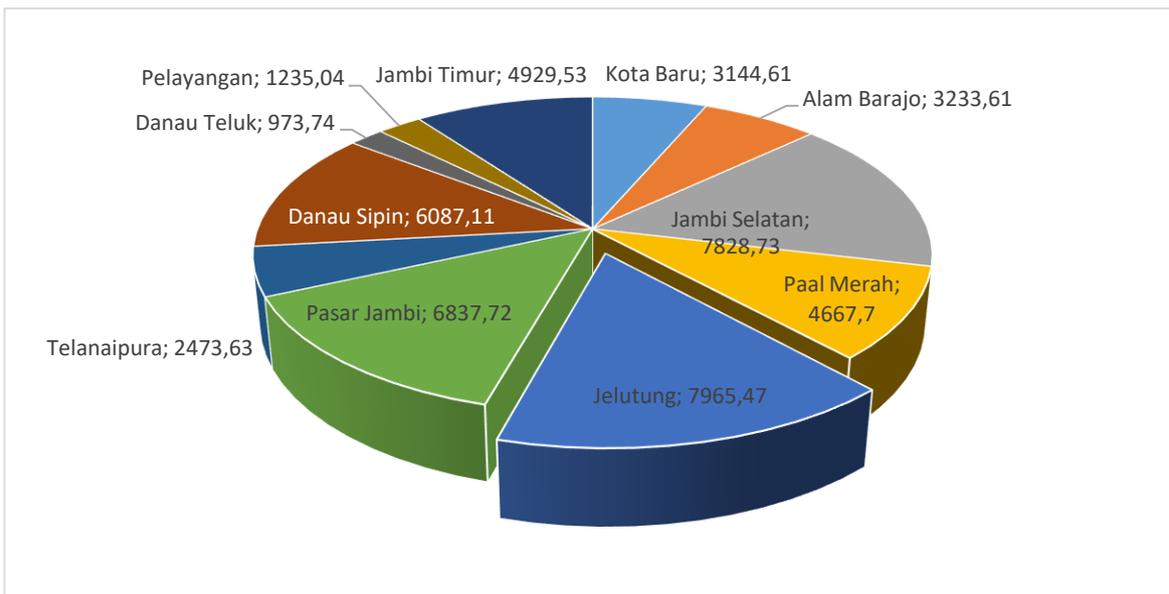


Sumber: BPS Kota Jambi, 2025 (data diolah)

Gambar 2.20
Sex Ratio di Kota Jambi Tahun 2020-2024

2.1.7.4 Kepadatan Penduduk

Berdasarkan kepadatan penduduk pada tahun 2024, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Jelutung 7965,47 Jiwa/Km², Kecamatan Jambi Selatan 7828,73 jiwa/km² dan Kecamatan Pasar Jambi 6837,72 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang jarang penduduknya berada di kecamatan Pelayangan sebanyak 1235,04 Jiwa/Km² dan Danau Teluk 973,74 Jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

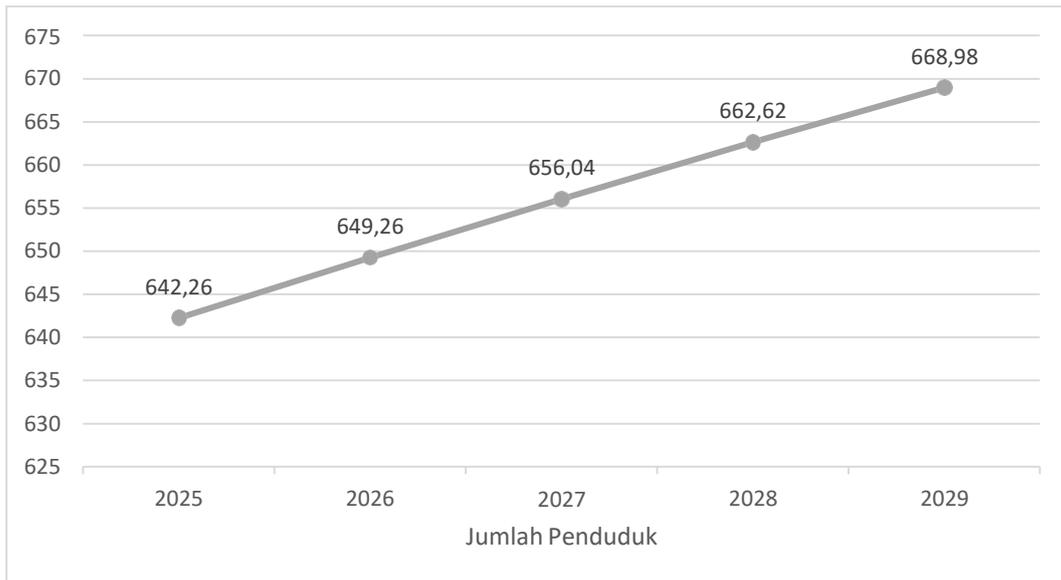
Gambar 2.21
Kepadatan Penduduk Kota Jambi menurut Kecamatan Tahun 2024

2.1.7.5 Proyeksi Demografi

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor utama dalam perencanaan, karena suatu perencanaan yang disusun untuk keperluan pada masa datang didasari oleh pengetahuan tentang masalah yang sama pada masa sebelumnya. Angka pertambahan penduduk tidak lepas dari data-data penduduk sebelumnya. Populasi berubah dengan angka-angka kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan Proyeksi jumlah penduduk Kota Jambi dari tahun 2025-2029 sebagai berikut.



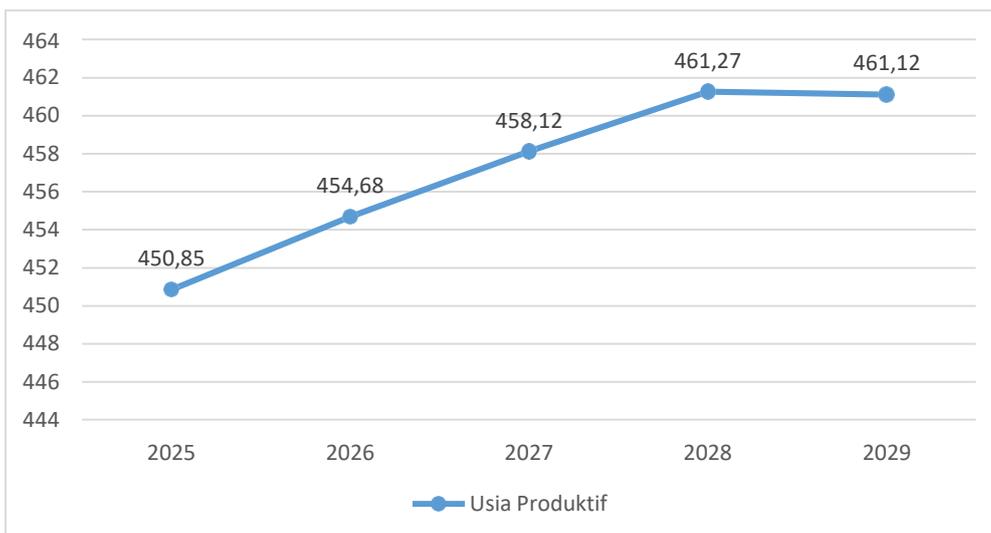
Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.22
Proyeksi Penduduk Kota Jambi Tahun 2025-2029

B. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif

Usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan barang dan jasa. Menurut BPS usia produktif memiliki rentang usia 15-64 tahun. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

Proyeksi Usia Produktif Kota Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

Gambar 2.23
 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kota Jambi
 Tahun 2025-2029

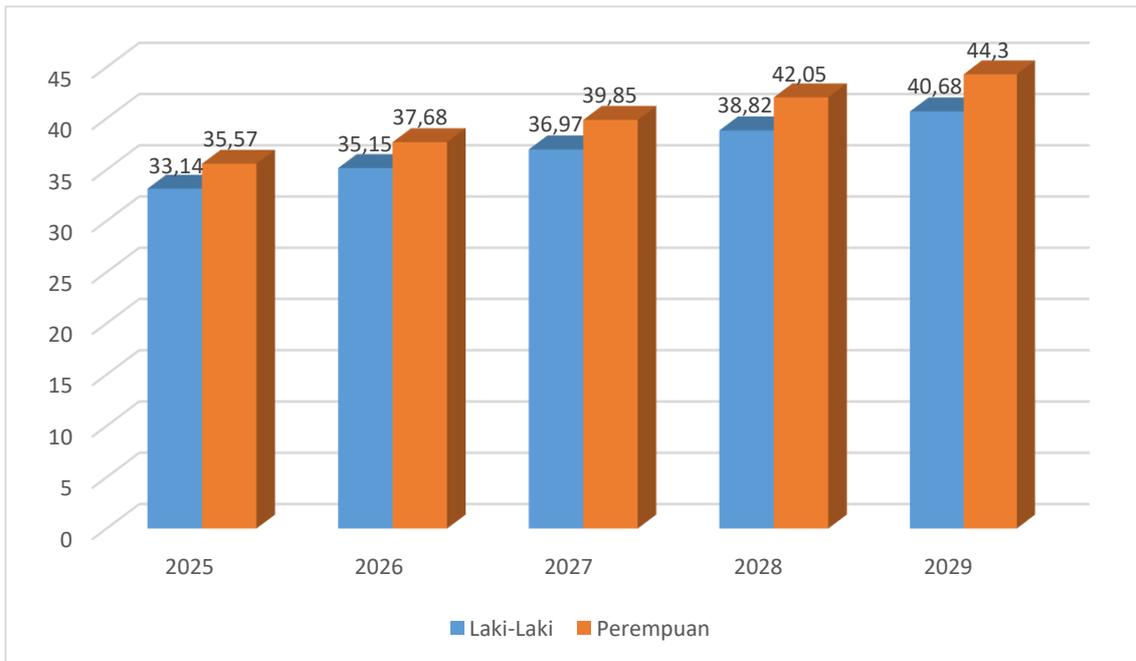
Adapun proyeksi penduduk umur 15–64 tahun dari tahun 2025-2029 terus meningkat dari 450,85 jiwa di tahun 2025 menjadi 461,12 jiwa di tahun 2025. Peningkatan proporsi penduduk umur 15-64 tahun tidak terlepas dari meningkatnya umur harapan hidup sebagai dampak dari perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

C. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Penduduk Lanjut Usia adalah mereka yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Seiring meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk, akan berpengaruh pada peningkatan umur harapan hidup di Indonesia. Hal ini mengakibatkan penduduk lansia semakin meningkat, baik jumlah maupun proporsinya. Penduduk Lansia pada umumnya selalu identik dengan kondisi fisik yang menurun dan tidak produktif secara ekonomi.

BPS mencatat persentase penduduk lansia di Kota Jambi tahun 2023 sebesar 10,82 persen. Meningkatnya jumlah penduduk lansia menunjukkan peningkatan kualitas hidup. Semakin sehat penduduk lansia sebanding dengan

menurunnya jumlah kematian dan semakin panjangnya harapan untuk hidup. Berikut disampaikan data proyeksi Penduduk Usia Lanjut dari Tahun 2025-2029



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.21
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Jambi
Tahun 2025-2029

Dari gambar diatas, proyeksi penduduk Kota Jambi menunjukkan peningkatan dalam periode 2025–2029. Dimana jumlahnya lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Dari jumlah proyeksi menunjukkan bahwa Kota Jambi sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Kota Jambi sudah melebihi 10 persen dari total penduduk (14,48 persen).

D. Proyeksi Ratio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang

harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Proyeksi Ratio Ketergantungan Kota Jambi Tahun 2025-2029 mengalami peningkatan dikarenakan usia muda dan usia tua yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Proyeksi Ratio ketergantungan kota Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Proyeksi Ratio Ketergantungan Kota Jambi
Tahun 2025-2029

No	Tahun	Usia Muda	Usia Tua	Usia Produktif	Ratio Ketergantungan
1	2025	149,59	41,84	450,85	42,46
2	2026	149,93	44,67	454,68	42,80
3	2027	150,34	47,59	454,12	43,59
4	2028	150,78	50,58	461,27	43,65
5	2029	151,22	53,65	461,12	44,43

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

Sesuai Proyeksi Rasio ketergantungan ini terus meningkat dari tahun 2025 hingga 2029 dimana tahun 2025 sebesar 42,46 meningkat menjadi 44,43 di tahun 2029. Hal tersebut menunjukkan terdapat 48 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator makro yang diukur dengan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK). Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan pembangunan dan kinerja perekonomian di suatu wilayah.

Tabel 2.12
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (Persen)
Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,66	-12,12	1,23	1,45	2,20
B	Pertambangan dan Penggalian	3,75	2,54	-0,15	-9,07	-2,51
C	Industri Pengolahan	-1,14	1,76	3,55	0,50	3,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,10	6,48	10,40	12,10	6,33
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,10	4,95	4,25	2,19	2,76
F	Konstruksi	-1,12	5,04	-0,93	6,23	4,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,73	6,89	5,45	11,17	2,84
H	Transportasi dan Pergudangan	-23,12	1,51	16,91	10,28	6,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,59	3,15	23,34	10,50	11,25
J	Informasi dan Komunikasi	8,98	3,99	9,04	7,25	4,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,84	4,70	-0,83	0,42	1,34
L	Real Estate	-0,32	3,19	4,38	3,03	3,28
M	Jasa Perusahaan	-5,58	1,48	19,12	16,77	12,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,80	1,23	-0,58	2,33	10,00
P	Jasa Pendidikan	3,30	0,16	2,93	2,30	7,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,91	18,16	-2,24	4,13	13,13
R,S	Jasa Lainnya	-3,48	0,85	9,86	7,93	8,34
PDRB		4,73	-4,24	4,13	5,38	4,98

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

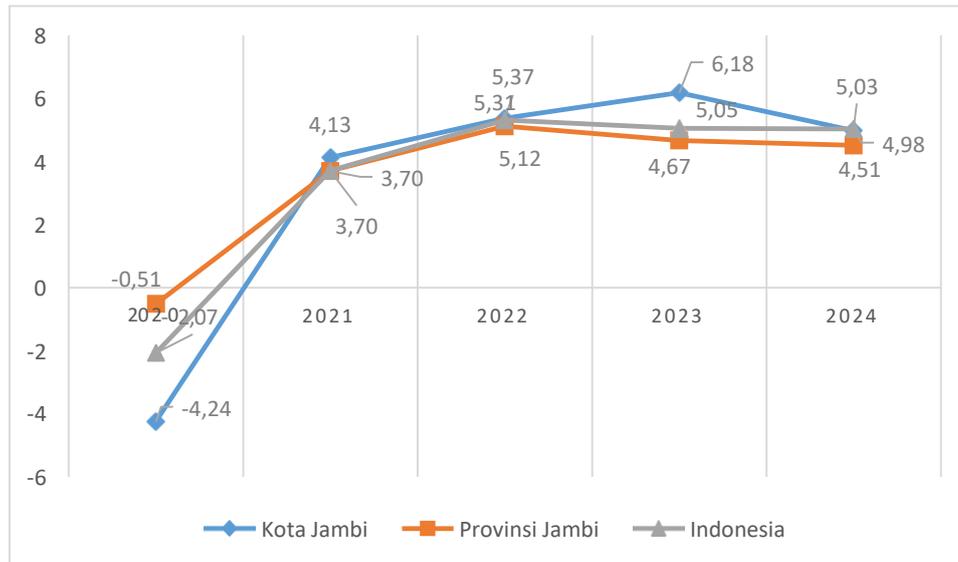
*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perekonomian Kota Jambi tahun 2024 didukung oleh sektor jasa kesehatan dan sosial sebesar 13,13%, jasa perusahaan sebesar 12,35% dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,25%.

Selama rentang waktu 2020-2024 Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi mengalami peningkatan. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,18% namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 4,98% hal ini dikarenakan menurunnya Pembentukan Modal daerah.

Dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan nasional, Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi tahun 2024 berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, yaitu 4,51% namun di bawah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,03%, yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.25
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2020-2024

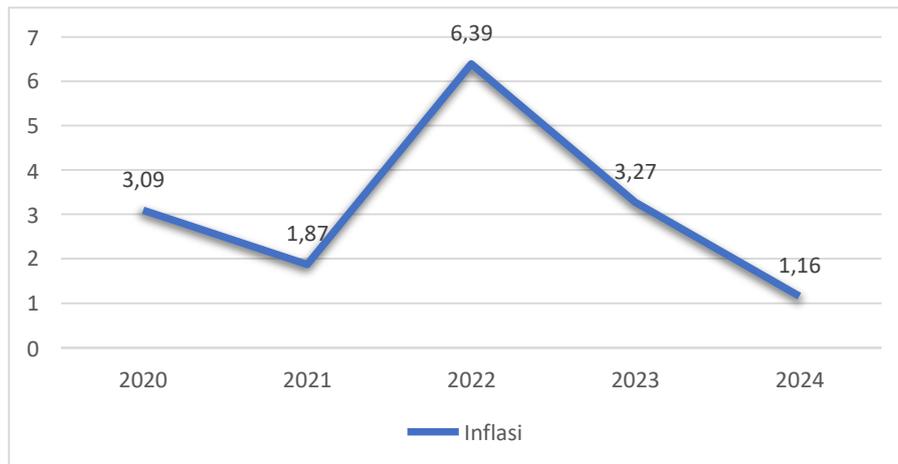
2.2.1.2 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Inflasi juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Dengan adanya inflasi berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat menurun.

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% yang disebabkan oleh faktor peningkatan harga bahan makanan dan laju inflasi terendah pada tahun 2024 sebesar 1,16%. Laju inflasi pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,27%. Penurunan inflasi tersebut harus dimaknai dengan lebih hati-hati, karena secara teoritis inflasi yang terlalu rendah dalam

jangka panjang karena mengakibatkan harga barang-barang cenderung stagnan dan daya beli masyarakat melemah.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

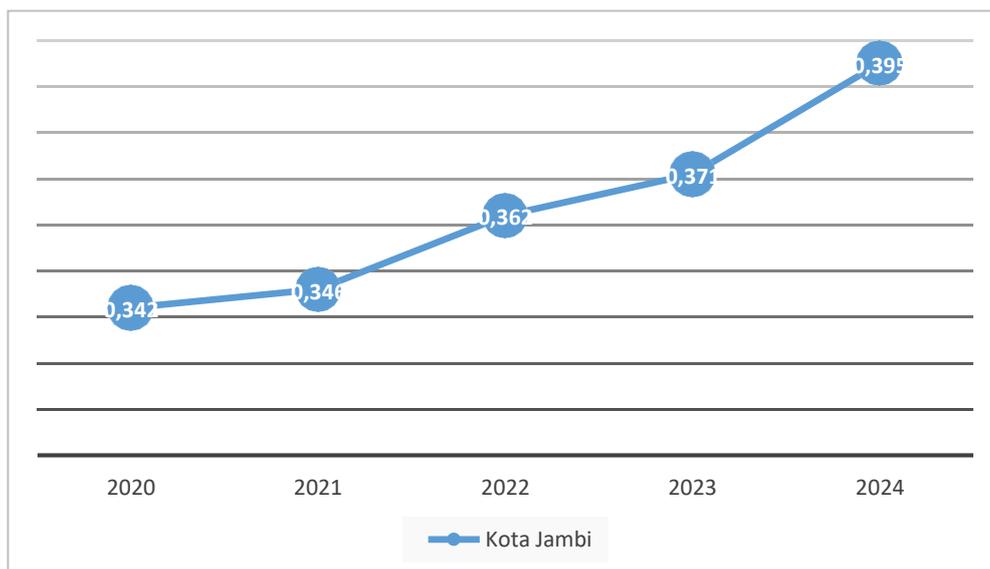
Gambar 2.26
Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2020-2024

Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2024 sebesar 1,16% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,35 merupakan yang terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Inflasi tersebut terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,50%; kelompok penyedia makanan, minuman/restoran sebesar 1,78%; kelompok pendidikan sebesar 1,48%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,03%; kelompok perumahan, air, Listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,94%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90%; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%. Sedangkan untuk tiga kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,87%; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,05%; dan kelompok kesehatan sebesar 2,37%.

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka tingkat ketimpangan di wilayah tersebut semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pada Indeks Gini dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Koefisien Gini di Kota Jambi terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2020 sebesar 0,342 menjadi 0,395 pada tahun 2024. Keadaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat Jambi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut yang mengindikasikan pula ketimpangan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi menyebabkan bertambahnya ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Jambi perlu melakukan upaya-upaya yang konsisten dan berkesinambungan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan.



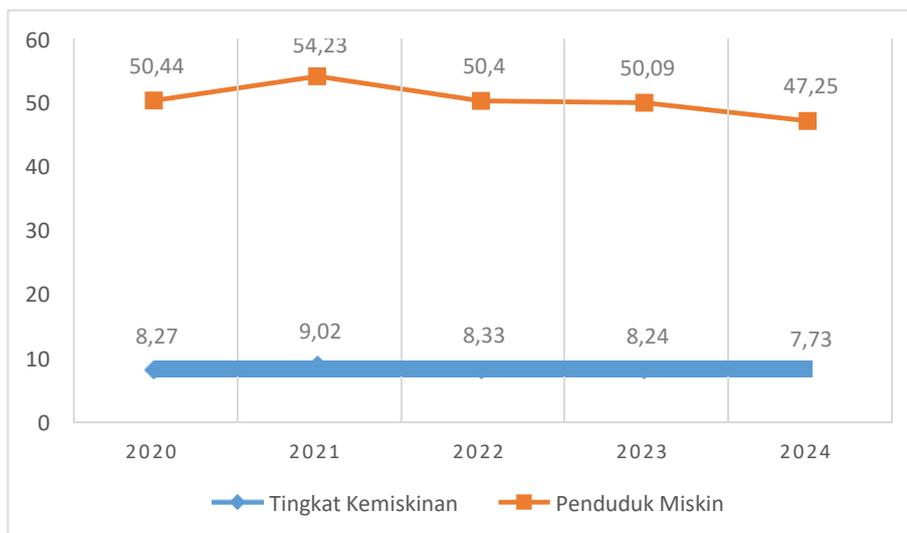
Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.27
Gini Ratio Kota Jambi Tahun 2020-2024

2.2.1.4 Kemiskinan

A. Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran perkapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Penduduk miskin dan tingkat kemiskinan bisa dilihat pada gambar berikut

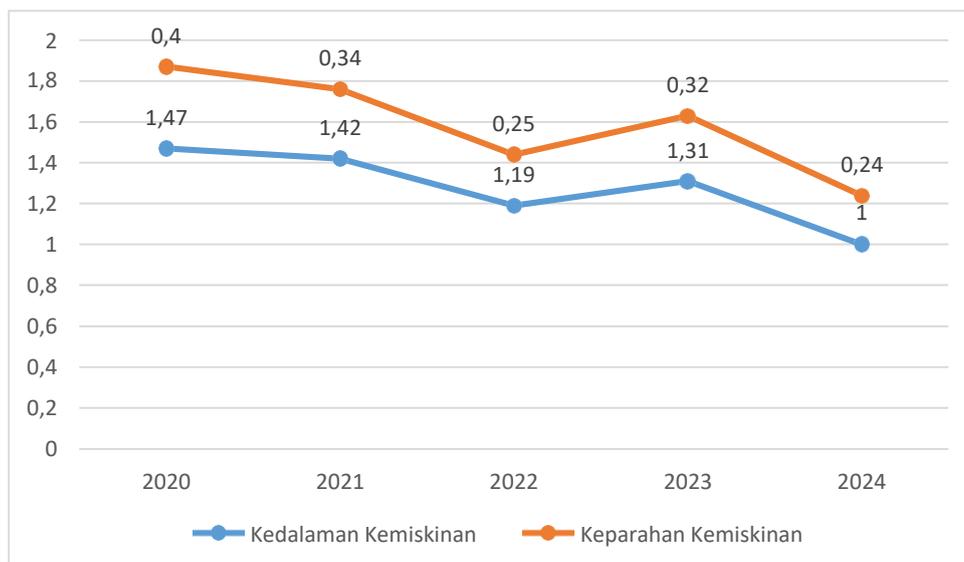


Gambar 2.25
Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kota Jambi
Tahun 2020-2024

Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi pada tahun 2024 berada pada angka yang masih tinggi yaitu 7,73% walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 8,24%. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2021 tingkat kemiskinan berada pada 9,07%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya.

B. Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



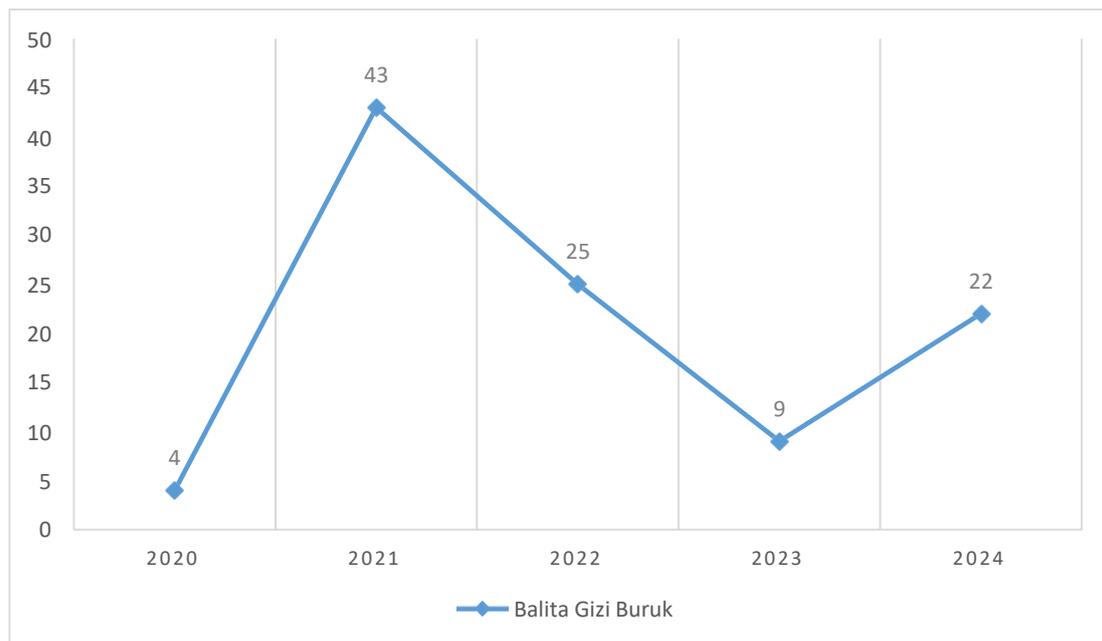
Gambar 2.29
Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Kota Jambi
Tahun 2020 - 2024

Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Kota Jambi pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,31 menjadi 1,00. Indeks Kearifan Kemiskinan dari 0,32 pada tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 0,24 pada tahun 2024.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

A. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi balita dapat diukur berdasarkan indeks berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Gizi kurang dan gizi buruk didasarkan pada indeks berat badan menurut umur. Gizi buruk didefinisikan sebagai keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari dan atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 0 - 59 bulan. Berikut merupakan grafik prevalensi balita gizi buruk di Kota Jambi



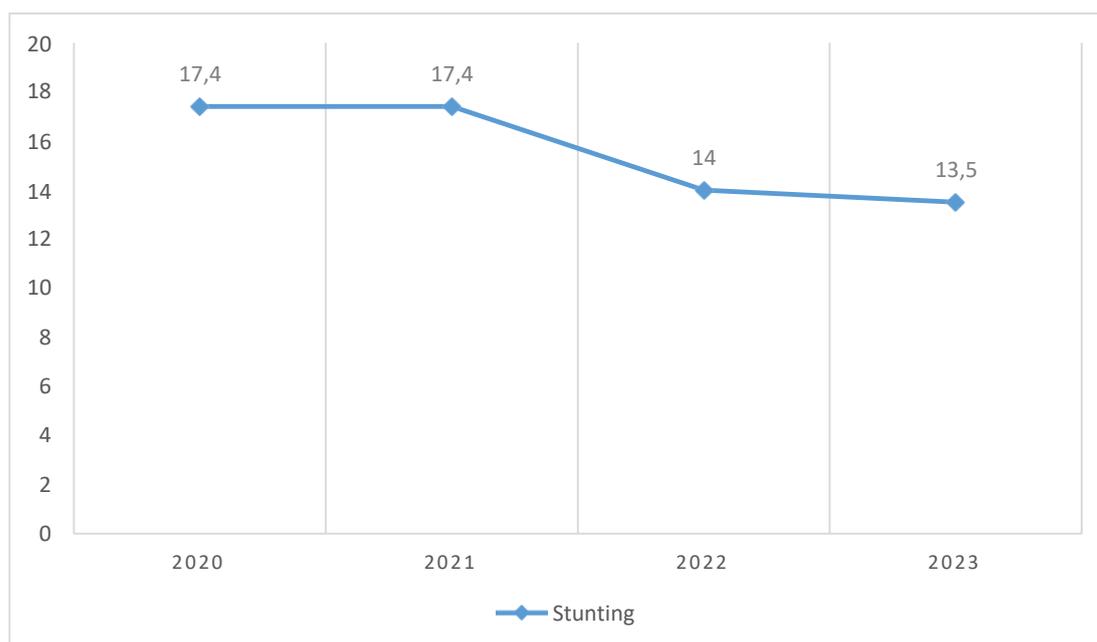
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Gambar 2.30
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Untuk balita gizi buruk pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi mengalami fluktuasi. Dimana Jumlah balita gizi buruk menurun dari tahun 2021 sebanyak 43 balita menjadi 9 balita di tahun 2023, namun meningkat kembali di tahun 2024 menjadi sebanyak 22 balita. Hal ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan gizi yang belum sesuai dan tidak memadai serta disebabkan oleh pendapatan keluarga yang rendah.

B. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur. Penyebab stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kondisi Stunting di Kota Jambi selama tahun 2020-2024 bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2024

Gambar 2.31
Prelevansi Stunting di Kota Jambi Tahun 2020-2023

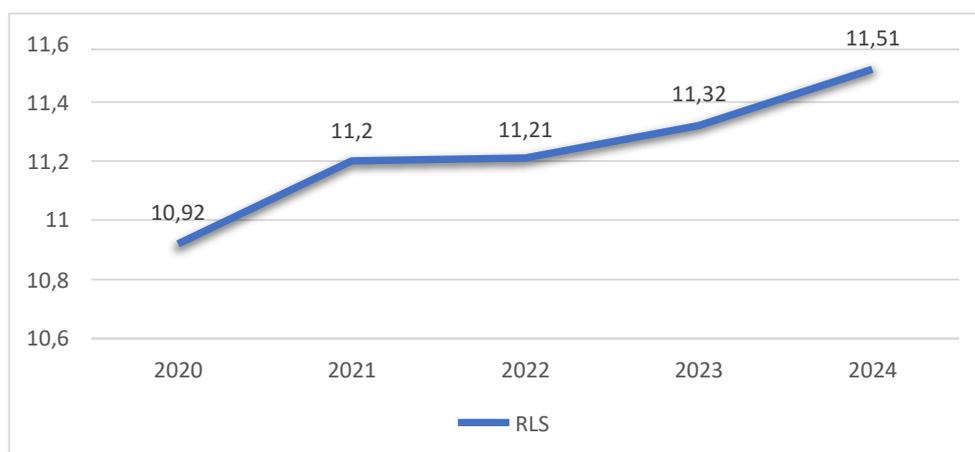
Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi stunting untuk ditekan menuju angka 14% pada tahun 2024 dengan laju penurunan 3,8% per tahunnya. Angka Stunting di Kota Jambi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2024, rilis Prevalensi Stunting dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum keluar. Berdasarkan grafis diatas, kasus Stunting pada tahun 2020 sebanyak 17,4 menurun menjadi 13,5 kasus pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kasus stunting dengan melakukan berbagai upaya seperti pemberian makanan tambahan dan edukasi tentang pencegahan stunting.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka ini turut berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal pengetahuan. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Analisis ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Perkembangan RLS di Kota Jambi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

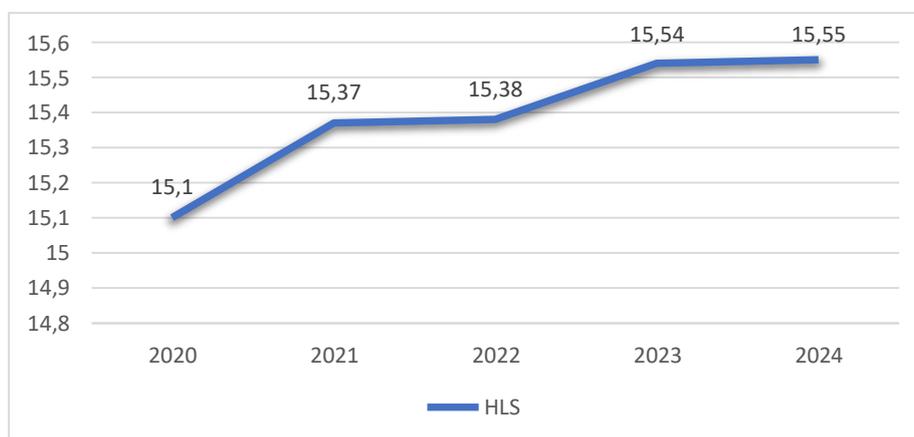
Gambar 2.32
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Jambi
Tahun 2020-2024

Peningkatan angka RLS dari 10,92 pada tahun 2020 menjadi 11,51 pada Tahun 2024. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten ini telah mampu menyelesaikan pendidikan, minimal hingga kelas dua pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi selama kurun lima tahun terakhir di bidang pendidikan.

2.2.3.2 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Jambi dari 15,1 poin pada tahun 2020 menjadi 15,55 poin pada Tahun 2024 Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,55 tahun atau setara dengan Diploma IV. Gambaran perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Jambi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



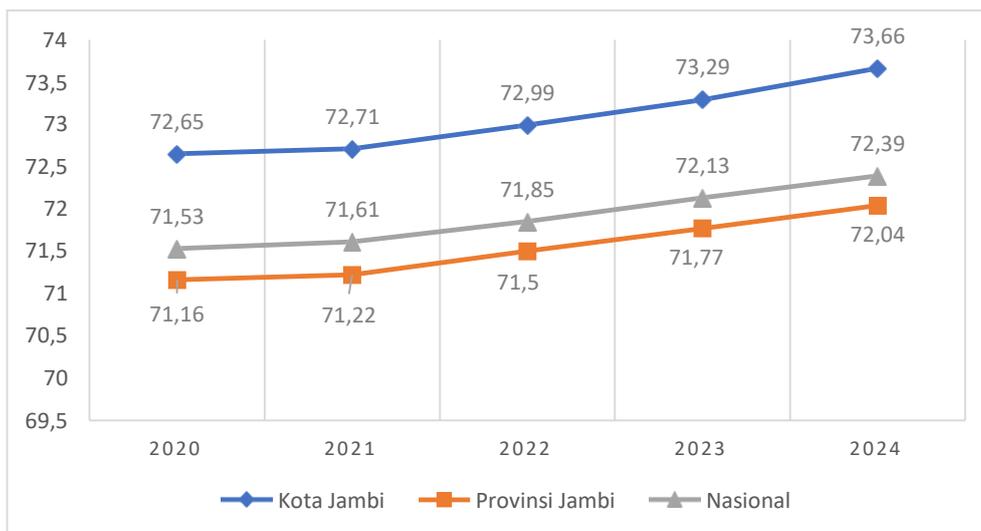
Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 2.33
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
di Kota Jambi Tahun 2020-2024

2.2.3.3 Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya Umur Harapan Hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya

hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Sejak tahun 2020, UHH Kota Jambi terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan. Umur Harapan Hidup di Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.34
Umur Harapan Hidup Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2020-2024

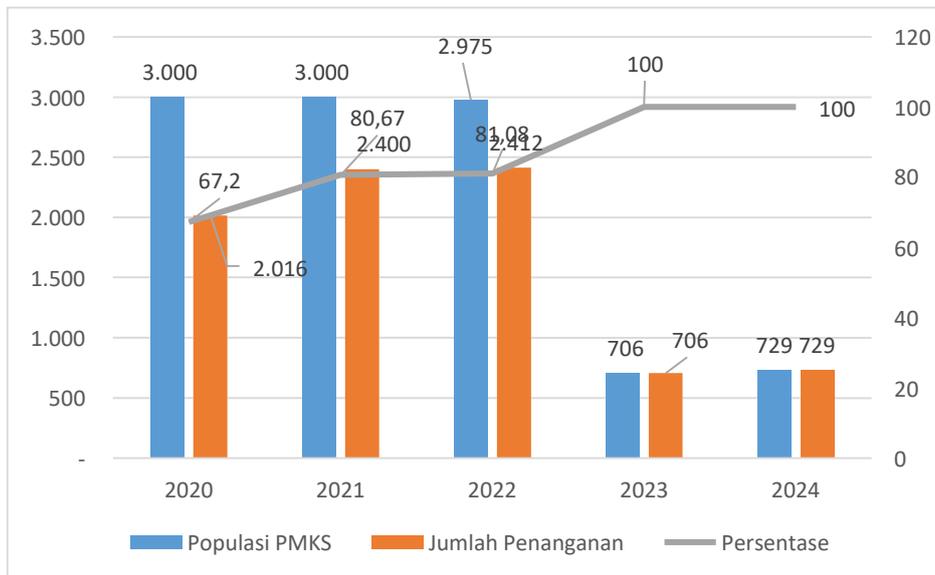
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.

Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 706 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS. Selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial juga

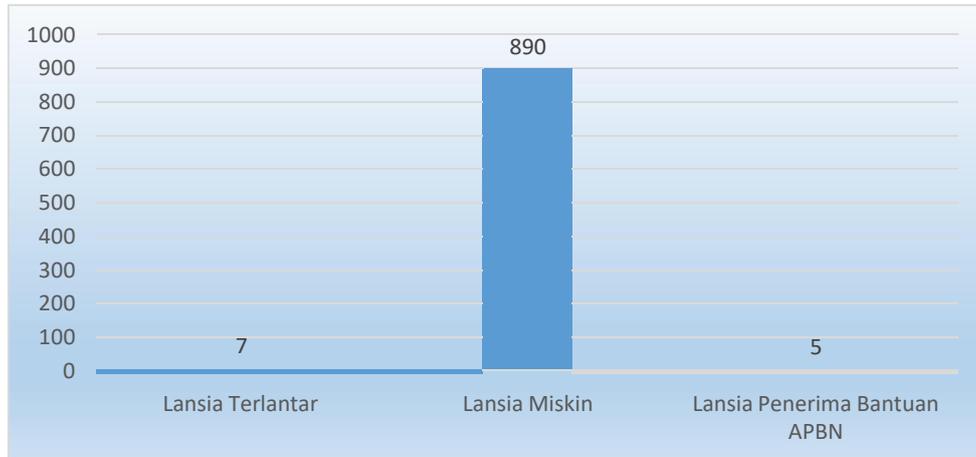
memberikan Sosialisasi Dan Pelatihan. Pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Pelatihan Kuliner, dll sesuai dengan keterampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS dari tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung menurun dimana tahun 2020 sebanyak 3.000 orang menurun menjadi 729 orang pada tahun 2024, sementara jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2024 sebanyak 729 orang atau sekitar 100%. Berikut data penanganan PMKS di Kota Jambi.



Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2024

Gambar 2.35
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Terkait penduduk lanjut usia yang terus meningkat akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (LANSIA) pada tahun 2024 sebanyak 890 orang lansia miskin dan 7 orang lansia terlantar. Pada tahun 2024 Dinas Sosial Memberikan bantuan kepada 5 orang lansia dari bantuan APBN, yang bisa dilihat pada grafik berikut ini.

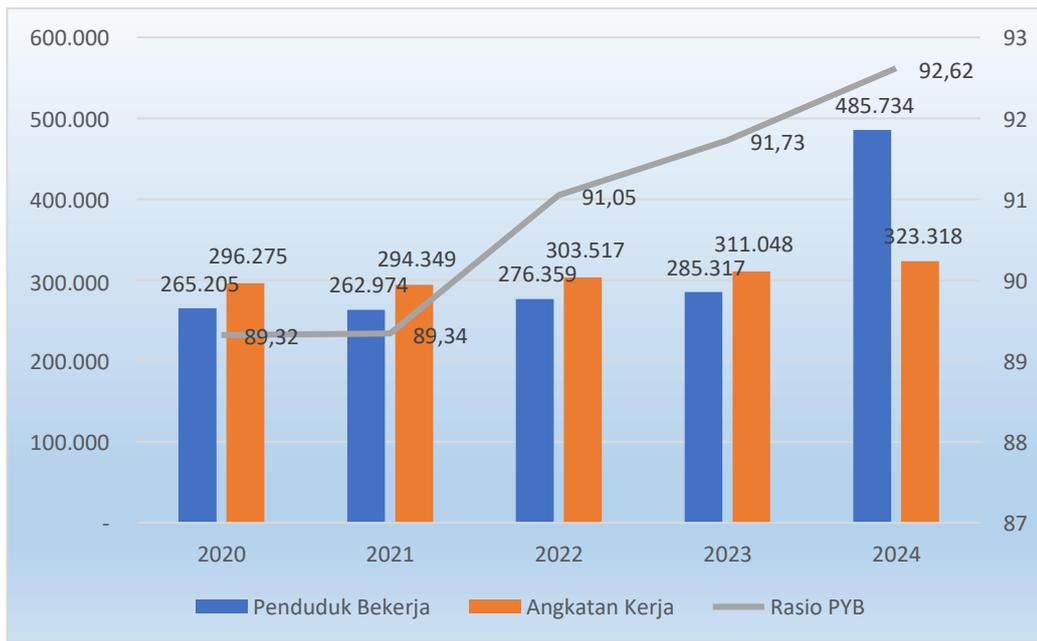


Gambar 2.36
Jumlah Lansia di Kota Jambi Tahun 2024

Dari data tersebut berarti seluruh lansia miskin telah mendapat bantuan APBN. Penduduk lansia terlantar yang dimaksud sebagian besar mereka masih memiliki anak tetapi dari keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar. Keberadaan sarana sosial khususnya Panti Jompo memiliki peran dalam memelihara dan melindungi para lansia terlantar. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya perlindungan terhadap para lansia terlantar di Kota Jambi, dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo

2.2.4.2 Ketenagakerjaan

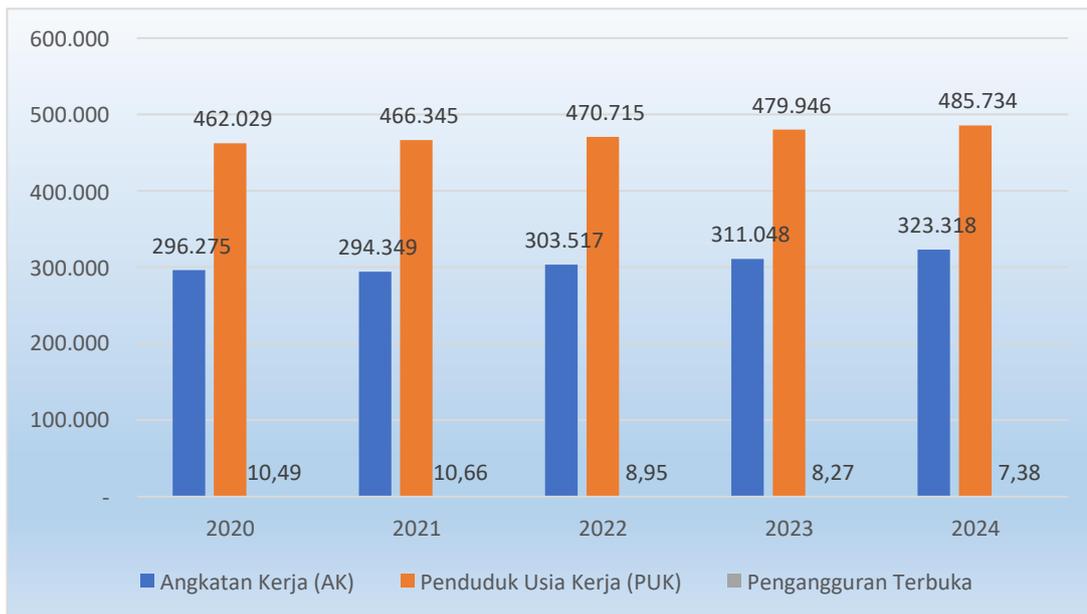
Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

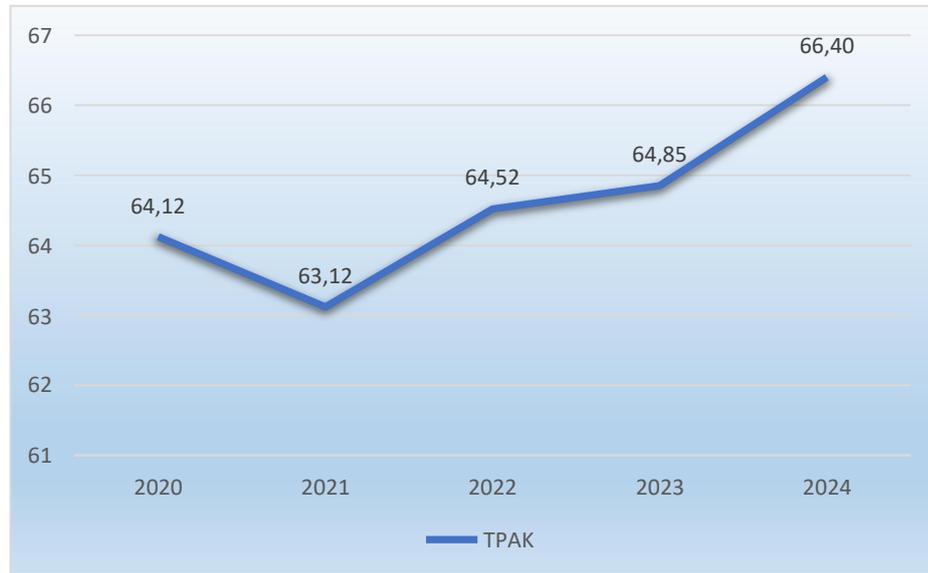
Gambar 2.37
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Kondisi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kota Jambi dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 2.38
Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

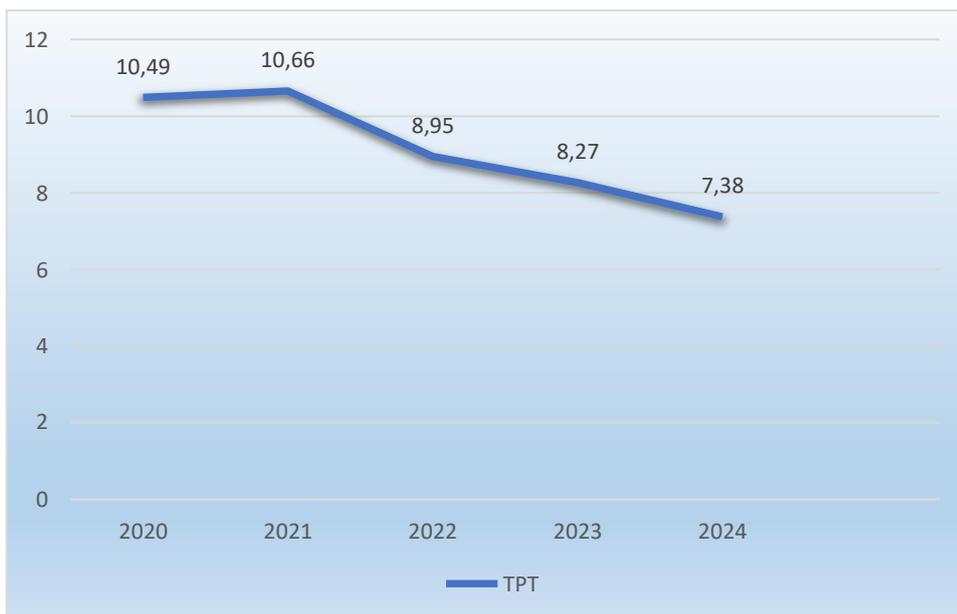
Gambar 2.39

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Dari data tersebut semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2024

TPAK di Kota Jambi sebesar 66,40% meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 64,85%, berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi atau melakukan pekerjaan pada tahun 2024.

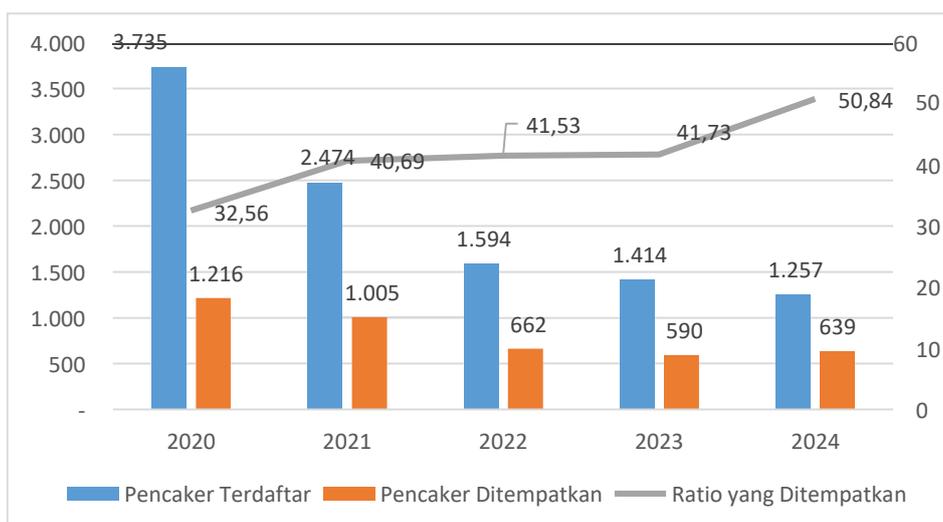
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2024 sekitar 7,38 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7 orang merupakan pengangguran. TPT pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan telah daya serap lapangan kerja yang membaik.



Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2025, BPS.

Gambar 2.40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2020-2024

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.41
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

Dari data tersebut tahun 2024 di Kota Jambi ratio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 50,84% mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya. Berarti banyak pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan hal ini dikarenakan telah membaiknya perekonomian kota Jambi.

2.2.4.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dan swasta, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2019-2023 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan justru mengalami penurunan, hal ini dikarenakan setiap tahun adanya Pegawai Negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara penerimaan pegawai perempuan tidak ada.

Disamping itu, selain di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu lima tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.13
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta di Kota Jambi Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pekerja perempuan	99.565	100.767	97.667	110.837	110.818
2	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.020	3.893	3.643	3.415	5.084
3	Persentase	4,03	3,86	3,73	3,08	5.237
4	Jumlah pekerja perempuan di sektor swasta (orang)	49.521	8.045	7.183	58.128	64.692
5	Persentase	49,74	8,34	7,35	52,44	58.37

Sumber: BPS Provinsi Jambi, BPS Kota Jambi, BKPSDMD Kota Jambi, 2024

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2020-2024, dari segi jumlah dan persentase rata-rata perempuan yang bekerja di sektor swasta mengalami peningkatan dikarenakan telah membaiknya perekonomian.

Tabel 2.14
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	112.475	111.801	108.671	123.513	125.468
2	Jumlah Pekerja perempuan	99.556	100.767	97.667	110.837	110.818
3	Persentase	88,51%	90,13%	89,87%	89,73%	88,32%

Sumber: BPS Kota Jambi 2024

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik dari korban maupun dari warga sekitar tempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun pelaporan kasus kekerasan domestik dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung menurun. Tahun 2020, jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 130 kasus, meningkat pada tahun 2020 mencapai 130 kasus, namun terjadi penurunan hingga tahun 2021 menjadi 123 kasus. Tahun 2022, pengaduan kasus kekerasan domestik turun lagi menjadi 111 pengaduan. Penurunan juga terjadi pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing 96 pengaduan dan 82 pengaduan. Seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diselesaikan semua sebanyak 100%. Grafik jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2025

Gambar 2.42
Pengaduan Perlindungan Perempuan
dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2020-2024

2.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

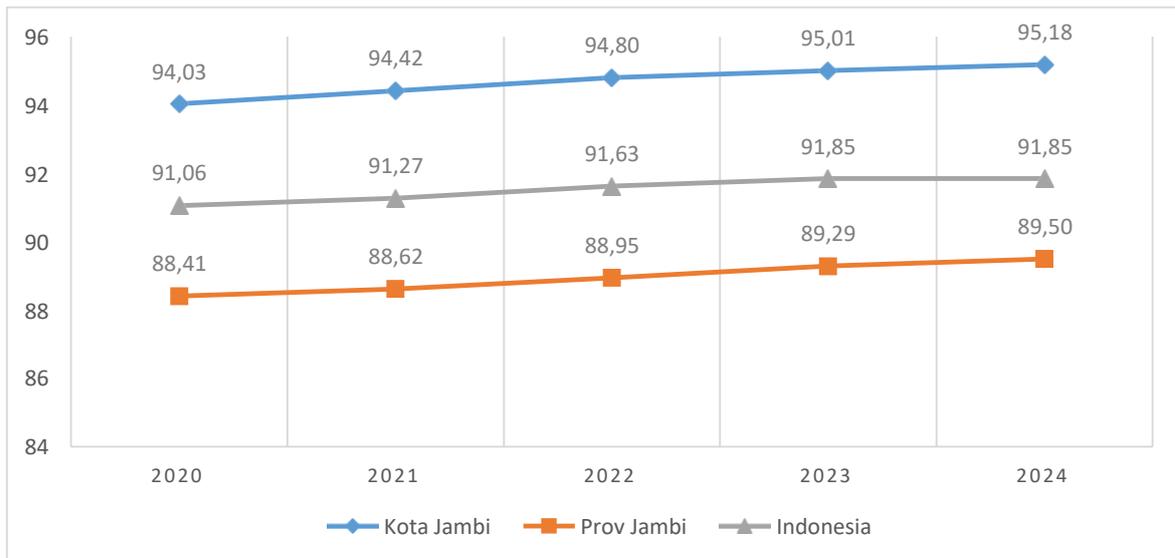
2.2.5.1 Indeks Gender

Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembedayaan Gender (IDG). Selain itu digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah ($IPG < 90,00$) dan tinggi ($IPG > 90,00$). IPG Kota Jambi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan

yang positif. Sejak tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender Kota Jambi mengalami peningkatan sebagaimana grafis data yang bisa dilihat pada gambar berikut.



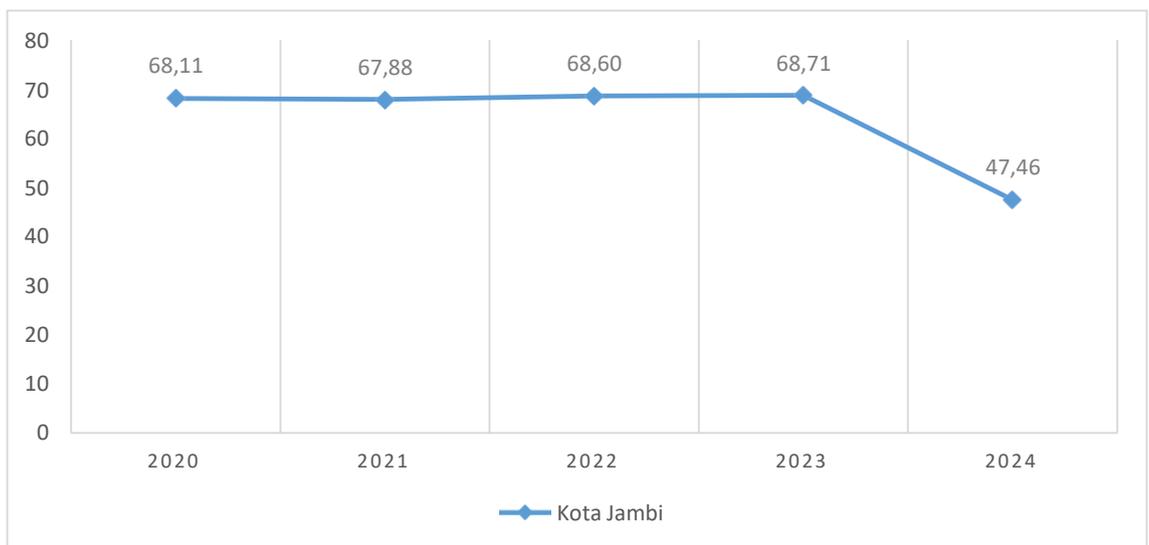
Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.43
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Jambi

Pada tahun 2020 nilai IPG Kota Jambi mencapai 94.03 dan terus meningkat menjadi 94,42 pada tahun 2021. Perkembangan Capaian IPG di Kota Jambi selama kurun waktu 2022-2024 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2022 angkanya mencapai 94,80 dan kemudian terus meningkat tiap pada tahun berikutnya menjadi 95,01. Tahun 2024 IPG Kota Jambi menjadi 95,18. Capaian tersebut menunjukkan terjaganya keseimbangan trend positif indikator yang menjadi komponen pembentuk IPG, seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengeluaran Perkapita antara laki-laki dan dan Perempuan. Hal ini menandakan bahwa telah terdapat kesetaraan dan keadilan gender dalam hasil pembangunan manusia perempuan di Kota Jambi. Capaian IPG Kota Jambi secara konsisten berada dalam kategori tinggi (IPG > 90,00) dalam periode 2020-2024.

B. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG dihitung dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2025

Gambar 2.44
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jambi

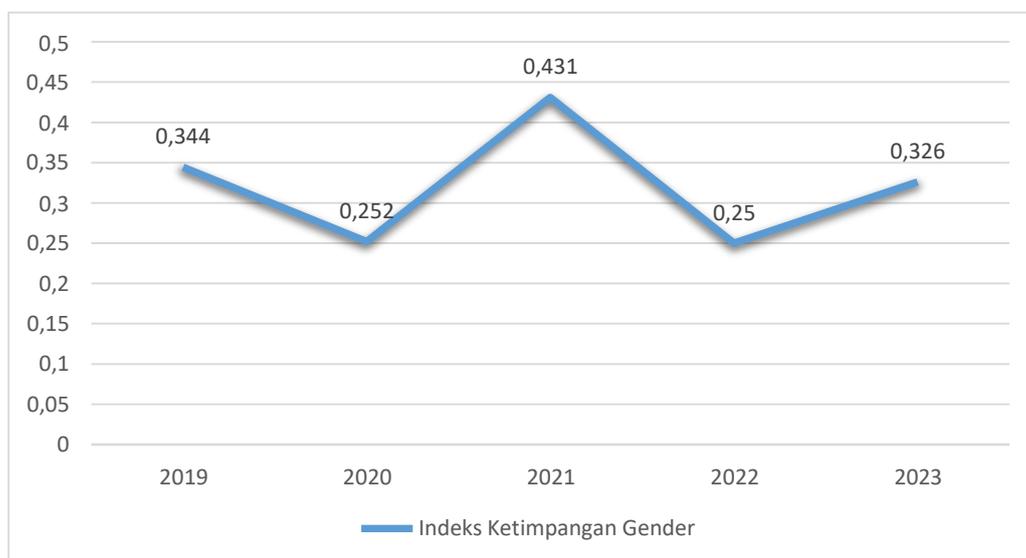
Capaian IDG Kota Jambi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2022-2023. Setelah sebelumnya pada tahun 2021 nilai IDG hanya mencapai 67,88 atau menurun dari capaian tahun 2020 sebesar 68,11. Tahun 2024, capaian IDG Kota Jambi turun drastis menjadi 47,46. Sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023, capaian IDG Kota Jambi adalah 68,60 dan 68,71. Komponen terbesar penyebab turunnya IDG Kota Jambi pada tahun 2024 adalah keterlibatan Perempuan sebagai tenaga profesional yang hanya mencapai 15,56 dari sebelumnya 46,95 pada tahun 2023. Adapun komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender lainnya seperti partisipasi perempuan di parlemen pada tahun 2024 sebesar 17,78 atau sama dengan capaian tahun 2023. Untuk komponen Sumbangan Pendapatan

Perempuan, pada tahun 2024 justru mengalami peningkatan signifikan yaitu mencapai 46,95 dibandingkan capaian pada tahun 2023 sebesar 29,26. Berdasarkan kondisi IDG tahun 2024, maka perlu untuk mengambil kebijakan, langkah strategis dan program yang mendorong keterlibatan perempuan di parlemen dan pekerjaan profesional lainnya.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Menurut kategori ada 4 kategori Indeks Ketimpangan Gender yaitu kategori rendah (IKG kurang dari 0,405), menengah bawah (IKG pada rentang 0,405-0,450), menengah atas (IKG pada rentang 0,450-0,495), dan tinggi (IKG lebih dari 0,495), IKG Kota Jambi selama tahun 2019-2023 berfluktuasi dan cenderung termasuk kategori IKG rendah yang berarti tidak ada ketimpangan gender di Kota Jambi. IKG Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.

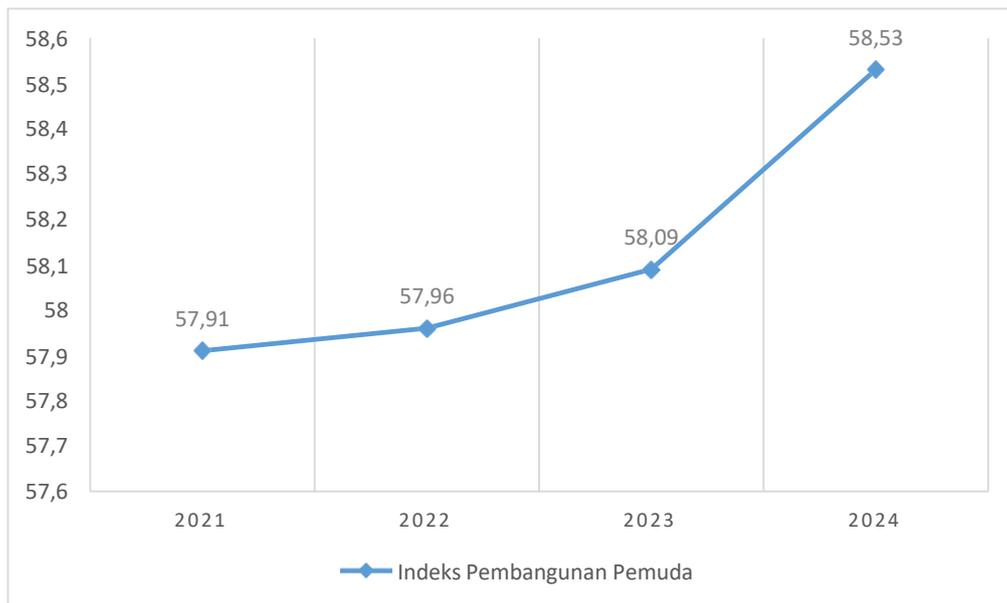


Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 2.45
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Jambi

2.2.5.2 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga kerangka yakni pertama kerangka pembangunan individu, kerangka pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan kerangka partisipasi dan diskriminasi. Kerangka tersebut mencakup aspek peran pemuda sebagai target (objek) dan pelaku (subjek) pembangunan. Dari kerangka tersebut, aspek pembangunan pemuda dikelompokkan ke dalam 5 (lima) domain dengan total 15 (lima belas) indikator penyusun indeks. Indeks Pembangunan Pemuda kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.46
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Jambi
Tahun 2021-2024

Kondisi Kota Jambi pada tahun 2021-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 57,91 menjadi 58,53 pada tahun 2024.

2.2.5.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.15
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Group Kesenian	185	185	185	185	185
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2023.

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah cabang olahraga. Tahun 2018 jumlah cabang olahraga sebanyak 30 menjadi 39 pada tahun 2022, Namun 39 cabang olahraga ini hanya memiliki gedung olahraga sebanyak 2 unit, artinya masih kekurangan gedung olahraga.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

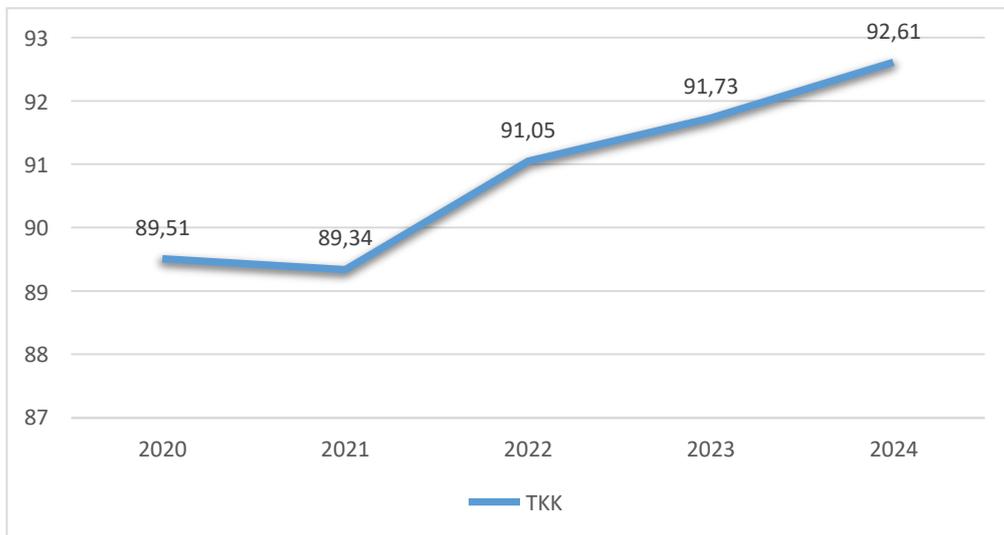
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari rasio penduduk yang bekerja. kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi sehingga memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

A. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja dimaknai sebagai penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang

bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.



Gambar 2.47
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Jambi Tahun 2020-2024

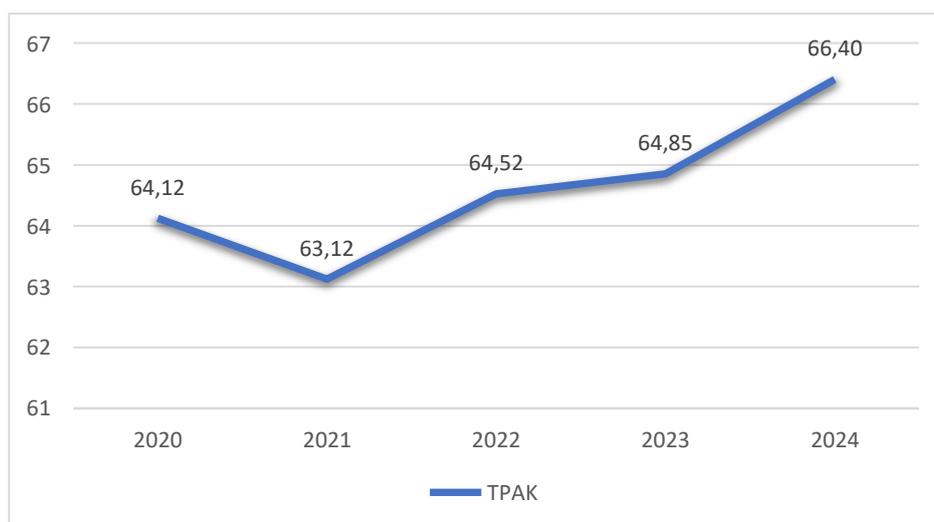
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Jambi selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dimana Tingkat Kesempatan Kerja terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 92,61%. Sejak tahun 2020, Tingkat Kesempatan Kerja yang tadinya mencapai 89,51%, sempat mengalami penurunan menjadi 89,34%. Kondisi tersebut merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas sektor perekonomian cukup terdampak karena adanya pembatasan kegiatan di luar ruangan maupun aktivitas sosial lainnya sebagai upaya mitigasi pandemi. Sejak tahun 2022, Tingkat Kesempatan Kerja terus mengalami peningkatan yang konsisten di kisaran 0,68 dan 0,88 pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan melakukan berbagai kebijakan yang mempermudah pelaku usaha dan pencari kerja untuk mendapatkan akses sesuai kebutuhan mereka.

Selain itu, paya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah.

Perkembangan TPAK Kota Jambi selama tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.48

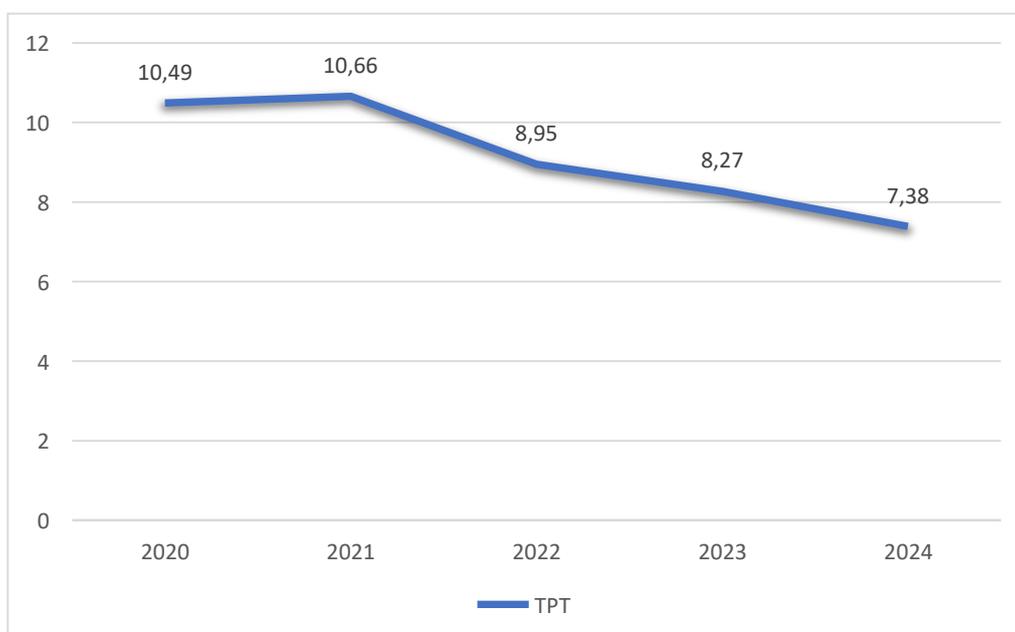
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Jambi Tahun 2020-2024

TPAK Kota Jambi mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran di atas 60%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 60 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. Meningkatnya angka TPAK ini terjadi karena berkurangnya penduduk usia kerja yang masuk pada kelompok bukan angkatan kerja, terutama semakin berkurangnya penduduk usia kerja yang bersekolah/mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Selain itu, mobilitas sosial seperti semakin banyaknya perempuan yang bekerja, pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan hadirnya pusat-pusat aktivitas baru juga berkontribusi dalam peningkatan TPAK Kota Jambi.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Perkembangan TPT Kota Jambi selama tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Grafik 2.49

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,72% terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 10,66% dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Akibatnya banyak perusahaan untuk bisa tetap mempertahankan kelangsungan usahanya melakukan tindakan rasionalisasi biaya operasional, salah satunya dengan mengurangi jumlah tenaga Kerja. Namun seiring membaiknya perekonomian, tenaga kerja mulai banyak diserap sehingga Tingkat

Pengangguran Terbuka mengalami penurunan menjadi 8,27% pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 7,38%.

2.3.2 Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

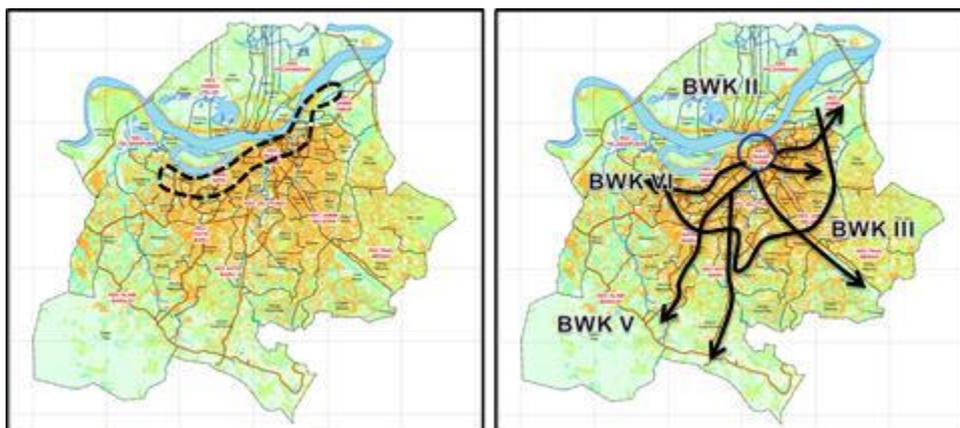
2.3.2.1 Pola Perkembangan Internal

A. Pola Perkembangan Internal

Kota adalah Leburan dari bangunan dan penduduk. Sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu (Spiro Kostof:1991).

Kota Jambi tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spasial. Secara fisik, penjalaran Kota Jambi diawali dengan bentuk linear, dimana pada awalnya perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh Sungai Batanghari. Perkembangan fisik yang linear terhadap Sungai Batanghari terutama pada Kawasan Kota Seberang (BWP II) dan kawasan sempadan sungai pada bagian selatan (sebagian BWP III dan sebagian BWP VI). Perkembangan dengan pola linear terhadap Sungai Batanghari ini cenderung telah jenuh karena keterbatasan daya tampung pada kawasan tersebut. Pola perkembangan kota cenderung memusat kepada pusat utama dan selanjutnya linear terhadap jalur transportasi utama dan semakin menjalar keluar, sehingga cenderung berpola konsentris terhadap pusat utama.

Pola penjalaran yang berorientasi linear terhadap jalur transportasi utama, pada saat ini juga cenderung semakin jenuh, karena semakin menurunnya daya tampung pada kawasan koridor jalur utama tersebut, sehingga penjalaran fisik kota menjadi linear terhadap jalur transportasi yang hirarkinya berada di bawah jalur utama dan telah menyatukan antara kawasan terbangun yang satu dengan kawasan terbangun yang lainnya, sehingga terlihat bahwa perkembangan Kota Jambi cenderung berpola radial menerus.



Gambar 2.50
Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi

B. Pola Perkembangan Wilayah Eksternal

Secara umum, kawasan non terbangun di Kota Jambi yang ada belakangan ini adalah kawasan *hinterland* kota atau kawasan bagian luar. Pada saat ini, dinamika penggunaan lahan pada kawasan ini mengalami perubahan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan perkembangan permukiman kota. Selain karena faktor internal tersebut, perkembangan wilayah terluar juga dipicu oleh terjadinya perkembangan pada wilayah eksternal. Wilayah eksternal Kota Jambi memiliki kecenderungan harga lahan yang lebih murah. Selain daripada itu, adanya rencana investasi pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut akan semakin menarik perkembangan kota kearah luar dan memicu percepatan perubahan guna lahan pada wilayah kota bagian luar.

Secara administrasi, wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi dan atas beberapa faktor pertumbuhan lainnya telah memicu perkembangan fisik wilayah yang berbatasan yang berada di dalam administrasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga semakin mengaburkan batas administrasi wilayah dan membentuk satu kesatuan kawasan permukiman secara fungsi dan memberi pengaruh terhadap kawasan terluar dari administrasi Kota Jambi dan beberapa sistem prasarana dan sarana kota.

1) Perkembangan Kawasan Bagian Barat Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kawasan yang merupakan arah utama pengembangan kota inti. Secara administrasi berada pada wilayah

administrasi Kecamatan Jambi Luar Kota yang secara fungsi, perkembangannya dipengaruhi oleh pusat skala regional berupa pusat pendidikan tinggi Provinsi Jambi sebagai pemicu perkembangan dan didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi-Muara Bungo. Perkembangan kawasan semakin terlihat dengan tumbuhnya pusat permukiman skala besar yang berciri kota mandiri. Sehingga tipologi kawasan lebih dekat dengan ciri *predominantly urban*. Perkembangan kegiatan komersil dan permukiman sudah semakin mirip dengan kota inti, sehingga secara fungsi tidak ada pembeda antara kawasan ini dengan kota inti.



Gambar 2.51

Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat, 2023

2) **Perkembangan Kawasan Bagian Selatan Kota**

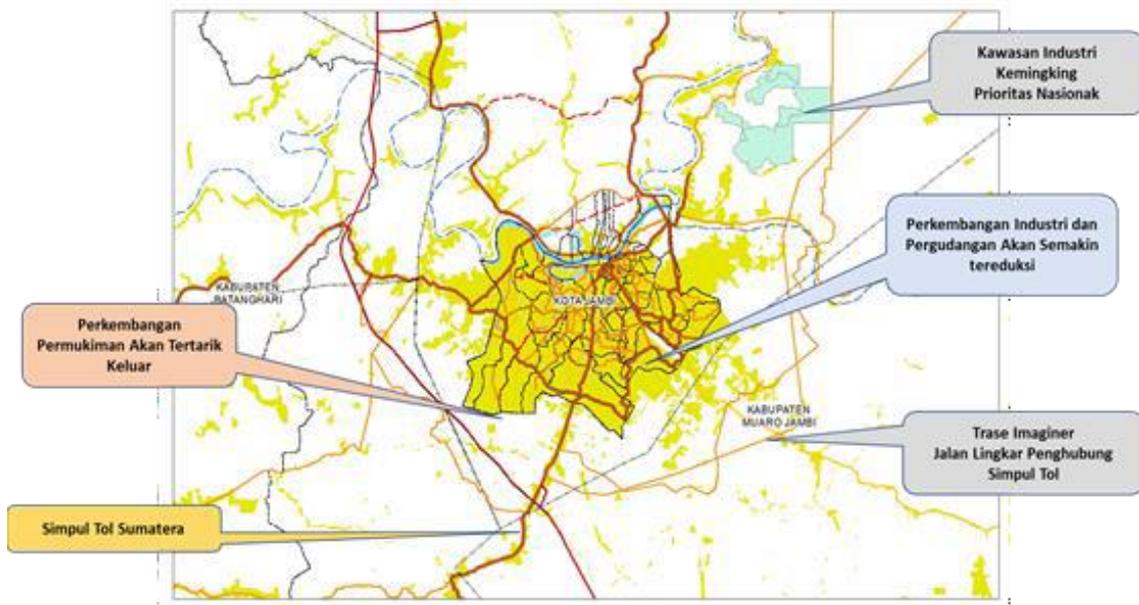
Kawasan peri urban pada bagian ini merupakan kawasan yang berkembang dengan orientasi keberadaan jalan arteri primer ruas Jambi-Palembang. Perkembangan kawasan cenderung linear dengan gejala perubahan guna pada koridor jalan utama menjadi lahan komersil. Namun secara umum, pada kawasan belakangnya masih menunjukkan ciri kedesaan.



Gambar 2.52

Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023

Zona ini diprediksi akan mengalami akselerasi perkembangan yang cukup pada masa yang akan datang sebagai dampak realisasi sistem prasarana nasional (simpul TOL Sumatera) dan rencana konektivitas pusat-pusat pertumbuhan Provinsi Jambi melalui Jambi *Outer Ring Road* II yang menghubungkan simpul TOL dengan kawasan industri di Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan jaringan prasarana ini nantinya dapat memberi pengaruh terhadap pola ruang Kota Jambi, yang menyebabkan kegiatan permukiman akan semakin cepat tertarik ke arah luar, serta kemungkinan tereduksinya kegiatan industri dan pergudangan pada jalan lingkar selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



Gambar 2.53
Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Ekternal Kota Bagian Selatan

3) Perkembangan Kawasan Bagian Timur Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa kota inti. Secara administrasi, kawasan yang telah berkembang ke arah perkotaan meliputi: Desa Mekar Jaya, Desa Kebun IX, Desa Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Kasang Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sebagian kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi dapat dikatakan berkarakter *predominantly urban* dan pada bagian terluar menunjukkan karakter semi urban.

Perkembangan kegiatan-kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa pada kawasan ini menunjukkan karakter yang sudah hampir mirip dengan perkembangan pada kota inti. Perdagangan dan jasa berkembang melalui bangunan deret pada koridor jalan utama dan perumahan berkembang dengan luas kavling (kepadatan) yang tidak terlalu berbeda dengan yang berkembang pada kota inti. Aksesibilitas terhadap kota inti sudah sangat baik yang dihubungkan oleh ruas jalan primer dan sistem transportasi umum kota yang melintasi kawasan tersebut.

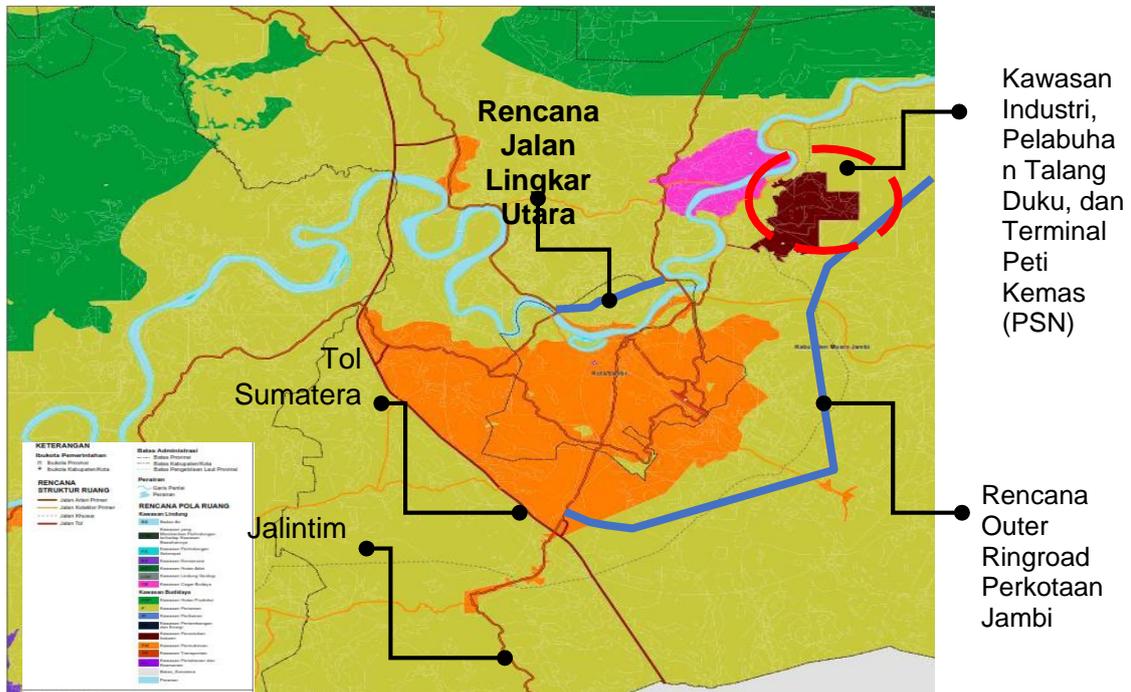


Gambar 2.54

Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023

4) Perkembangan Kawasan Bagian Utara Kota

Bagian utara adalah bagian wilayah Kota Jambi di sebelah utara Sungai Batanghari. Pada bagian wilayah ini, kedepan akan memiliki *trigger* atau pemicu baru perkembangan wilayah dengan direncanakannya jalan lingkar baru (lingkar utara) yang menghubungkan langsung Jalan Arteri Primer (JAP) Jalan Lintas Timur dengan Jalan Arteri Primer (JAP) Kota Jambi-Pelabuhan Muara Sabak. Jalan lingkar ini menjadi alternatif baru terutama untuk melayani pergerakan barang dari Jalan Lintas Timur menuju Kawasan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar 2.55
Trigger Baru Perkembangan Eksternal Kota Bagian Utara

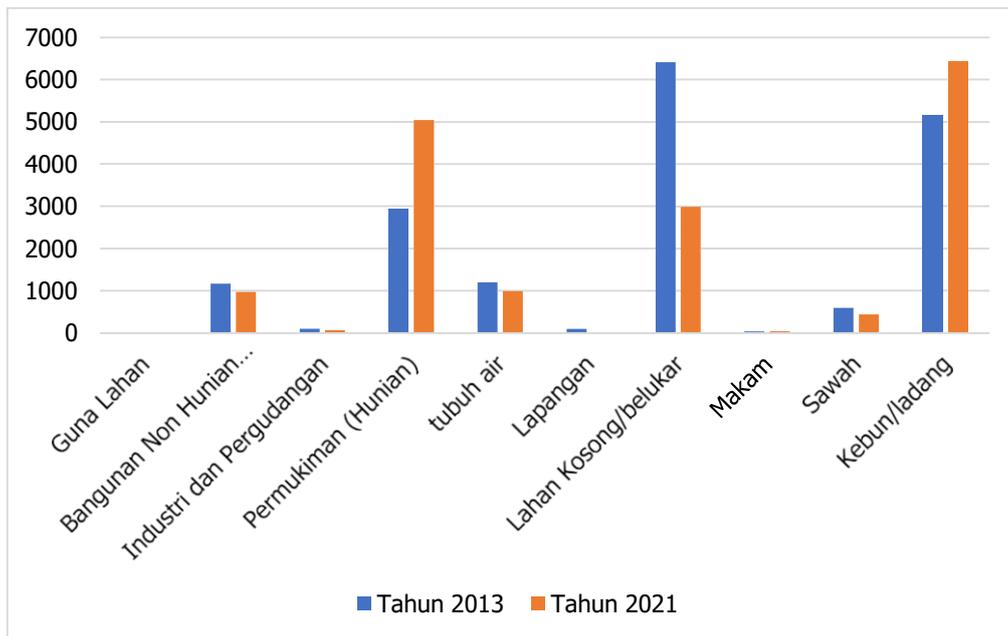
2.3.2.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi

Dinamika perubahan guna lahan akan lebih akurat dilihat dengan menginterpretasikan citra satelit pada periode tertentu yang menjadi tahun pengamatan. Akan tetapi, ketersediaan data spasial secara *time series* tersebut cenderung sulit didapatkan, apalagi untuk ukuran per tahun. Oleh karena itu, data perubahan guna lahan disumberkan kepada ketersediaan data yang ada, seperti data dari Badan Pusat Statistik berikut ini:

Tabel 2.16
Luas Perubahan Penggunaan Lahan

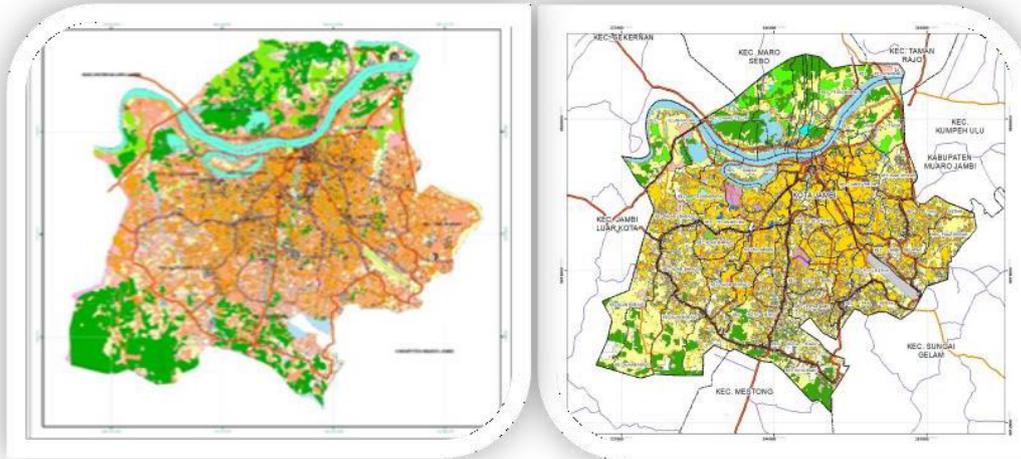
No	Guna Lahan	Tahun 2013	Tahun 2021
1	Bangunan Non Hunian (perdagangan, perkantoran, fasilitas)	1.168,57	968,57
2	Industri dan Pergudangan	101,31	67,79
3	Permukiman (Hunian)	2.927,91	5.040,01
4	tubuh air	1.195,88	998,13
5	Lapangan	92,55	15,71
6	Lahan Kosong/belukar	6.407,49	2.985,15
7	Makam	33,91	40,57
8	Sawah	590,93	446,87
9	Kebun/ladang	5.165,37	6.419,75
Jumlah		17.683,92	16.982,56

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



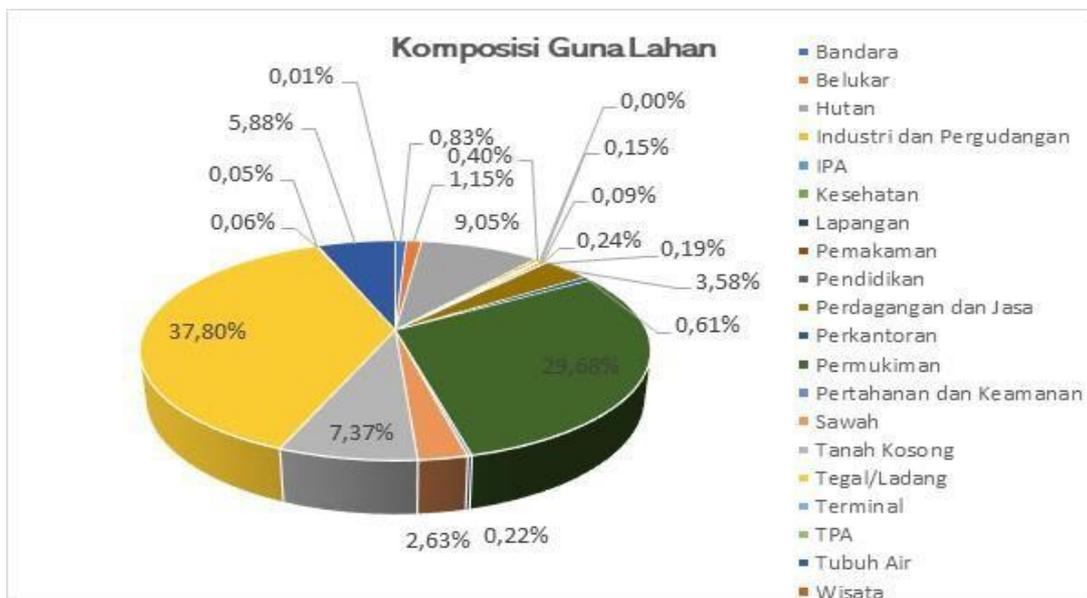
Gambar 2.56
Luas Perubahan Penggunaan Lahan

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan pada penggunaan permukiman. Luasan permukiman meningkat jauh, dan berbanding terbalik dengan luas tanah kosong yang mengalami penurunan signifikan.



Sumber : RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

Gambar 2.57
Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi



Gambar 2.58
Komposisi Guna Lahan Kota Jambi

2.3.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

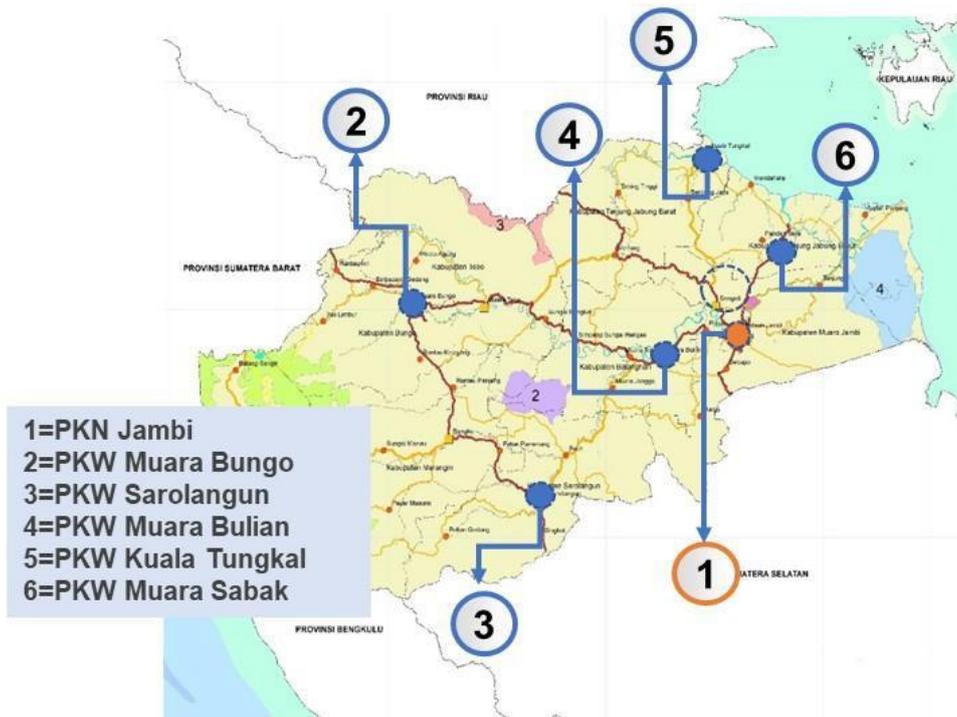
2.3.2.3.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi Regional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi ditetapkan pada Tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

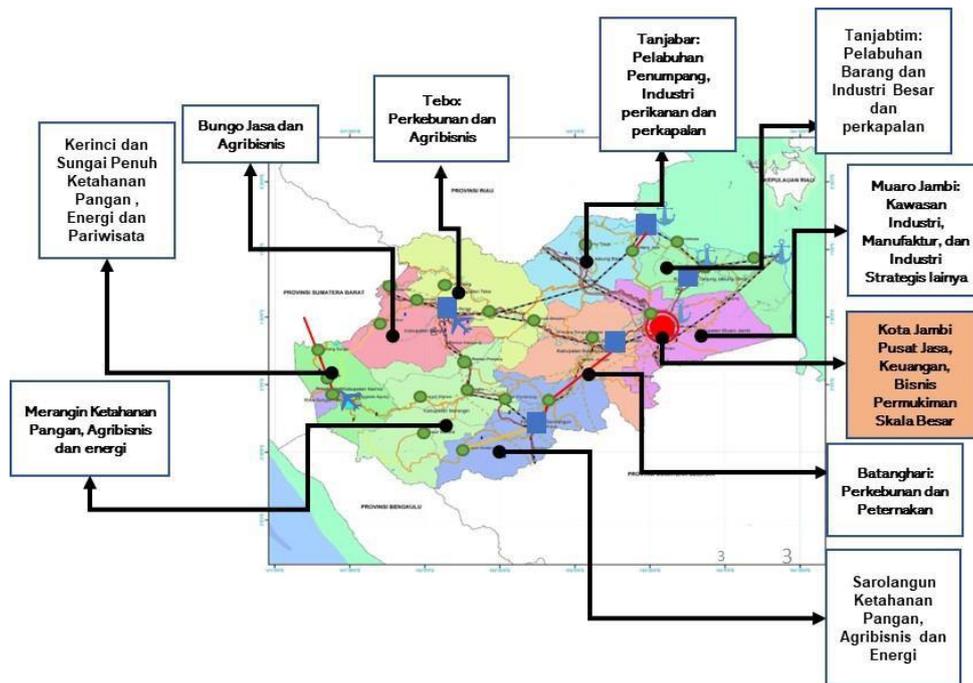
Wilayah Kota Jambi 2013-2033. Rumusan rencana yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2024-2044. Dalam muatan RTRWN maupun RTRW Provinsi Jambi, Peran Kota Jambi tidak mengalami perubahan, dimana Kota Jambi masih tetap sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Pulau Sumatera dengan arahan Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional. Sementara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi diarahkan sebagai Pusat Jasa, bisnis, keuangan, dan permukiman skala besar.

Berdasarkan aspek kebijakan terhadap arahan peran dan fungsi Kota Jambi dalam konstelasi regional ini, dapat digambarkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi pengembangan sektor-sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor-sektor tersebut perlu dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan jangka panjang guna memastikan adanya keterhubungan dengan peran dan fungsi Kota Jambi dalam kaitannya dengan aspek kebijakan dan perencanaan berjenjang.



Gambar 2.59
Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi

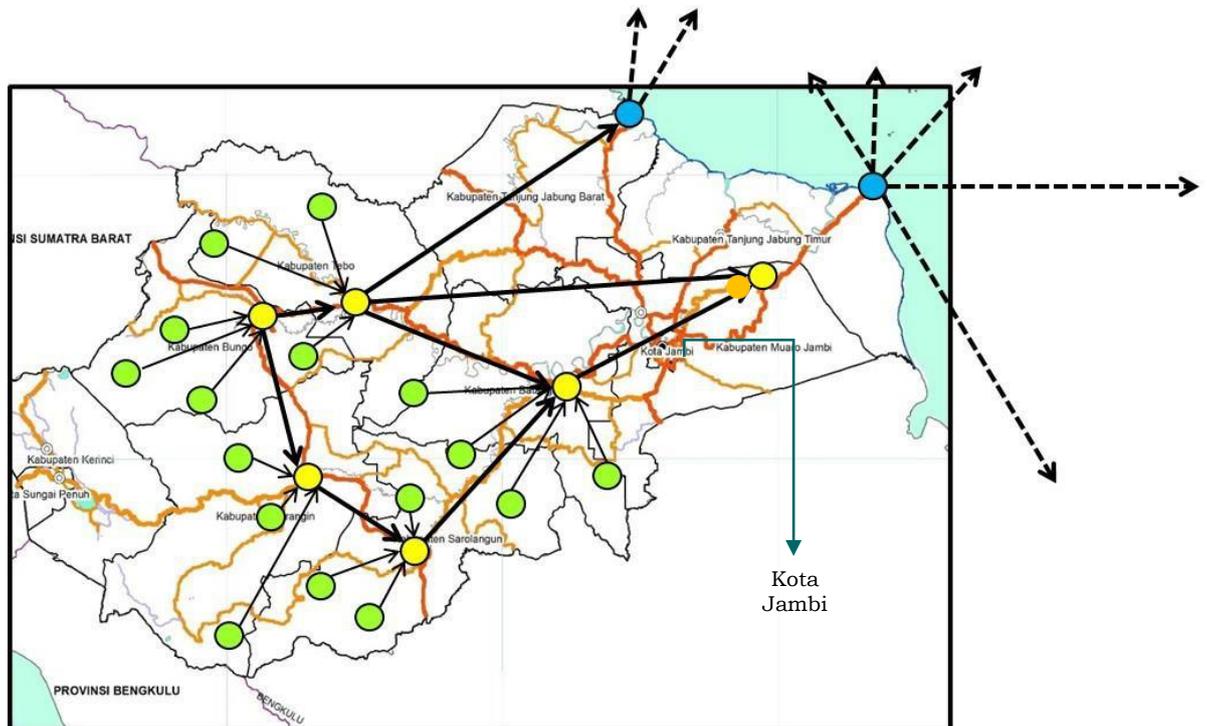


Gambar 2.60
Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

2.3.2.3.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional

Sistem jaringan prasarana regional memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Sebagai pusat utama di Provinsi Jambi, sistem jaringan prasarana utama yang dimiliki dan mempengaruhi perkembangan wilayah diantaranya adalah:

- a) Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
 1. Lintas Timur Sumatera;
 2. *Feeder* Kota Jambi-Muara Bungo;
 3. Jalan akses menuju Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara Sabak
- b) Rencana Jalan Tol Sumatera, yang berada di *hinterland* kota;
- c) Terminal Tipe A.
- d) Bandar Udara Pengumpul Sekunder;
- e) Rencana jaringan rel kereta api;



Gambar 2.61
Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama dan Pola Aliran Barang di Provinsi Jambi

2.5 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam rangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

Telah terjadi perubahan struktur APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, baik klasifikasi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah, berubah menjadi pendapatan transfer. Klasifikasi belanja yang sebelumnya terdiri dari belanja langsung dan belanja

tidak langsung, berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer mulai tahun 2021.

Pada Bab ini akan disajikan 3 (Tiga) Sub Bab, yaitu Kinerja Keuangan Masa Lalu (3.1); Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (3.2); dan Kerangka pendanaan (3.3)

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dalam periode RPJMD yang lalu yaitu periode tahun 2018-2023. Berdasarkan analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun kebelakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas 1). Kinerja Pelaksanaan APBD dan 2). Neraca Keuangan Daerah.

2.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2019-2024

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 6 (enam) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkandan bertujuan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek fisik maupun non fisik.

Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas, a) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah; b) Target dan Realisasi Belanja; serta c) Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

2.5.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target

pendapatan daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Capaian realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2019-2024 mengalami peningkatan, kemudian menurun di tahun 2020 akibat Pandemi Covid dan Kembali meningkat pada tahun 2021. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah;
- b) Pendapatan Transfer, meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan/atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

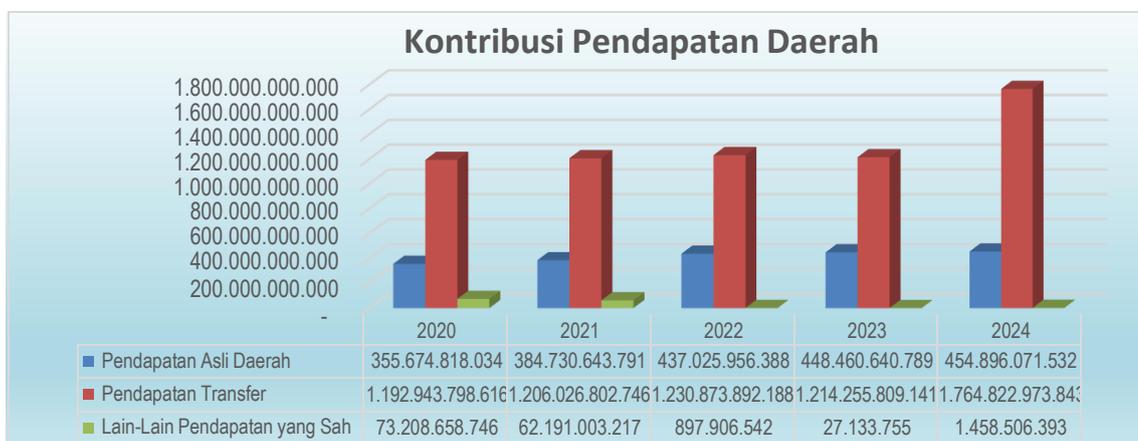
Gambar 2.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.17
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.621.827.275.396	1.652.948.449.755	1.668.797.755.118	1.662.743.583.685	1.765.065.348.755
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	355.674.818.034	384.730.643.791	437.025.956.388	448.460.640.789	455.138.446.444
1.1.1	Pajak Daerah	216.961.981.307	244.726.978.039	301.796.809.124	325.296.715.240	330.056.169.249
1.1.2	Retribusi Daerah	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270	39.366.332.496	32.366.620.736
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.602.267.383	9.638.772.830	10.528.936.340	10.637.060.712	18.905.457.211
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	88.630.973.241	78.520.627.495	84.483.587.653	73.160.532.340	73.810.199.248
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.192.943.798.616	1.206.026.802.746	1.230.873.892.188	1.214.255.809.141	1.308.468.395.918
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.036.458.974.832	1.029.901.887.791	1.061.703.980.044	1.044.176.633.631	1.184.370.919.330
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	62.351.931.035	100.837.130.545	77.079.036.732	75.598.199.428	81.724.986.000
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	37.368.239.960	41.669.613.112	85.400.197.236	36.352.920.895	56.886.371.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	687.484.664.000	675.239.528.807	670.654.802.680	710.687.966.817	813.729.510.984
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	249.254.139.837	212.155.615.327	228.569.943.396	221.537.546.491	232.030.051.346
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	37.746.049.000	40.519.528.000	22.192.745.000	5.918.541.000	11.796.475.000
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	37.746.049.000	40.519.528.000	22.192.745.000	5.918.541.000	11.796.475.000
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	118.738.774.784	135.605.386.955	146.977.167.144	164.160.634.510	112.301.001.588
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	115.018.774.784	131.885.386.955	140.777.167.144	156.810.634.510	109.711.001.588
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	3.720.000.000	3.720.000.000	6.200.000.000	7.350.000.000	2.590.000.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	73.208.658.746	62.191.003.217	897.906.542	27.133.755	1.458.506.393
1.3.1	Pendapatan Hibah	73.208.658.746	702.908.280	897.906.542	27.133.755	1.458.506.393

Pendapatan daerah Kota Jambi pada Tahun 2020-2024 didominasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah. Kontribusi Dana Transfer meningkat dari 2020 sampai dengan 2022. Tahun 2023, mengalami penurunan sekitar Rp 16 Milyar. Selanjutnya, kontribusi Dana Transfer mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2024.

Kondisi kontribusi pendapatan daerah tersebut digambarkan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.63

Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

A. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dari target Rp. 508.179.874.938,00 realisasinya Rp. 454.896.071.532,28 (89,51%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 dari target sebesar Rp. 541.087.970.969, terealisasi sebesar Rp. 448.460.460.789 (82,88%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.64

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi PAD Tahun 2020-2024.

Tabel 2.18

Perbandingan Realisasi PAD Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pajak Daerah	216.961.981.307	244.726.978.039	301.796.809.124	325.296.715.240	330.055.751.749
2.	Ret. Daerah	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270	39.366.332.496	32.366.620.736
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	9.602.267.383	9.638.772.830	10.528.936.340	10.637.060.712	18.905.457.211
4.	Lain-lain PAD yg sah	88.630.973.241	78.520.627.495	84.483.587.653	73.160.532.340	73.164.598.883
	TOTAL	355.674.818.034	384.730.643.791	437.025.956.388	448.460.640.789	454.896.071.532

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024

Kondisi perbandingan sumber Pendapatan Asli Daerah digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 2.65
Sumber Pendapatan Asli Daerah 2020-2024

B. Pendapatan Transfer

Selama tahun 2020-2024, realisasi pendapatan transfer meningkat dari 2020 sampai dengan 2022 dan pada 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari target Pendapatan Transfer tahun 2023 dari sebesar Rp. 1.214.663.935.320 terealisasi sebesar Rp. 1.214.255.809.141 (99,97%). Untuk tahun 2024, dari target sebesar Rp. 1.376.866.830.000, dapat terealisasi sebesar Rp. 1.308.468.395.918. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.66

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024

Adapun Pendapatan Transfer diperoleh dari: Transfer Pemerintah Pusat; Transfer Pemerintah Pusat Lainnya; dan Transfer Pemerintah Provinsi. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024.

Tabel 2.19

Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.036.458.974.832	1.029.901.887.791	1.061.703.980.044	1.044.176.633.631	1.196.167.394.000
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	37.746.049.000	40.519.528.000	22.192.745.000	5.918.541.000	112.301.001.588
3.	Transfer Pemerintah Provinsi	118.738.774.784	135.605.386.955	146.977.167.144	164.160.634.510	0
	TOTAL	1.192.943.798.616	1.206.026.802.746	1.230.873.892.188	1.214.255.809.141	1.308.468.395.588

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024

Kondisi perbandingan sumber pendapatan transfer digambarkan pada

gambar berikut.



Gambar 2.67
Sumber Pendapatan Transfer 2020-2024

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2024, Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp. 1.488.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.458.506.393 (95,03%). Pencapaian ini meningkat jauh dibandingkan pencapaian tahun 2023 yang hanya mencapai Rp. 27.133.755. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.68

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024

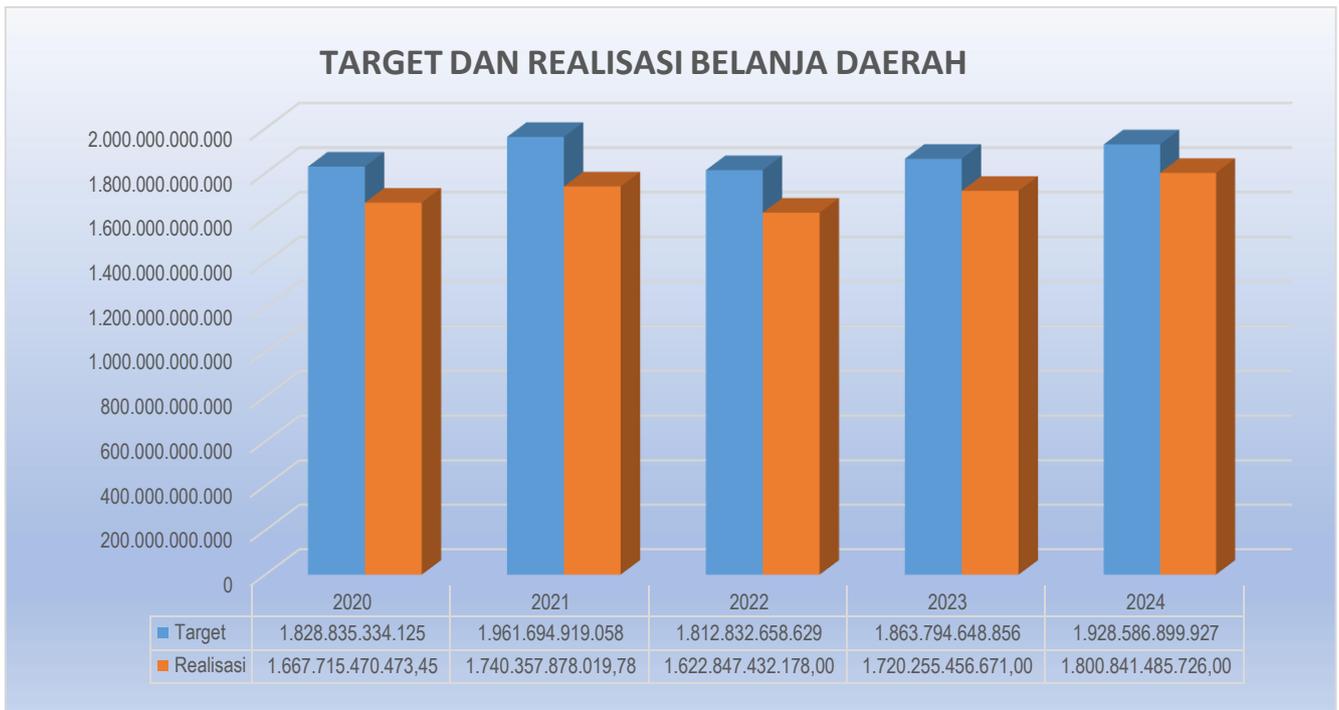
2.5.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Daerah dan Penerimaan Lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah Kota Jambi dari tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20
Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	
I	BELANJA DAERAH	1.667.715.470.473	1.740.357.878.020	1.622.847.432.178	1.720.255.456.671	1.800.841.485.726
1	BELANJA OPERASI	1.180.536.624.524	1.238.942.121.721	1.250.909.815.843	1.250.254.714.177	1.393.224.521.964
1.1	Belanja Pegawai	628.395.170.421	682.947.098.349	657.648.319.580	633.646.621.081	756.006.034.053
1.2	Belanja Barang dan Jasa	528.364.153.071	503.686.765.888	535.487.916.813	542.691.984.444	538.747.646.619
1.3	Belanja Bunga	0	1.626.646.569	5.866.774.340	962.846.340	0
1.4	Belanja Subsidi	0	197.820.000	614.964.000	1.113.369.872	0
1.5	Belanja Hibah	18.105.901.032	43.843.156.233	47.357.346.311	66.177.659.650	91.639.755.290
1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.671.400.000	6.640.634.682	3.934.494.800	5.662.232.790	6.831.086.000
2	BELANJA MODAL	444.351.878.184	495.805.792.009	368.629.083.248	465.396.183.188	407.026.806.103
2.1	Belanja Tanah	6.880.000.000	9.426.780.000	7.565.000.000	6.320.000.000	1.790.275.000
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	130.165.836.495	87.421.234.280	64.474.137.348	110.429.401.429	110.768.234.004
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	120.545.997.615	159.133.484.115	143.907.007.228	184.015.001.376	143.608.534.591
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	169.600.168.913	226.986.232.364	140.522.841.590	151.582.027.590	135.889.410.117
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	16.878.760.161	12.838.061.250	12.160.097.082	13.049.752.793	14.865.552.390
2.6	Belanja Aset Lainnya	281.115.000	0	0	0	104.800.000
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.044.082.130	5.609.964.290	3.208.533.087	4.604.559.306	590.157.659
3.1	Belanja Tidak Terduga	41.044.082.130	5.609.964.290	3.208.533.087	4.604.559.306	590.157.659
4	BELANJA TRANSFER	1.782.885.636	0	100.000.000	0	0
4.1	Belanja Bantuan Keuangan	1.782.885.636	0	100.000.000	0	0



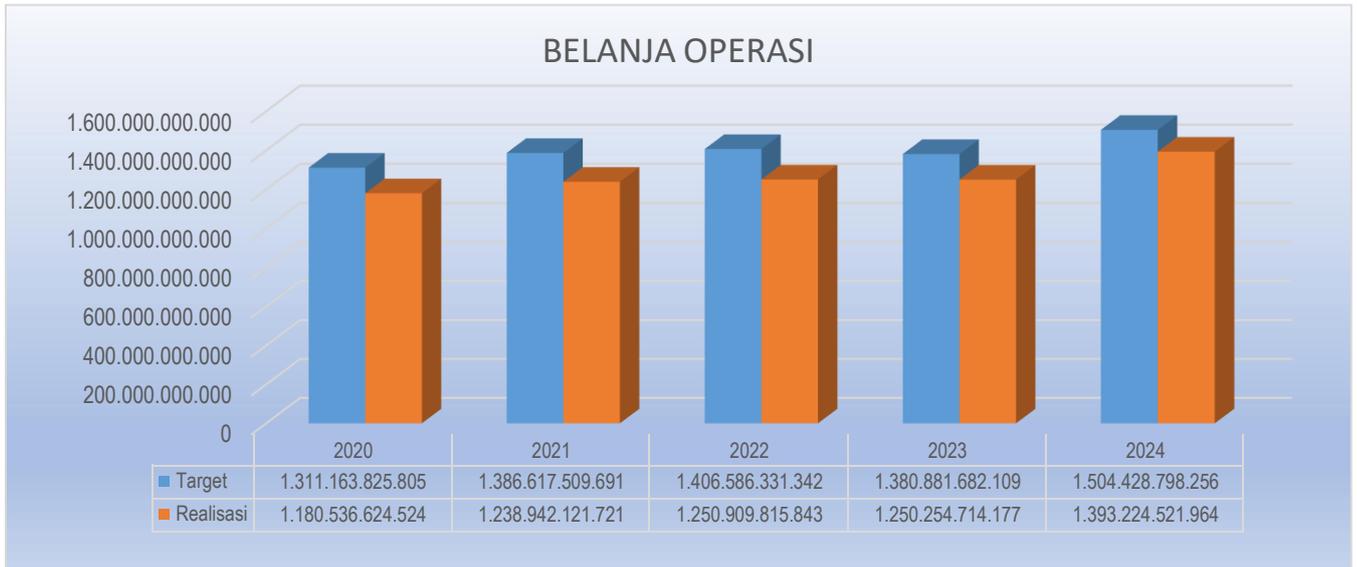
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.69

Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

A. BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi dari tahun 2024 sebesar Rp. 1.393.224.521.964 dari target sebesar Rp. 1.504.428.798.256 atau setara dengan 92,60 persen dari target. Rincian Target dan Realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.70

Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024

Belanja Operasi diperoleh dari: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024.

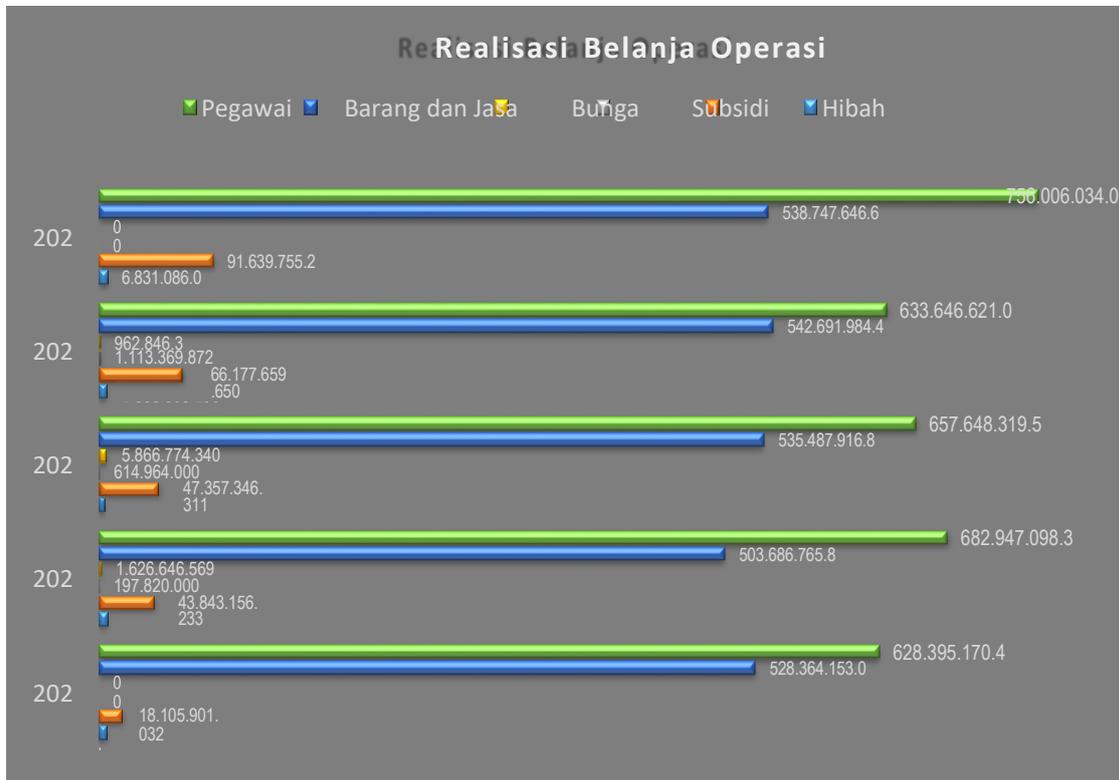
Tabel 2.21

Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Pegawai	628.395.170.421	682.947.098.349	657.648.319.580	633.646.621.081	756.006.034.053
2.	Belanja Barang dan Jasa	528.364.153.071	503.686.765.888	535.487.916.813	542.691.984.444	538.747.646.619
3.	Belanja Bunga	0	1.626.646.569	5.866.774.340	962.846.340	0
4.	Belanja Subsidi	0	197.820.000	614.964.000	1.113.369.872	0
5.	Belanja Hibah	18.105.901.032	43.843.156.233	47.357.346.311	66.177.659.650	91.639.755.290
6.	Belanja Bantuan Sosial	5.671.400.000	6.640.634.682	3.934.494.800	5.662.232.790	6.831.086.000
	TOTAL	1.180.536.624.524	1.238.942.121.720	1.250.909.815.843	1.250.254.714.177	1.393.224.521.964

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Kondisi perbandingan sumber Belanja Operasi digambarkan pada gambar berikut.

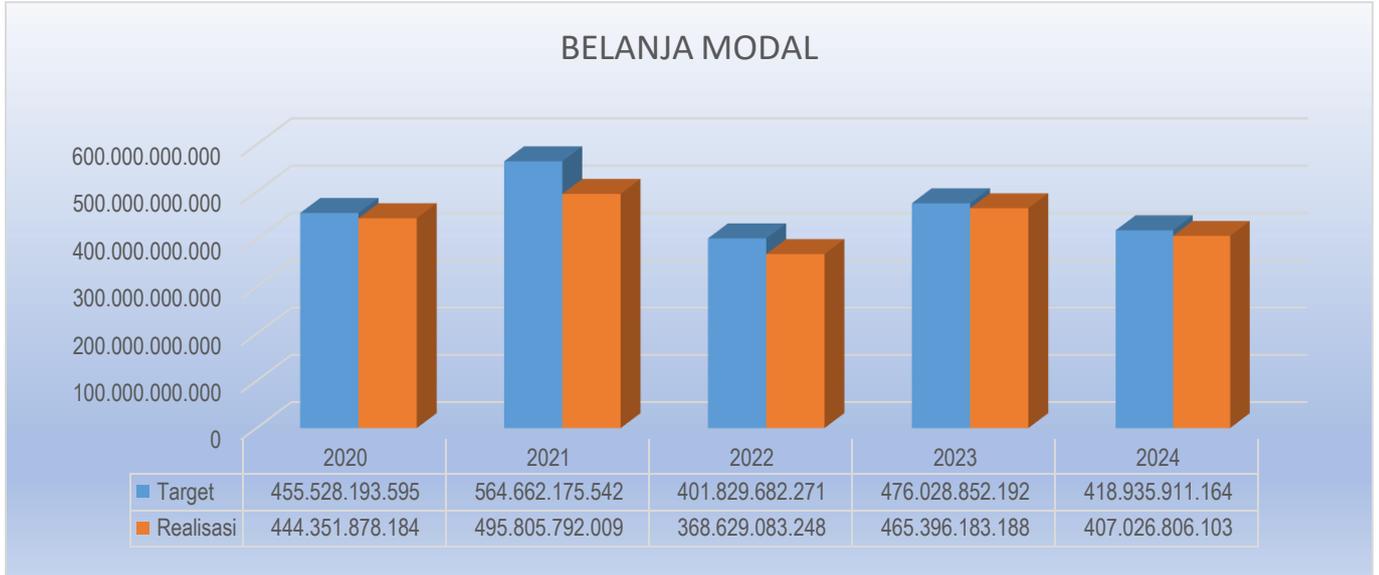


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.71
Realisasi Belanja Operasi 2020-2024

1. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal dari Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 2.809.678.420.186 dari target sebesar Rp. 3.067.769.038.354 atau sebesar 91,59%. Rincian rencana dan realisasi belanja modal dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.72

Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024

Belanja Modal diperoleh dari: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, irigasi dan jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; dan Belanja Aset Lainnya. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024.

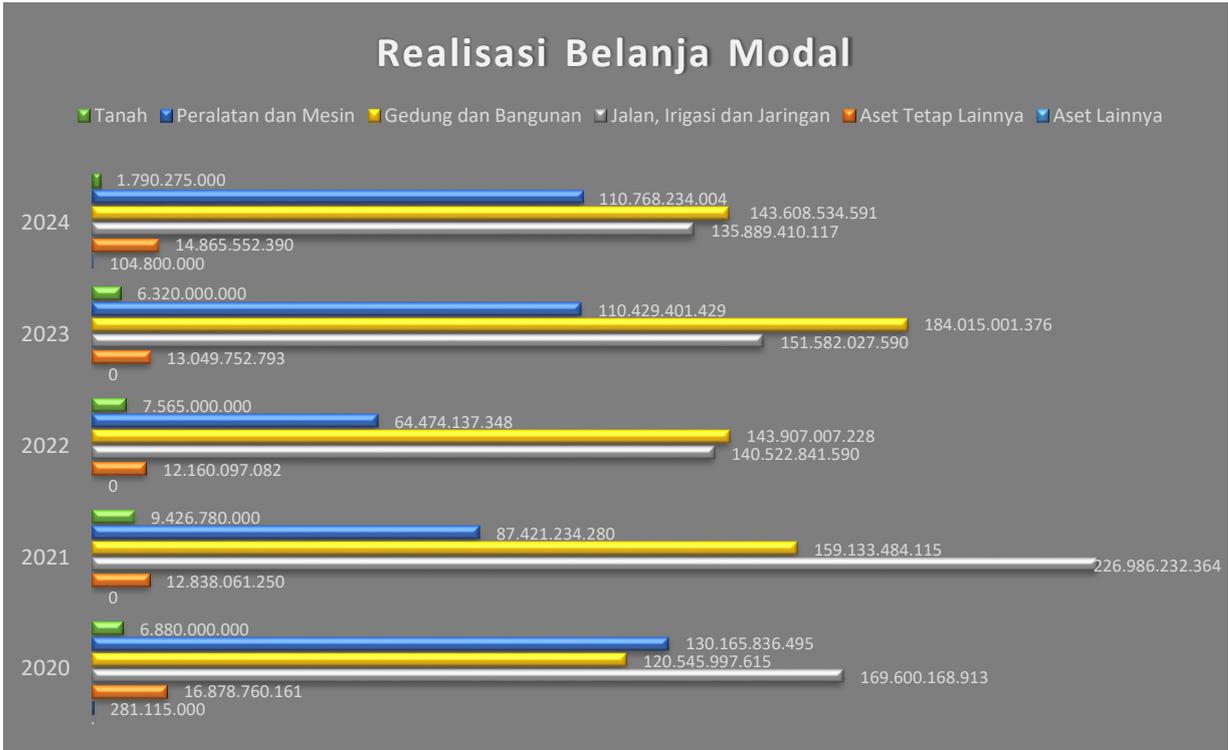
Tabel 2.22

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020-2024

No	Uraian	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Modal Tanah	6.880.000.000	9.426.780.000	7.565.000.000	6.320.000.000	1.790.275.000
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.165.836.495	87.421.234.280	64.474.137.348	110.429.401.429	110.768.234.004
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.545.997.615	159.133.484.115	143.907.007.228	184.015.001.376	143.608.534.591
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	169.600.168.913	226.986.232.364	140.522.841.590	151.582.027.590	135.889.410.117
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.878.760.161	12.838.061.250	12.160.097.082	13.049.752.793	14.865.552.390
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	281.115.000	0	0	0	104.800.000
TOTAL		444.351.878.184	495.805.792.009	368.629.083.248	465.396.183.188	407.026.806.103

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Kondisi perbandingan sumber Belanja Modal digambarkan pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.73
Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024

B. BELANJA TIDAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tidak Terduga dari Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 55.057.296.472 dari target sebesar Rp. 87.177.014.284 atau terealisasi sebesar 63,16 persen dari total target tahun 2020-2024. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada grafik berikut:



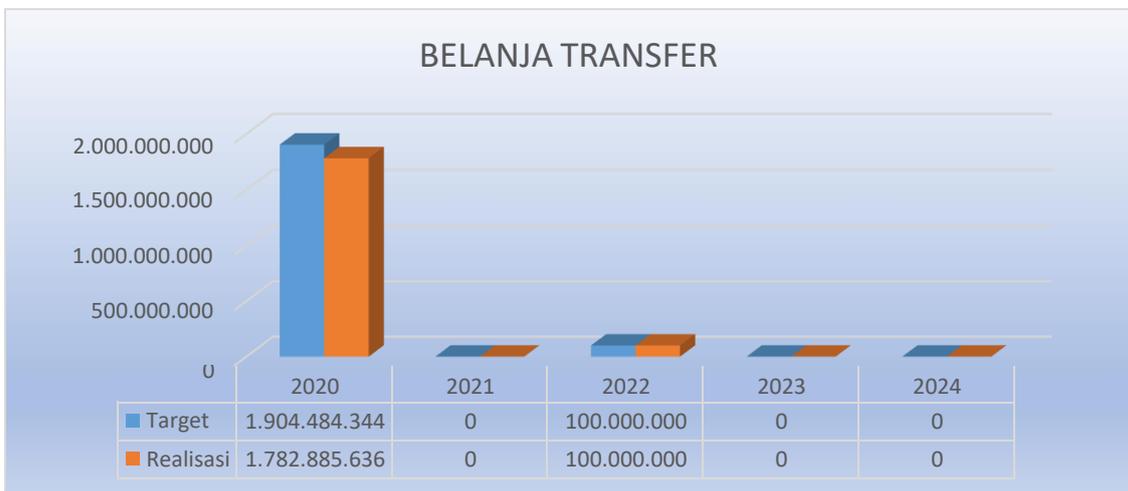
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.74

Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020-2024

C. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer dari Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 1.822.885.636 dari target sebesar Rp. 2.004.484.344 atau terealisasi sebesar 93,93 persen dari total target tahun 2020-2024 Rincian rencana dan realisasi belanja transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

Gambar 2.75

Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020-2024

2.5.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Jambi mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah hanya mencakup penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama kurun waktu 6 (enam) tahun yang lalu dilakukan dan dirumuskan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan secara optimal. Namun demikian, agar ada jaminan bahwa dalam penyusunan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, efektif, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat dalam penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam perumusannya memperhatikan beberapa faktor, diantaranya faktor keseimbangan antara pendapatan dengan belanja serta pembiayaan.

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD;
- c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kota Jambi tahun 2020-2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023

No	URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	211.177.186.101	249.088.085.424	215.092.419.627	188.086.807.973	53.353.416.588
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	211.176.919.411	165.288.991.025	159.678.657.158	188.042.742.567	53.353.416.588
1.2	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	266.690	685.450.400	4.666.469	44.065.406	0
1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	83.113.644.000	55.409.096.000	0	0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	2.000.000.000	73.000.000.000	78.522.740.000	5.000.000.000
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	2.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000
2.2	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0	70.000.000.000	68.522.740.000	0
	PEMBIAYAAN NETTO (Jumlah Penerimaan-Jumlah Pengeluaran)	165.288.991.024	159.678.657.158	142.092.419.627	109.564.067.973	48.353.416.588

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, 2024

2.5.2 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah terjadi perubahan struktur APBD baik klasifikasi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan struktur APBD ini dilaksanakan mulai tahun 2021.

Pada struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya sebagai satu dari tiga sumber pendapatan daerah berubah menjadi pendapatan transfer. Sedangkan klasifikasi belanja yang sebelumnya menggunakan belanja langsung dan tidak langsung, mulai tahun 2021 menggunakan klasifikasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2024 pada dasarnya memuat realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada tahun 2024. Realisasi keuangan ini merupakan angka rekapitulasi dari pencapaian kinerja keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun anggaran 2024. Adapun pencapaian realisasi keuangan tahun 2024 dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	508.179.874.938	455.138.446.444	89,56
Pendapatan Transfer	1.376.866.830.000	1.308.468.395.918	95,03
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	27.133.755	-
Jumlah Pendapatan	1.886.534.704.938	1.765.065.348.755	93,56
Belanja			
Belanja Operasi	1.504.428.798.256	1.393.224.521.964	95,03
Belanja Modal	418.935.911.164	07.026.806.103	97,16
Belanja Tak Terduga	5.222.190.507	590.157.659	11,30
Belanja Transfer	0	0	-
Jumlah Belanja	1.928.586.899.927	1.800.841.485.726	93,38
Surplus/ (Defisit)	(42.052.194.989)	(35.776.136.971)	85,08,23
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	52.052.194.989	53.353.416.588	102,50
Pengeluaran Pembiayaan	42.052.194.989	48.353.416.588	114,98
Pembiayaan Netto	42.052.194.989	48.353.416.588	114,98
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0	12.577.279.617	-

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.765.065.348.755 atau 93,56% dari anggaran sebesar Rp

1.886.534.704.938. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp 1.662.743.583.686.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 455.138.446.444 atau mencapai 89,56% dari anggarannya sebesar Rp 508.179.874.938. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 59.719.234.4149 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp 448.460.640.789.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.196.167.394.330 atau 98,64% dari anggaran sebesar Rp 1.212.706.196.000. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp 1.050.095.174.631.

Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 112.301.001.588 atau 68,41% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp 164.160.634.000, yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.458.506.393. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp 164.160.634.510.

Jumlah realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.800.841.485.726 atau setara 93,38% dari anggaran sebesar Rp 1.928.586.899.927. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 1.720.255.456.671.

Realisasi pembiayaan daerah (Netto) Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 8.353.416.588 atau setara dengan 114,98% dari anggaran sebesar

Rp 42.052.194.989. Realisasi pembiayaan daerah (Netto) Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan daerah (Netto) Tahun Anggaran 2023 yang mencapai Rp 109.564.067.973.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 2.577.279.617.

2.5.3 Neraca Keuangan Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Data pertumbuhan neraca daerah tahun 2020 sampai dengan 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.24

Tabel 2.25
Neraca Daerah Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
1.1	Aset Lancar					
1.1.1	Kas di Kas Daerah	155.477.665.003	149.617.730.165	184.326.446.621	46.240.411.077	404.710.313,72
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	9.474.874	3.408.635	3.084.422	0	784.548,00
1.1.3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	111.484.575	0	0
1.1.4	Kas di Bendahara Penerimaan	39.172.280	541.360.337	4.960.155	7.292.361	0
1.1.5	Kas di BLUD	6.907.958.432	8.830.342.316	3.041.823.556	2.860.713.024	7.109.722.353,34
1.1.6	Kas di Bendahara Dana BOS	1.723.796.145	602.361.079	517.337.954	821.780.104	360.114.428,40
1.1.7	Kas Lainnya	2.219.411.418	145.897.509	151.838.316	2.121.998.421	4.978.186.976,00
1.1.8	Setara Kas	0	0	0	0	0
1.1.9	Piutang Pajak	95.550.308.429	102.446.982.299	106.199.018.165	118.078.167.263	129.337.171.620,76
1.1.10	Piutang Retribusi	2.655.626.867	2.785.353.899	2.855.003.747	2.915.416.506	2.996.206.646,98
1.1.11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.124.050.430	61.835.584.420	40.910.976.362	49.170.852.247	53.871.691.151,53
1.1.12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	11.660.668.324	0	0	67.384.000	62.839.000,00
1.1.13	Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	42.178.873.288	46.951.151.955	51.517.348.364	37.385.669.444	37.071.850.206,00
1.1.14	Penyisihan Piutang	(57.099.912.953)	63.524.278.417	(70.123.250.807)	(114.200.713.884)	(123.758.473.378,98)
1.1.15	Belanja Dibayar Dimuka	334.343.899	189.958.065	206.891.349	206.268.625	173.595.572,50
1.1.16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	97.835.752	116.083.088	105.820.729	103.878.320	112.640.457,05
1.1.17	Piutang Lainnya	0	0	0	0	0

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.1.18	Persediaan	25.484.229.979	42.579.477.436	27.992.539.505	26.158.798.356	34.918.892.195,12
Jumlah Aset Lancar		274.992.557.010	292.363.502.166	353.121.412.785	347.821.323.016	147.639.932.090,42
1.2	Investasi Jangka Panjang					
1.2.1	Investasi Nonpermanen	0	0	0	0	
1.2.1.1	Investasi Nonpermanen	0	0	0	0	0
1.2.2	Investasi Permanen	282.174.577.551	285.335.001.996	293.264.113.221	318.518.213.938	335.003.962.614,16
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	282.174.577.551	285.335.001.996	293.264.113.221	318.518.213.938	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang (23 dan 25)	282.174.577.551	285.335.001.996	293.264.113.221	318.518.213.938	335.003.962.614,16
1.3	ASET TETAP					
1.3.1	Tanah	532.078.576.169	561.718.011.374	839.465.233.610	866.441.687.454	950.354.006.982,73
1.3.2	Peralatan dan Mesin	856.569.347.811	943.093.802.641	1.011.854.497.151	1.108.546.580.009	1.243.730.444.637,66
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.259.108.922.870	1.441.383.417.029	1.519.964.184.705	1.746.807.144.434	1.885.923.161.707,59
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.446.262.820.545	2.689.838.993.181	2.906.223.956.056	3.081.836.325.203	3.464.910.702.133,67
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	206.542.105.332	263.645.627.281	289.462.761.379	302.286.686.731	319.994.736.186,33
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	21.372.814.500	25.204.316.050	46.142.825.050	3.596.838.125	3.652.133.150,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(2.042.510.938.073)	(2.348.666.761.396)	(2.608.375.034.397)	(2.877.462.685.381)	(3.210.873.270.553,77)
1.3.1	Jumlah Aset Tetap	3.279.423.649.153	3.576.217.406.161	4.004.738.423.554	4.232.052.576.576	4.657.691.914.244,21
1.4	ASET LAINNYA					
1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi	106.520.692	73.512.804	50.530.476	32.696.190	18.310.804,76
1.4.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000	41.117.000.000,00
1.4.3	Aset Tak Berwujud	6.688.836.528	6.773.637.328	6.892.477.828	7.279.115.268	7.383.915.268,88

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.4.4	Aset Lain-Lain	89.954.806.808	53.568.125.704	21.285.918.848	18.074.812.938	39.925.534.560,76
1.4.5	Amortisasi	(5.563.329.591)	(6.327.454.606)	(6.685.312.053)	(6.902.874.488)	(7.081.255.173,38)
1.4.6	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0	46.425.751	100.568.438	117.728.595	112.500.566,37
1.4.7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			13.836.304.323	34.722.323.000	7.963.145.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	132.303.834.437	95.251.246.980	76.597.487.860	94.449.801.504	89.439.151.027,39
	JUMLAH ASET	3.986.265.563.307	4.309.925.067.922	4.722.421.347.652	4.816.949.507.887	5.229.774.959.976,18
2	KEWAJIBAN					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	501.036.728	62.442.882	114.233.034	0	0
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	47.000.000.000	68.522.740.000	2.500.000.000	1.500.000.000,00
2.1.3	Utang Bunga	0	1.043.869.978	962.846.340	0	0
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	4.263.139.399	4.056.805.067	3.238.180.190	3.041.357.551	2.898.941.446,88
2.1.5	Utang Belanja	14.277.916.948	22.711.187.493	19.330.734.939	24.385.363.630	14.685.373.339,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	616.670.888	345.387.498	362.547.655	475.524.171,37
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	19.042.093.075	75.490.976.308	92.514.112.000	30.289.268.837	19.559.838.957,25
2.2	Kewajiban Jangka Panjang					
2.1.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	27.659.670.000	63.773.314.000	26.659.670.000	18.159.670.000	16.659.670.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka	27.659.670.000	63.773.314.000	26.659.670.000	18.159.670.000	16.659.670.000,00

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Panjang					
	JUMLAH KEWAJIBAN	46.701.763.075	139.264.290.308	119.173.782.000	48.448.938.837	36.219.508.957,25
	JUMLAH EKUITAS	3.939.563.800.232	4.170.660.777.613	4.603.247.565.651	4.768.500.569.050	5.193.555.451.018,93
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.986.265.563.307	4.309.925.067.922	4.722.421.347.652	4.816.949.507.887	5.229.774.959.976,18

2.5.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

2.5.4.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

a. Perbaikan manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan:

- 1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- 2) Menyederhanakan prosedur perijinan;
- 3) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, maupun antar sektor;
- 4) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- 5) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- 7) Meniadakan tumpang tindih pemungutan;
- 8) Menyederhanakan prosedurnya.

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan *turn over*. Optimalisasi aset juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK, Bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

2.5.4.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. *Prioritas*

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, sebagaimana agenda pembangunan tahunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan Kota Jambi.

3. *Tolak Ukur dan Target Kinerja*

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. *Optimalisasi Belanja*

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (pihak swasta) bila memungkinkan.

5. *Transparan dan Akuntabel*

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

2.5.4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

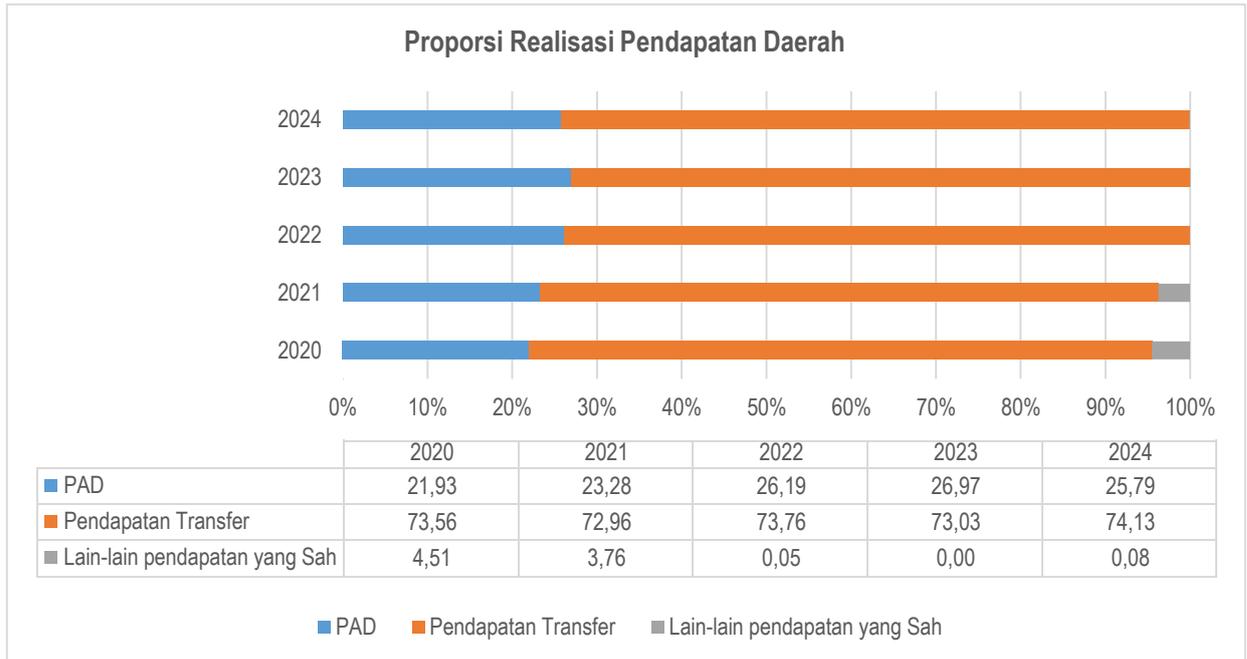
Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 *coverage*.

2.5.5 Proporsi Anggaran Pendapatan

Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; Pendapatan Transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Jambi berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai

pembangunan di Kota Jambi.

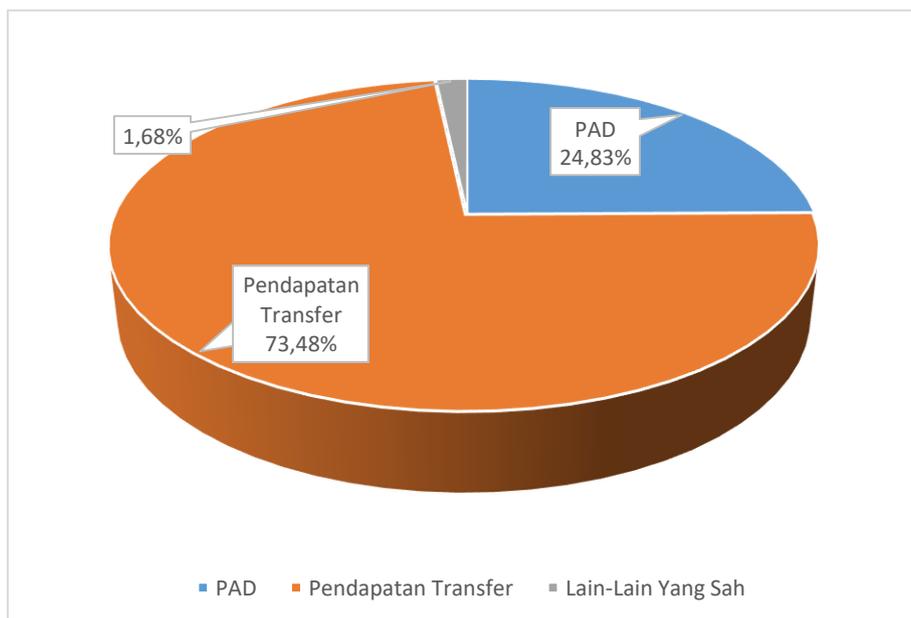
Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Jambi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.76

Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

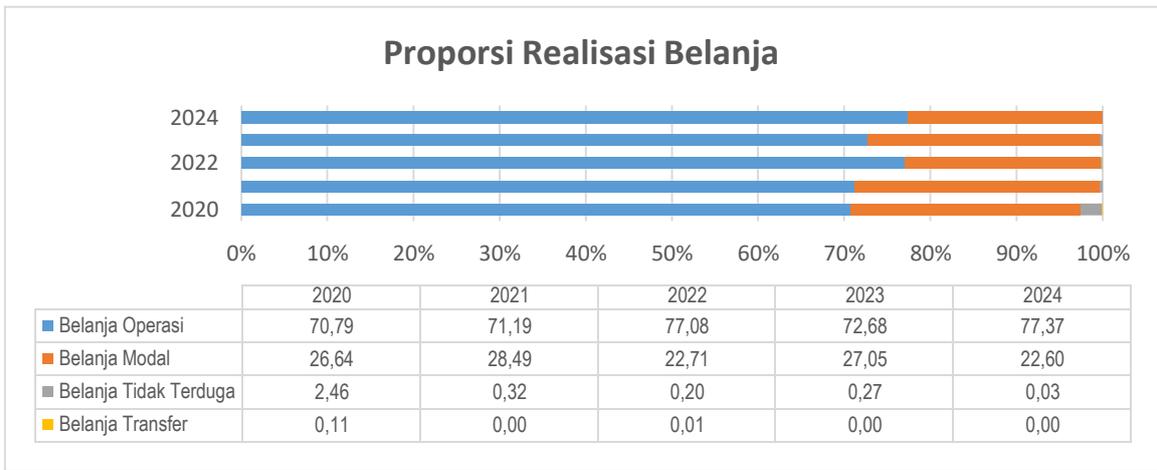
Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2020-2024, kontribusi keseluruhan pendapatan asli daerah sebesar 24,83% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,68%. Sementara itu Pendapatan Transfer memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Jambi yakni 73,48%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.74



Gambar 2.77
Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2020-2024

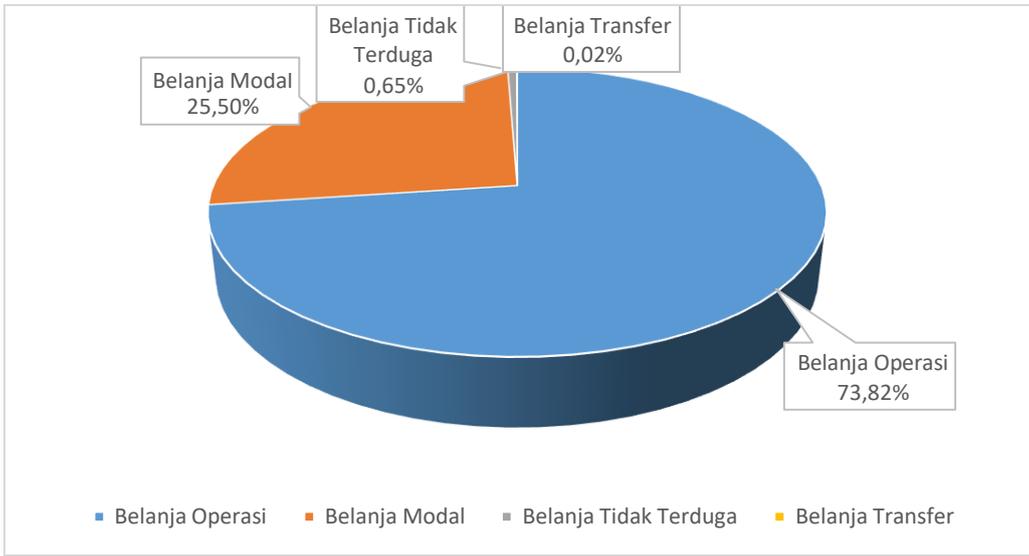
2.5.6 Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Secara nilai, masing-masing komponen belanja yaitu Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.75



Gambar 2.78
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2020-2024

Bila dihitung secara agregat selama 5 (enam) tahun terakhir, dari tahun 2020-2024, kontribusi keseluruhan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,65% dan Belanja Transfer sebesar 0,02%. Sementara itu Belanja Operasi memberi kontribusi terbesar pada Pendapatan Transfer Kota Jambi yakni 73,82% dan Belanja Modal 25,50%. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.76



Gambar 2.79
Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2020-2024

2.5.7 Analisis Pembiayaan Daerah

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila nilainya positif dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif dikategorikan defisit anggaran.

Kebijakan defisit riil anggaran selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat diambil setelah dilakukan Perubahan Perda APBD setiap tahunnya, dimana dalam penyusunan Perubahan Perda APBD dapat digunakan pembiayaan yang bersumber dari realisasi SiLPA. Sedangkan pada awal tahun perencanaan penganggaran dimana pembiayaan masih menggunakan nilai proyeksi sehingga selisih pendapatan dan belanja daerah diambil kebijakan surplus. Hal ini dikarenakan pengeluaran pembiayaan diantaranya penyertaan modal lebih besar daripada penerimaan pembiayaan.

Ketentuan batas maksimal defisit APBD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.07/2023 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024. Mempedomani ketentuan ini Pemerintah Kota Jambi hendaknya mengambil kebijakan mengurangi/meminimalkan defisit anggaran dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah atau dengan tidak menambah belanja modal yang tidak mendesak.

Tabel 2.26
Defisit Riil Anggaran Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.621.827.275.396	1.652.948.449.755	1.668.797.755.118	1.662.743.583.685	1.765.065.348.755
2.	Belanja Daerah	1.667.715.470.473	1.740.357.878.020	1.622.847.432.179	1.720.255.456.671	1.800.841.485.726
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	2.000.000.000	73.000.000.000	78.522.740.000	5.000.000.000
	Defisit Riil	(45.888.195.077)	(87.409.428.265)	45.950.322.940	(57.511.872.985)	(35.776.136.971)

Tabel 2.27
Defisit Riil Anggaran Kota Jambi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	211.177.186.101	249.088.085.424	215.092.419.627	188.086.807.973	53.353.416.588
3.1.1	Penggunaan SiLPA	211.176.919.411	165.288.991.024	159.678.657.158	188.042.742.567	53.353.416.588
3.1.2	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	266.690	685.450.400	4.666.469	44.065.406	0
3.1.3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	83.113.644.000	55.409.096.000	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	2.000.000.000	73.000.000.000	78.522.740.000	5.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	2.000.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0	70.000.000.000	68.522.740.000	0
	Pembiayaan Neto	211.177.186.101	247.088.085.424	142.092.419.627	109.564.067.973	48.353.416.588
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	165.288.991.024	159.678.657.158	188.042.742.567	52.052.194.988	52.052.194.988

Berdasarkan tabel 3.10. diatas pada tahun 2020 dan tahun 2021, APBD Kota Jambi mengalami surplus defisit namun pada tahun 2023, mengalami surplus 45,950 milyar dan 38,178 milyar akan tetapi di tahun 2023 dan tahun 2024 kembali mengalami defisit sebesar 57,511 milyar dan 35.776 milyar hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari realisasi belanja daerah.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal skema pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

2.5.8 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan riil anggaran untuk 5 tahun kedepan. Salah

satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun berkenaan.

Tabel 2.28
Proyeksi APBD Kota Jambi Tahun 2024 s/d Tahun 2029

No.	Uraian	APBD 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029
1	PENDAPATAN DAERAH	1.864.222.611.000	1.576.311.389.000	1.603.223.286.691	1.631.835.671.293	1.662.255.991.775	1.694.598.486.508
1.1	Pendapatan Asli Daerah	545.539.002.000	557.779.746.000	584.691.643.691	613.304.028.293	643.724.348.775	676.066.843.508
1.1.01	Pajak Daerah	390.000.000.000	414.643.000.000	440.843.121.664	468.698.755.118	498.314.507.483	529.801.595.709
1.1.02	Retribusi Daerah	60.192.320.000	51.075.246.000	51.075.246.000	51.075.246.000	51.075.246.000	51.075.246.000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10.528.936.000	11.264.564.000	11.976.340.027	12.733.091.174	13.537.659.292	14.393.065.799
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	84.817.746.000	80.796.936.000	80.796.936.000	80.796.936.000	80.796.936.000	80.796.936.000
1.2	Pendapatan Transfer	1.317.195.609.000	1.018.531.643.000	1.018.531.643.000	1.018.531.643.000	1.018.531.643.000	1.018.531.643.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.153.584.975.000	914.727.669.000	914.727.669.000	914.727.669.000	914.727.669.000	914.727.669.000
1.2.1.01	Dana Perimbangan	1.153.584.975.000	914.727.669.000	914.727.669.000	914.727.669.000	914.727.669.000	914.727.669.000
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	103.884.489.000	103.884.489.000	103.884.489.000	103.884.489.000	103.884.489.000	103.884.489.000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	810.843.180.000	810.843.180.000	810.843.180.000	810.843.180.000	810.843.180.000	810.843.180.000
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.923.695.000	-	-	-	-	-
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.933.611.000	-	-	-	-	-
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.610.634.000	103.803.974.000	103.803.974.000	103.803.974.000	103.803.974.000	103.803.974.000
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	156.810.634.000	97.003.974.000	97.003.974.000	97.003.974.000	97.003.974.000	97.003.974.000
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000
1.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000	1.488.000.000
2	BELANJA DAERAH	1.954.222.611.000	1.616.311.389.000	1.643.223.286.691	1.671.835.671.292	1.702.255.991.775	1.734.598.486.508

No.	Uraian	APBD 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029
	SURPLUS/(DEFISIT)	(90.000.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)	(40.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	90.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	90.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000

2.5.8.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024, dilakukan proyeksi untuk memperoleh gambaran pendapatan tahun 2025-2029. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2020-2024 berada pada angka rata-rata 5,11%
2. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2020-2024 pada angka 3,57% dengan catatan khusus pada tahun 2020, saat Pabdemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi -4,24%.
3. Pendapatan pajak naik rata-rata sebesar 10,02%.
4. Pendapatan retribusi daerah naik sebesar 3,17%.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 5,07%.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat sebesar 13,48%.
7. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) 3,72%, Dana Alokasi Khusus (DAK)- 2,90% dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 5,75%.

Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kota Jambi tahun 2018-2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada dan menggali potensi pendapatan daerah yang baru.
2. Pengembangan dan penyempurnaan basis data dari potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan *up to date*.
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana-prasarana pada perangkat daerah penanggung jawab pemungutan, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
4. Peningkatan kinerja bisnis BUMD yang ada dan menggali potensi pendapatan baru melalui pembentukan BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
5. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan

daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.

6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
7. Pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Sementara itu, dalam hal proyeksi belanja daerah didasarkan pada realisasi Belanja Daerah tahun 2018-2023. Proyeksi Belanja pada Tahun 2018-2023 masih mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sebelum perubahan, sedangkan untuk Tahun 2023 dan masa transisi Tahun 2024 berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kota Jambi sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
4. Pengalokasian belanja langsung didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur mendasarkan pada prioritas dan target kinerja pembangunan sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi;
5. Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku, dan tunjangan pegawai diarahkan pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).

2.5.8.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Asumsi pembiayaan yaitu SiLPA direncanakan semakin berkurang seiring dengan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, diharapkan mencapai angka nol. Kebijakan berkaitan penerimaan pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama hanya berasal dari sisa penghematan belanja. Kebijakan berkaitan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Jambi yaitu: penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan dana yang diinvestasikan/disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada maupun rencana pembentukan BUMD yang baru untuk memperkuat struktur modal dan juga memperkuat share permodalan khususnya BUMD yang kepemilikannya bersamaoleh Pemerintah Kota Jambi dan Provinsi. Penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam APBD didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi timbulnya indikasi ketidakseimbangan pembangunan terhadap aspek-aspek perkotaan. Semakin pesat perkembangan akan berpotensi semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan masalah yang komprehensif, akurat, dan akuntabel. Selain bersumber dari data, informasi, dan

masuk *stakeholders* dalam kegiatan Musrenbang dan kuesioner, pemetaan isu strategis juga bersumber dari isu strategis dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Jambi yang sudah lebih dahulu disusun dengan memperhatikan kerangka waktu yang sesuai dengan periode RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dan dan KLHS RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Tujuan pemetaan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan saat ini dan yang akan datang di Kota Jambi dan berpotensi menghambat proses pembangunan dalam periode 2025-2029. Permasalahan Kota Jambi diidentifikasi dalam beberapa aspek, meliputi: aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola dengan melihat *gap* capaian indikator pembangunan ataupun bersumber dari penjarangan isu dan permasalahan di Kota Jambi.

A. ASPEK SOSIAL

Transformasi sosial merupakan salah satu misi utama Indonesia Emas 2045. Dalam mendukung perwujudan transformasi sosial tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2045 sudah menetapkan tujuan jangka panjang, meliputi:

1. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
2. Mewujudkan Keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang;
4. Mewujudkan kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif;
5. Membentuk SDM yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; dan
6. Meningkatkan peran Masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak Pembangunan.

Arahan kebijakan di periode Pembangunan 2025-2029 ini adalah menyiapkan dasar-dasar transformasi tersebut. Namun demikian, berbagai permasalahan sosial masih dihadapi oleh Kota Jambi. Persoalan utama pembangunan utama Kota Jambi saat ini terletak pada indikator kesejahteraan

masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kota Jambi berada pada angka 7,73%. Dilihat dari Tahun 2020 tingkat kemiskinan berada pada 8,27% maka laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,135% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Kota Jambi belum secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Demikian halnya dengan Rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Rasio Gini Kota Jambi pada tahun 2020 sebesar 0,342 dan meningkat menjadi 0,371 pada tahun 2023 lalu kembali turun menjadi 0,353 pada tahun 2024. Secara umum, data menunjukkan bahwa setiap tahun Rasio Gini Kota Jambi cenderung meningkat dan ini berarti tingkat ketimpangan bertambah. Semakin mendekati angka 1, berarti menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Rasio Gini <0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Kecenderungan peningkatan inde

Dari aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 masih tinggi sebesar 7,38%. Angka ini belum mampu kembali pada level sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019 pada angka 6,72%. Masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja berkualitas atau terampil di Kota Jambi yang dapat memenuhi kebutuhan industri menjadi salah satu tantangan yang harus dijawab dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan yang perlu diatasi untuk mewujudkan transformasi sosial. Dari sisi penyediaan layanan kesehatan, Kota Jambi memiliki permasalahan terkait masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan dokter spesialis serta tingkat profesionalisme tenaga kesehatan yang masih rendah. Hal ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, rasiiodokter umum per penduduk di Kota Jambi sebesar 81 per 100.000 penduduk.

Dokter spesialis 43,6 per 100 ribu penduduk, dan dokter gigi 14,8 per 100 ribu penduduk.

Salah satu implikasinya adalah penanganan kasus *Tuberculosis* (TBC) dan HIV/AIDS masih belum optimal karena keterbatasan dari kuantitas dan kualitas tenaga kerja kesehatan yang memadai. Meskipun demikian persentase capaian *Treatment Coverage* (TC) untuk penderita TBC di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 persentase TC mencapai 77.9%, meningkat dari TC tahun 2022 sebesar 54,6%. Tahun 2024, TC untuk penderita TBC di Kota Jambi telah mencapai 87,1%. Dibandingkan tahun 2020, TC penderita TBC di Kota Jambi yang mencapai 32,1% telah mengalami pertumbuhan setinggi 54,1% pada tahun 2024 atau setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 13.52%. Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan terkait stunting. Tahun 2020, karena efek pandemi tidak dilaksanakan survei namun pada tahun 2021, Prevalensi Stunting Kota Jambi mencapai 17.4. Prevalensi Stunting Kota Jambi pada tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 14. Tahun 2023, Prevalensi Stunting di Kota Jambi mencapai 13,5.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan jaminan kesehatan. Berdasarkan BPJS Kota Jambi tahun 2024 Persentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan sebanyak 98,08%.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia juga terjadi di sektor pendidikan yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan. Salah satu isu utama adalah kualitas tenaga pendidik yang tidak merata yang ditandai dengan minimnya sertifikasi dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Tahun 2020, Rasio guru dan murid Kota Jambi untuk tingkat SD/ sederajat sebesar 0,067, turun menjadi 0,051 pada tahun 2021. Tahun 2022 dan 2023, kembali meningkat menjadi 0,054 dan 0,057. Tahun 2024, rasio guru dan murid tingkat SD sederajat mencapai 0,059. Rasio guru dan murid untuk tingkat SMP/ sederajat di Kota Jambi pada tahun 2020 mencapai 0,061 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0,064, untuk kemudian turun kembali pada tahun 2022 menjadi 0,062. Tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan yaitu 0,066 dan 0,067. Kondisi ini masih jauh dari ideal karena rasio ideal guru dan

murid untuk SD/ sederajat secara nasional pada tahun 2024 adalah 1:14,84 atau 1 guru mengajar 15 orang siswa/ siswi SD/ sederajat. Untuk tingkat SMP/ sederajat pada tahun 2024, secara nasional rasio guru dan murid yaitu 1:14 atau setiap 1 guru mengajar 14 murid. Untuk mencapai rasio yang ideal maka, Pemerintah Kota Jambi perlu terus mendorong terselenggaranya peningkatan kuantitas dan kualitas guru pada periode 2025-2029.

Selain itu, kualitas infrastruktur pendidikan dari tingkat SD hingga SMP yang menjadi kewenangan kota perlu untuk ditinjau kembali agar dapat benar-benar memadai dan mendukung proses pembelajaran yang modern, berbasis teknologi dan bersifat inklusif. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pihak swasta dalam sektor pendidikan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan yang ada di wilayahnya. Saat ini angka Rata-rata Lama Sekolah dari 10,92 tahun pada tahun 2020 menjadi 11,51 tahun pada tahun 2024. Harapan Lama Sekolah Kota Jambi dari 15,1 tahun pada tahun 2020 menjadi 15,55 tahun pada tahun 2024.

Tabel 2.29

Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sumberdaya Manusia

Pusat Isu	Permasalahan
Kemiskinan dan Ketenagakerjaan	Masih Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan.
	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka.
Kualitas Kesehatan Masyarakat	Masih terdapatnya kasus stunting
	Belum optimalnya penanganan kasus TBC dan HIV/AIDS
	Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis.
	Masih rendahnya profesionalisme tenaga paramedis (bidan dan perawat) dalam memberi layanan medis kepada masyarakat
	Belum maksimalnya kepesertaan jaminan kesehatan
Kualitas Pendidikan Masyarakat	Persebaran kualitas tenaga pendidik yang belum merata
	Rasio tenaga pendidik dengan peserta didik yang masih rendah
	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan maju dan modern.

B. ASPEK EKONOMI

Tujuan utama jangka panjang transformasi ekonomi Kota Jambi, meliputi:

1. Pengembangan iptek, peningkatan inovasi, dan produktivitas ekonomi
2. Penerapan ekonomi hijau;
3. Transformasi digital;
4. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung transformasi ekonomi nasional;

Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi terutama untuk peran pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Jambi. Arah-an kebijakan, baik secara nasional maupun regional Provinsi Jambi, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) meskipun tidak secara langsung melintasi wilayah Kota Jambi, namun dapat berpengaruh terhadap perkembangan Kota Jambi. Mengingat posisi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan sekaligus area utama perdagangan dan sektor jasa.

Untuk memanfaatkan peran dan fungsi Kota Jambi tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia/tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing. Indikator ini ini kelak secara agregat akan menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi kapasitas produksi dan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, kebijakan dan program-program 5 tahun ke depan harus mendorong peningkatan ketersediaan lapangan-lapangan kerja baru. Salah satunya dengan membuka aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja di Kota Jambi sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja saat ini. Namun demikian, rendahnya daya saing kemampuan dari tenaga kerja juga menjadi tantangan yang harus segera dicari solusinya. Tujuannya untuk membuat tenaga kerja di Kota Jambi mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan *skill* yang mumpuni.

Kurangnya pendidikan dengan sistem vokasi juga untuk berperan dalam ketidaksiapan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di Kota Jambi. Akibatnya, terdapat ketidakcocokan antara spesifikasi yang dibutuhkan pasar dengan kualitas tenaga kerja yang ada yang menyebabkan ketidaksesuaian antara

kebutuhan tenaga kerja industri dengan tenaga kerja tersedia. Kedepan, Pemerintah Kota Jambi perlu menggagas tersedianya sekolah-sekolah vokasi dan menciptakan *link and match* antara sekolah-sekolah tersebut dengan kebutuhan dunia usaha.

Upaya lain yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah pemberdayaan UMKM/IKM lokal. Namun demikian, daya saing dari produk UMKM/IKM lokal di pasar masih rendah. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah, kurang optimalnya penggunaan teknologi produksi, hingga kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah dalam meningkatkan produktivitas UMKM/IKM lokal. Upaya peningkatan produktivitas perlu didorong dengan penciptaan lingkungan atau ekosistem yang mendukung aktivitas kegiatan UMKM/IKM lokal seperti peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, akses modal, penyediaan pasar yang inklusif, dan sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat saat ini masih minimnya dukungan terhadap inovasi produk dan pemasaran UMKM/IKM lokal dan keterjangkauan program-program pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola dan tenaga kerja UMKM/IKM lokal masih belum optimal.

Sebagai daerah yang mempunyai sejarah kebudayaan, Kota Jambi memiliki berbagai situ/cagar budaya yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata budaya atau religi. Pengembangan objek ini tentunya akan berpotensi untuk mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru, memberikan pasar bagi industri UMKM serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk saat ini destinasi tersebut belum dikelola dengan baik.

Dari sisi dukungan eksternal dalam sektor ekonomi, peran investasi khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari luar negeri terhadap pengembangan ekonomi di Kota Jambi masih tergolong lemah. Dalam proses pembangunan ekonomi, investasi tentu memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan mempengaruhi dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut

menghasilkan *output* yang positif. Iklim investasi di Kota Jambi sebenarnya cukup kondusif dan memiliki nilai yang cukup tinggi dari sektor PMDN. Pada tahun 2023, investasi PMDN meningkat sangat signifikan hingga mencapai Rp. 1.103.057.400,00 dari sebelumnya sebesar Rp. 653.052.700.000,00 pada tahun 2022. Sayangnya, PMA di Kota Jambi belum menunjukkan nilai yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah jika dibandingkan dengan PMDN bahkan cenderung menurun. Investasi PMA tertinggi pernah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 425.925.000.000,00 sementara pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. 254.910.760.000,00. Padahal, Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB atas dasar harga berlaku yang dimiliki Kota Jambi sebesar Rp. 6.292,62 Milyar rupiah pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp. 7.867,74 Milyar rupiah.

Selain dalam hal investasi, kurangnya peran pihak swasta dalam pengembangan ekonomi di kota Jambi juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Pada dasarnya, pemerintah dan swasta memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu kondisi perekonomian suatu daerah. Dengan adanya hubungan yang saling mendukung dan berkesinambungan antara pemerintah dan swasta, maka akan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan aktivitas dan taraf ekonomi ekonomi suatu daerah. Selain dalam hal perputaran ekonomi, pihak swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan terlibat dalam pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Tabel 2.30
Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sosial dan Ekonomi

Pusat Isu	Permasalahan
Sosial Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan fungsi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi membutuhkan dukungan ketersediaan ruang yang tertata untuk perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. 2. Pembangunan pada wilayah eksternal kota, seperti: Tol Sumatera, jalan lingkar baru, dan kawasan industri dapat meningkatkan interaksi ekonomi terhadap Kota Jambi, namun juga memiliki potensi mereduksi interaksi antara pergerakan regional yang selama ini meintasi wilayah Kota Jambi.

Pusat Isu	Permasalahan
	3. Rendahnya daya saing tenaga kerja/Kurangnya Ketersediaan tenaga kerja berkualitas (Terampil)
	4. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil.
	5. Kurangnya Pendidikan Vokasi untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang terampil
	6. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
	7. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis cagar budaya dan religi
	8. Relatif masih tingginya kasus kejahatan terhadap anak
Sumber Daya Ekonomi	1. Rendahnya daya saing UMKM/IKM lokal
	2. Kurang optimalnya Tingkat penggunaan teknologi produksi oleh IKM
	3. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif
	4. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi pemasaran produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif
	5. Kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah untuk meningkatkan produktivitas IKM
	6. Belum optimalnya penataan pasar dan pedagang K5
	7. Perlunya peningkatan Pembinaan dan pelatihan pengelola dan tenaga kerja IKM
Dukungan Ekonomi	1. Masih minimnya peran investasi luar negeri terhadap pengembangan Ekonomi
	2. Masih minimnya peran pihak swasta dalam pengembangan Ekonomi

C. Infrastruktur Daerah

Ketersediaan infrastruktur daerah terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Salah satu komponen infrastruktur daerah yang perannya strategis dalam mendorong kegiatan logistik adalah jalan. Seiring peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan atas peningkatan kapasitas dan kualitas jalan juga meningkat. Persoalan utama yang dihadapi terkait jalan adalah meningkatnya trafik dari transportasi batubara di jalan kota yang menyebabkan kemacetan dan

kerusakan jalan. Selama periode 2021-2024, rasio jalan berkondisi mantap di Kota Jambi belum bertambah secara signifikan yaitu mencapai 88,83%. Selain itu, terkait transportasi publik, isu yang dihadapi adalah belum tersedianya penyediaan transportasi publik perkotaan yang terkoneksi dan terintegrasi, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Selain jaringan jalan, infrastruktur yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah infrastruktur dasar, seperti jaringan air minum dan listrik. Tahun 2024, pelayanan air minum perpipaan Kota Jambi telah mencapai 82,84%. Tahun 2020, tingkat layanan air minum perpipaan baru mencapai 70,9%. Artinya selama kurun waktu 2020-2024 terdapat peningkatan sebesar 11,94% atau rata-rata meningkat 2,98% per tahun. Masih terdapat 17,16% masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air minum perpipaan pada tahun 2024. Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan pelayanan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan kawasan perumahan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penyediaan/pengembangan pelayanan jaringan perpipaan. Pada dasarnya masih terdapat *idle capacity* air minum di Kota Jambi, namun untuk penyaluran masih terkendala oleh kondisi jaringan perpipaan di beberapa bagian wilayah merupakan jaringan lama yang tidak relevan untuk melayani penyaluran bertekanan tinggi.

Selain itu, ketersediaan jaringan perpipaan juga belum mencakup seluruh bagian wilayah kota. Oleh karena itu, pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kota Jambi ke depan, selain peningkatan jaringan pada kawasan terbangun saat ini, juga perlu peningkatan kapasitas produksi IPA dan jangkauan pelayanan terhadap kawasan-kawasan yang akan menjadi cadangan pengembangan permukiman di Kota Jambi, seperti di Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Alam Barajo.

Untuk infrastruktur jaringan energi terutama kelistrikan, kebutuhan Kota Jambi dilayani oleh pembangkit di Payo Selincah dibantu oleh PLTMG Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Jaringan listrik pada beberapa bagian wilayah masih perlu peningkatan saluran tegangan rendah untuk distribusi ke konsumen, terutama pada kawasan cadangan pengembangan permukiman di Kota Jambi

seperti di Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Alam Barajo.

Peningkatan tutupan lahan juga berdampak terhadap peningkatan *run off* yang berbanding terbalik dengan kemampuan saluran drainase yang ada pada saat ini. Masih minimnya infrastruktur sumberdaya air, menyebabkan sekitar 1.301 ha lahan permukiman perkotaan sangat rentan terhadap bencana banjir.

Tabel 2.31
Isu dan Permasalahan Infrastruktur Daerah

Pusat Isu	Permasalahan
Sistem jaringan transportasi	Sistem jaringan jalan kota yang belum terstruktur dengan baik
	Penurunan kemampuan pelayanan jalan utama kota akibat semakin tidak sebandingnya daya dukung jalan terhadap beban pergerakan
	masih terbatasnya lebar jalan interseksi untuk mengurangi beban jalan utama
	belum berhasilnya penyediaan transportasi publik perkotaan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengurangan kemacetan
	Kebutuhan peningkatan dermaga penyeberangan sungai
Jaringan Utilitas Kota	Kebutuhan pengembangan jaringan distribusi air minum dan listrik pada kawasan pengembangan permukiman kota
	Jaringan pipa gas rumah tangga belum merata
	Kebutuhan peremajaan jaringan pipa air minum eksisting
	Belum seluruh bagian wilayah kota terlayani sistem telekomunikasi jaringan tetap
	Sistem jaringan sumberdaya air yang belum memadai

D. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2021, diperkirakan

jumlah bangunan yang berada pada zona peruntukan lindung seperti sempadan sungai dan danau sebanyak 11.797 unit dan luas pelanggaran bangunan seluas 127,37 ha.

Selain itu, pola penggunaan lahan merupakan pembangkit utama pola pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. Perbedaan lokasi antar fungsi lahan atau komponen-komponen guna lahan menimbulkan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Dalam arti lain, Interaksi antar komponen pemanfaatan ruang yang paling umum tercermin dari aliran penduduk antar pusat-pusat kegiatan dalam suatu wilayah tersebut. Aliran jumlah kendaraan baik dalam bentuk tabel ataupun gambar ilustrasi, merupakan pendekatan yang paling umum dalam melihat keterkaitan antar komponen ruang. Dalam mendeskripsikan keterkaitan antar komponen ruang suatu wilayah melalui aliran pergerakan, tingkat keterkaitan dapat diamati dari besaran objek yang dialiri melalui jaringan prasarana utama dari fungsi lahan yang satu terhadap fungsi lahan yang lain. Semakin meningkat perkembangan kota, semakin meningkat pula bangkitan pergerakan, sementara prasarana jalan terlambat berkembang dan menimbulkan penurunan signifikan terhadap kemampuan pelayanan jalan-jalan utama kota, kemacetan, dan selanjutnya berdampak terhadap penurunan kualitas udara.

Beberapa permasalahan lain terkait lingkungan di Kota Jambi misalnya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 32-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukkan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung *greywater* rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah *E.Choli* yang signifikan berasal dari limbah domestik.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah domestik atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus

meningkat, seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri, serta Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien. Oleh karena itu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus menjadi perhatian Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan juga berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon serta mengoptimalkan sampah sebagai salah satu sumber energi melalui kebijakan *waste to energy*.

Tabel 2.32
Isu dan Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Ruang	Belum tersedia rencana rinci tata ruang
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian dengan rencana tata ruang
	Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan tidak sesuai daya dukung dan kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup
	Arah pengembangan perumahan yang belum terarah dengan baik
	Konflik ruang industri dengan perumahan
	Alih fungsi lahan pertanian perkotaan dan kebutuhan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
	Belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan
	Kebutuhan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk mereduksi beban pusat eksisting
	Ketersediaan RTH Publik yang belum mencapai 20%.
Lingkungan Hidup	Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukkan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung greywater rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS.
	Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon

Pusat Isu	Permasalahan
	Belum seluruh bagian kota terlayani sistem pengelolaan persampahan kota, dan potensi peningkatan timbulan sampah pada masa yang akan datang yang membutuhkan peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan mereduksi pada tingkat sumber.
	Permukiman dengan kualitas lingkungan kurang baik
	Peningkatan kerentanan bencana banjir. Dilihat pada peta sebaran kawasan rawan banjir, Kerentanan tidak lagi hanya terjadi di sekitar DAS Batanghari, melainkan juga pada sub DAS dan bahkan saluran sekunder. Kondisi ini disebabkan oleh karena semakin menurunnya bidang resapan dan meningkatnya runoff sehingga subDAS (sistem primer) dan saluran sekunder tidak lagi mampu melayani pengaliran dengan kecepatan ideal.
	Kerentanan bencana kebakaran di kawasan permukiman

E. Keuangan Daerah

Salah satu ukuran untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menghitung rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri jika proporsi PAD terhadap total pendapatan minimal sebesar 50%. Kota Jambi pada periode 2018-2022 memiliki rata-rata proporsi PAD sebesar 23,06 yang menunjukkan bahwa Kota Jambi belum mencapai kemandirian fiskal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi PAD adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, terdapat kendala dalam pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dan berkontribusi untuk meningkatkan PAD.

Kondisi sektor unggulan yang menjadi kontributor utama PAD bagi perekonomian daerah merupakan hal yang harus dijaga oleh Pemerintah, Secara langsung, Kota Jambi menjadi pusat transaksi atau penjualan komoditas perkebunan seperti Sawit dan Karet. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan dimaksud. Pemerintah perlu menyadari bahwa harga komoditas unggulan tersebut tidak hanya berpengaruh kepada PAD atau perekonomian daerah, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani secara langsung.

Tabel 2.32
Isu dan Permasalahan Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah

Pusat Isu	Permasalahan
Keuangan Daerah	Masih rendahnya kemandirian daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD
	Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah

F. Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan dalam hal Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan akar permasalahan yaitu: masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik serta kualitas layanan yang akuntabel yang belum optimal.

Tabel 2.33
Isu dan Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Kelola Pemerintahan	belum optimalnya implementasi <i>e-government</i> pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik
	belum optimalnya kualitas layanan yang akuntabel
	Belum optimalnya proses layanan percepatan perizinan

2.6.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Jambi untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Proses perumusan dan analisis isu strategis mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini, proyeksi dengan

timeline dokumen perencanaan yang disusun serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal di tingkat regional, nasional dan internasional.

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini sesuai dengan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Isu strategis dapat pula ditarik dari isu-isu yang sebelumnya belum terdeteksi namun saat ini telah menjadi bagian dari permasalahan yang perlu untuk diantisipasi dan dicarikan solusi agar tidak menambah beban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 5 tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 34
RUMUSAN ISU STRATEGIS DAERAH

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Peran dan Fungsi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Jambi	Perkembangan produktivitas ekonomi yang belum maksimal	Perkembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global	Pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target pasca pandemi dan tekanan ekonomi global	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi Provinsi Jambi yang masih sangat bergantung kepada sektor primer; • Perkembangan wilayah eksternal kota 	Peningkatan stabilitas, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem jaringan jalan kota yang belum terstruktur dengan baik; • Penurunan kemampuan pelayanan jalan utama kota akibat semakin tidak sebandingnya daya dukung jalan terhadap beban pergerakan; • masih terbatasnya lebar jalan interseksi untuk 	Perkembangan Ekonomi, Pembangunan, dan Infrastruktur	-	pengembangan pusat-pusat perkotaan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan.Pemerataan prasarana dan sarana, dan	Kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana Perkotaan Jambi	Perkembangan Ekonomi, Pembangunan, dan Infrastruktur

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	<p>mengurangi beban jalan utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum berhasilnya penyediaan transportasi publik perkotaan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengurangan kemacetan; • kualitas dan ketersediaan jaringan utilitas yang belum merata 					
<p>Ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang lebih lengkap dibandingkan daerah sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan belum signifikan; • Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka; • Prevalensi stunting dan 	<p>Peningkatan daya saing sumberdaya manusia</p>	<p>Persaingan tenaga kerja ditengah perkembangan iptek</p>	<p>Tantangan bonus demografi dan produktivitas tenaga kerja yang masih relative tertinggal</p>	<p>IPM tertinggi di Provinsi Jambi</p>	<p>Kualitras dan Daya Saing Sumberdaya Manusia</p>

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	penyakit tertentu <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pendidikan belum merata • Kepesertaan jaminan kesehatan belum optimal 					
Dukungan pembiayaan Pembangunan untuk Kota sebagai salah satu pusat utama	<ul style="list-style-type: none"> • Kerentanan terhadap bencana banjir; • Penurunan kualitas air dan udara; • Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; • Belum seluruh bagian kota terlayani sistem pengelolaan persampahan kota, dan potensi peningkatan timbulan sampah pada masa yang akan datang yang membutuhkan peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tata guna lahan; • Peningkatan kerentanan bencana banjir; • Pencemaran air dan udara; • Ketersediaan RTH publik. • Pengelolaan Pesampahan 	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	Penurunan kualitas lingkungan	Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	sarana dan manajemen pengelolaan mereduksi pada tingkat sumber.					
Kualitas aparatur dan sumberdaya digital	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kemandirian daerah; Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD; Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah; belum optimalnya implementasi <i>e-government</i> pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan public; belum optimalnya 	-	Percepatan perkembangan digital	Peningkatan tata Kelola pemerintahan	Peningkatan tata Kelola pemerintahan	Tata Kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	kualitas layanan yang akuntabel; <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya proses layanan percepatan perizinan 					

A. Peningkatan Stabilitas, Produktivitas Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan Stabilitas, Produktivitas Ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat menjadi isu strategis utama dalam pembangunan jangka menengah di Kota Jambi periode 2025-2029. Adanya kecenderungan stagnasi dalam penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada beberapa periode terakhir di Kota Jambi perlu menjadi perhatian utama dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang mampu berdampak signifikan. Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan, yakni dengan memfokuskan pada program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang perlu difokuskan adalah memberikan akses kepada aset dan modal yang produktif.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus didukung dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Jambi. Penciptaan lapangan pekerjaan harus bersifat inklusif dan diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, mendorong pertumbuhan UMKM juga dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dukungan terhadap UMKM perlu menjadi perhatian terutama dukungan terkait permodalan, akses pasar, pemasaran secara digital, serta literasi keuangan.

B. Infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pendukung konektivitas mutlak diperlukan. Daerah yang memiliki konektivitas yang baik dapat menurunkan biaya logistik khususnya yang tersambung pada kawasan-kawasan pusat industri. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas pendukung aktivitas ekonomi seperti peningkatan kualitas jalan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya logistik. Terlebih lagi karena sektor transportasi dan

perdagangan menjadi sektor terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Jambi.

Melihat kondisi saat ini, perkembangan kota semakin berdampak terhadap penurunan kemampuan pelayanan jalan utama. Sistem jaringan jalan yang belum terstruktur dengan baik untuk menghubungkan secara efektif pusat-pusat kegiatan, serta peluang peningkatan dimensi yang terbatas untuk menampung pergerakan yang semakin meningkat perlu menjadi perhatian untuk pengembangan jalan-jalan interseksi, pembangunan konektivitas baru, ataupun penataan persimpangan sebidang. Secara umum, dalam lingkup regional sudah ada rencana pembangunan jalan tol yang beberapa simpulnya berada di *hinterland* Kota Jambi, dan masih dalam lingkup kebijakan regional sudah ada rencana pembangunan *outer ring road* baru di wilayah kabupaten berbatasan, sehingga pergerakan, terutama untuk moda angkut barang akan berpindah dari jalan lingkar kota saat ini. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya pemanfaatan potensi ekonomi akibat adanya rencana Pembangunan *outer ring road* yang baru serta jalan Tol Trans Sumatera. Kondisi terkini Jalan Tol yang sedang dalam proses pembangunan tidak langsung melewati wilayah administrasi pemerintahan Kota Jambi. Tantangannya, Pemerintah Kota Jambi harus mampu menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kuantitas jalan penghubung yang menghubungkan jalan Tol kepada pusat-pusat industri di Kota Jambi. Selain itu, penurunan kualitas jalan di dalam kota harus menjadi perhatian serius demi mampu mengoptimalkan peluang peningkatan aktivitas ekonomi dari keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah dikemukakan sebelumnya.

Selain prasarana utama tersebut, aspek infrastruktur lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam mempersiapkan perkembangan Kota Jambi ke depan adalah kebutuhan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan yang sejauh ini belum terpenuhi seluruhnya dan juga upaya menyiapkan pemenuhan pelayanan terhadap kawasan-kawasan perkembangan baru di Kota Jambi.

C. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dapat menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM masih menjadi isu strategis dalam pembangunan jangka panjang daerah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak dan kesetaraan gender. Salah satu parameter yang bisa digunakan dalam mengukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Isu utama yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM adalah peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penghapusan kasus gizi buruk, optimalisasi pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta optimalisasi penanganan PMKS di luar panti.

D. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan hal yang krusial bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global. Kebijakan pembangunan sedapatnya menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlangsungan kualitas lingkungan kota. Kawasan berkarakteristik perkotaan memiliki kecenderungan perkembangan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin pesat perkembangan kota, akan semakin tinggi dampak negatifnya terhadap kualitas lingkungan hidup di kota tersebut.

Oleh karena itu, selain memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan nasional, Isu terkait tata ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu strategis yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap daerah dan masyarakat. Rumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian ruang kota menjadi tantangan bagi kedepan, agar pemerintah kota dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi serta memenuhi hak masyarakat akan ruang kota yang nyaman dan layak huni.

E. Kualitas pelayanan publik dan praktik *Good Corporate Governance* dalam Pemerintahan Daerah.

Mengikuti arahan KemenpanRB dalam agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* atau tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan dan perbaikan infrastruktur pelayanan publik yang sesuai dengan *e-governance*.

Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Di samping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur juga belum merata. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Sebagai pendukung, fasilitas sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan.

B A B III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dirumuskan berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode 2025-2029 yang diselaraskan dengan kerangka pembangunan jangka panjang Kota Jambi, serta dinamika pembangunan berupa permasalahan dan tantangan-tantangan yang masih dan akan dihadapi Kota Jambi pada periode pembangunan jangka menengah kedepan.

3.1 VISI

Visi merupakan cita-cita umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan rujukan utama dalam perumusan arah pembangunan. Visi dirumuskan untuk mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2025-2029 adalah :

**Mewujudkan Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Bersih,
Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif Dan Sejahtera**

Rumusan cita-cita yang ingin diwujudkan dari visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

BERSIH, mengandung makna mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan energi terbarukan dengan terus memperkuat sistem perkotaan yang merata dan terintegrasi;

AMAN, mengandung makna menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman dalam mendukung kehidupan masyarakat

HARMONIS, mengandung makna menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan generasi mendatang;

AGAMIS, mengandung makna meningkatkan kualitas akhlak masyarakat dan memperkuat budaya serta kearifan lokal sebagai identitas, daya tarik, dan potensi wisata;

INOVATIF, mengandung makna memperkuat kreatifitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan informasi dalam meningkatkan pelayanan serta perwujudan kota pintar melalui pemerintahan yang baik; dan

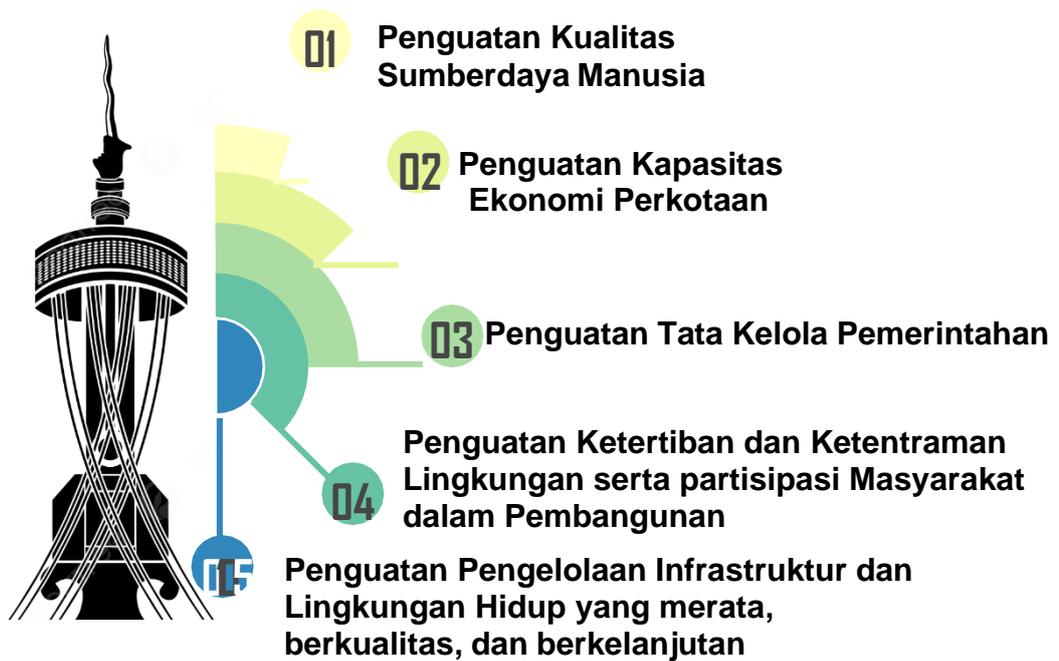
SEJAHTERA, mengandung makna mewujudkan SDM yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai melalui agenda pembangunan yang akan dilaksanakan.

Misi pembangunan jangka menengah dalam upaya mewujudkan pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi

Dalam mewujudkan misi, dibutuhkan upaya yang fokus, berkesinambungan, dan selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan pola penyelenggaraan pembangunan kota yang mampu mensinergikan setiap elemen pembangunan dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada, sehingga dapat menjadi kunci tercapainya visi pembangunan Kota Jambi kedepan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

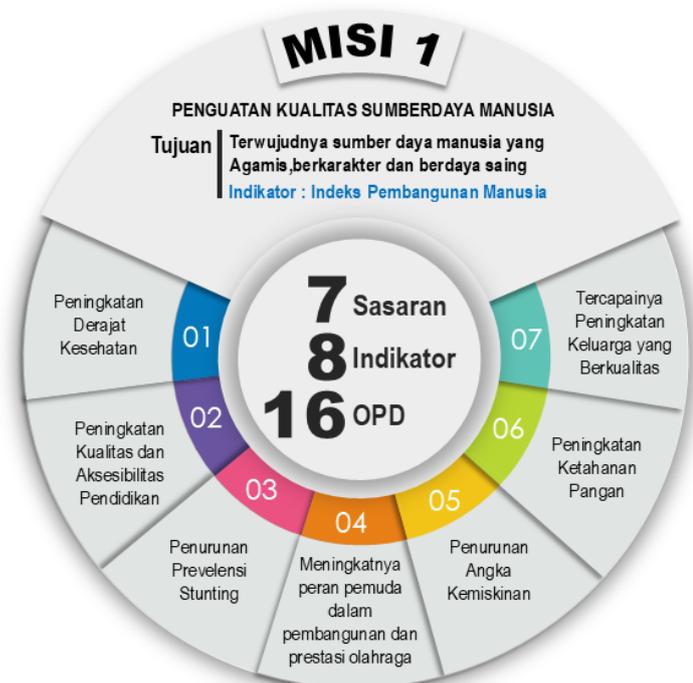
Tujuan merupakan fokus kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam dalam setiap misi pembungan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran merupakan rumusan pengejawantahan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Misi ke-1: Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Penguatan kualitas sumberdaya manusia merupakan dasar dalam mewujudkan transformasi sosial. Misi ke-1 ini bertujuan mewujudkan peningkatan sumberdaya manusia yang agamis, berkarakter, dan berdaya saing.

Aspek penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender dan sosial. Selain itu, aspek religius menjadi aspek yang penting karena dengan moral dan akhlak yang mulia agar tercipta karakter masyarakat yang unggul dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, kualitas sumberdaya manusia ditingkatkan dengan beberapa sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan derajat kesehatan;
- b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- c. Penurunan prevalensi stunting;
- d. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga;
- e. Penurunan angka kemiskinan;
- f. Peningkatan ketahanan pangan; dan
- g. Tercapainya peningkatan keluarga yang berkualitas.



Misi ke-2: Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Dalam mendukung perwujudan transformasi ekonomi, penguatan kapasitas ekonomi dilakukan terhadap sektor-sektor ekonomi utama kota perkotaan yang melibatkan seluruh skala ekonomi dengan regulasi dan teknologi yang adaptif. Penguatan ekonomi juga diorientasikan terhadap pengembangan pusat-pusat ekonomi yang hierarkis serta memulai pengembangan ekonomi hijau. Penguatan kapasitas ekonomi kota diharapkan dapat menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. dan berkeadilan dalam distribusi dan partisipasi dalam proses pembangunan serta hasil-hasil pembangunan. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan Kota Jambi yang berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi serta ketidaksetaraan sosial dalam konteks tujuan utama berupa *terjaganya pertumbuhan ekonomi* dengan beberapa sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier;
- b. Peningkatan Realisasi Investasi;
- c. Terkendalinya Investasi;
- d. Penurunan Gini Ratio;
- e. Penurunan Pengangguran; dan
- f. Peningkatan Daya Saing Daerah.



Misi ke-3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dinamika pembangunan kota dihadapkan dengan perkembangan jumlah dan struktur penduduk, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, perubahan iklim dan kerugian akibat kerentangan terhadap bencana, dinamika politik dan dinamika ekonomi regional dan nasional membutuhkan transformasi tata kelola pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan dan berbagai tantangan pada masa yang akan datang melalui regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif pula. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola dengan mendorong terwujudnya tujuan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK; dan
- b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.



Misi ke-4: Penguatan Ketertiban dan Ketenteraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terjaga sebagai salah satu pendukung peningkatan ekonomi makro kota. Untuk itu, melalui misi ini pembangunan diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan meningkatnya ketertiban, ketenteraman umum, perlindungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat; dan
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.



Misi ke- 5: Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kualitas sarana, prasarana, dan utilitas juga dapat mempengaruhi keterwujudan misi untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan di Kota Jambi. Saat ini Kota Jambi dihadapkan dengan berbagai permasalahan inefisiensi dan ketercukupan sarana dan prasarana, dimasa yang akan datang kota akan dihadapkan dengan dinamika pertumbuhan penduduk,

peningkatan pergerakan sosial dan ekonomi yang membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum. selain itu, Kota Jambi juga menghadapi penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Dalam menjaga konsistensi peran dan fungsi sebagai pusat utama Provinsi Jambi serta meningkatkan daya saing sebagai tujuan investasi sektor sekunder dan tersier, diperlukan pembangunan yang berorientasi untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam kerangka tujuan utama untuk terwujudnya aksesibilitas dan kapabilitas utilitas perkotaan dan lingkungan hidup berkelanjutan, dengan sasaran utama Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berketahanan iklim.

MISI 5

PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MERATA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN

Tujuan | Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Sasaran | Peningkatan kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim



Tabel 3.1.
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi
Visi: Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Agamis, Berkarakter dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia			Nilai	81,77	81,93	82,24	82,54	82,98	83,50	83,62	
				Peningkatan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	Nilai	75,12	75,33	75,56	75,81	76,06	76,32	76,59	DINKES
				Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,55	15,56	15,69	15,83	15,96	16,10	16,24	DISDIK DKP
					Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,51	11,52	11,64	11,77	11,90	12,03	12,16	DISDIK
				Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Prevalensi Stunting	Persen	10,3	9,38	8,75	8,13	8,00	6,88	6,50	DINKES
				Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	58,53	59	59,5	60	60,5	61	61,50	DISPORA
				Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,73	7,50-7,25	7,19-7,00	6,88-6,75	6,56-6,50	6,25-5,75	5,75-5,50	DINSOS
				Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	85,5	86	86,52	87,04	87,56	88,08	88,6	DPKP
				Tercapainya Peningkatan Keluarga yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Nilai	66,84	68	69,1	70,2	71,1	72,1	73	DPPKB
2	Penguatan Kapasitas Ekonomi	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	4,98	5,35 - 5,50	5,75 - 6,25	6,26 - 6,29	6,30 - 6,35	6,36 - 6,46	6,65 - 6,70	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perkotaan													
				Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier	Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB	persen	78,56	79,03	79,43	79,78	80,10	80,38	80,62	DPK
				Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi (milyar)	Nilai	1.800	1.903	2.001	2.108	2.212	2.317	2.424	DPMPTSP
				Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	Persen	1,16	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	1,50-3,50	DPP
				Penurunan Gini Ratio	Gini Ratio	Nilai	0,395	0,320 - 0,330	0,315 - 0,325	0,310 - 0,320	0,308 - 0,315	0,306 - 0,310	0,300 - 0,305	DTKKUKM
				Penurunan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,38	7,20	6,95	6,88	6,63	6,50	6,25	DTKKUKM
				Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,04	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,31	BAPPEDA
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi				73,43							
				Meningkatnya Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	Indeks Pemerintah Digital	Nilai	NA	NA	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	DISKOM INFO
					Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	74,78	77	78	78,4	78,6	78,8	79	BKPSDMD
					Nilai SAKIP	Skor	68,64	69,14	69,74	70,54	71,44	72,44	73,56	BAG ORGANISASI

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai	3,239	3,264	3,289	3,314	3,339	3,364	3,389	INSPEKTORAT
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	3,96	3,97	3,98	4	4	4	4	BAG ORGANISASI
					Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67,71	67,75	68,00	68,25	68,50	69,00	69,25	BAPPEDA
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	71,74	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	BPKAD
					Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Miliar	455,25	606,28	640,27	669,17	679,51	701,43	711,92	BPPRD
4	Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Harmoni Indonesia			Nilai	NA	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	
				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	65	70	73	76	80	85	90	SATPOL PP, DISDAMKAR, BPBD
					Indeks Harmoni Religius	Nilai	N/A	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	KESBANGPOL
				Meningkatnya Pemberdayaan	Persentase Partisipasi	Persen	90	90,5	100	100	100	100	100	DPPMPA, KECAMATA

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Masyarakat dalam Pembangunan									N
					Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,18	95,33	95,48	95,64	95,79	95,92	96,18	DPMPPA
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	70	70,5	71	72	72,5	73	73,5	DPMPPA
5	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Indeks	84,9	86,5	88	89	90	91,5	92,5	
				Peningkatan kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kepuasan Kinerja layanan Pekerjaan Umum	Nilai	6,85	7,04	7,18	7,30	7,40	7,52	7,63	DPUPR
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	65,15	58,78	58,99	59,20	59,42	59,63		DLH
					Indeks Kepuasan Kinerja layanan Perumahan dan Permukiman	Nilai	8,49	8,67	8,72	8,76	8,81	8,85	8,90	DLH
					Porsi EBT dalam Bauran Energi	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BAG PEREKONOMIAN

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR	OPD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					Tingkat Pelayanan Jalan	Nilai	NA	0,57 (C)	0,56 (C)	0,54 (C)	0,5 (C)	0,44 (C)	0,40 (B)	DISHUB	

3.4 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan dan sasaran menuju perwujudan visi dan misi pembangunan daerah. Kondisi ini dikonstruksikan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, strategi yang dirumuskan merupakan pengejawantahan sasaran pembangunan yang didukung dengan arah kebijakan yang tepat untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merupakan pengikat langkah penyelenggaraan pembangunan yang komprehensif, konsisten baik secara vertikal maupun horizontal, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah menjelaskan bahwa strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam manajemen setiap program pembangunan yang berkaitan dengan rumusan langkah ataupun tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam menjaga implementasi rencana pembangunan yang efektif dan efisien, strategi pembangunan selanjutnya dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan merupakan bentuk yang lebih konkrit dalam memberi panduan/pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam koridor mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

3.4.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah dirumuskan sebagai gambaran tekad yang kuat yang kuat untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, harmonis, Agamis, dan Sejahtera melalui 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi Tahun 2025-2029, maka arah kebijakan pembangunan Kota Jambi 5 (lima) tahun mendatang, diuraikan sebagai berikut:

- A. Misi Pertama : Penguatan kualitas sumberdaya manusia diselenggarakan dengan arah kebijakan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, meningkatkan kemampuan ekonomi

masyarakat miskin agar lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas individu dalam keluarga.

- B. Misi Kedua: Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan diselenggarakan dengan arah kebijakan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang sejalan dengan sektor-sektor ekonomi dominan di Kota Jambi.
- C. Misi Ketiga: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, diselenggarakan dengan arah kebijakan menguatkan kapasitas aparatur, pengembangan teknologi, untuk mendapatkan peningkatan kinerja pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.
- D. Misi Keempat: Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Serta Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan diselenggarakan dengan arah kebijakan yang mencakup penguatan kolaborasi penegakan hukum dengan stakeholders, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat, upaya advokasi peningkatan kualitas keluarga, dan menekan ketimpangan gender.
- E. Misi Kelima: Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan diselenggarakan dengan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan dan kualitas kinerja infrastruktur kota untuk mendukung ekonomi dan sosial yang sekaligus adaptif terhadap perubahan iklim.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Jambi
Tahun 2025-2029

VISI:
Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang
Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia		
Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Agamis, Berkarakter, dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan kualitas layanan kesehatan dasar 2. Meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak
	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan; 3. Pembangunan sarana pendidikan baru kawasan pengembangan permukiman kota di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Paal Merah, dan Kecamatan Jambi Selatan. 4. Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung minat membaca bagi siswa 5. Pelibatan peran komunitas dalam mendorong peningkatan minat membaca dan kemampuan literasi secara menyeluruh
	Penurunan Prevalensi Stunting	Meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Mengembangkan organisasi kepemudaan, fasilitas olahraga, dan peran pemerintah dalam kegiatan kejuaraan
	Penurunan Angka Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas program perlindungan sosial untuk menekan pengeluaran keluarga miskin; 2. Meningkatkan akses pekerjaan dan berusaha bagi penyandang disabilitas.
	Peningkatan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Peningkatan pengawasan rantai pasok dan harga pangan
	Tercapainya Peningkatan Keluarga yang Berkualitas	Meningkatkan sumberdaya aparatur dalam advokasi untuk ketahanan dan kualitas keluarga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan		
Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan revitalisasi kawasan ekonomi eksiting 2. Pengembangan pusat ekonomi baru di kawasan subpelayanan kota;
	Peningkatan Realisasi Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan regulasi insentif investasi daerah 2. Meningkatkan promosi potensi investasi kota 3. Penyiapan RDTR untuk mendukung percepatan perizinan berusaha
	Terkendalinya Inflasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung akurasi dan aktualisasi data ketersediaan bahan pokok; 2. Penguatan monitoring perkembangan harga-harga 3. Penguatan kerjasama dengan daerah produsen
	Penurunan Gini Ratio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas UKM dan UMKM; 2. Pemberdayaan koperasi melalui pelatihan manajerial untuk pengelola koperasi, penguatan sistem pembiayaan dan permodalan koperasi, kolaborasi antar koperasi dan UMKM, digitalisasi koperasi
	Penurunan Pengangguran	Pengembangan pelatihan pengembangan produk UMKM/UKM lokal
	Peningkatan Daya Saing Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan kebijakan yang mendorong pemanfaatan IPTEK yang adaptif dan inklusif untuk mengoptimalkan produktivitas sumber daya ekonomi wilayah 2. Menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan potensi wisata daerah, pelaksanaan event dan sektor MICE serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian wilayah 3. Mengembangkan kawasan ekonomi kreatif dan fasilitasi pengimplementasiannya 4. Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung Pengembangan, kerjasama antar lembaga/institusi untuk pembangunan dan pemantapan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		infrastruktur teknologi digital yang didukung penyediaan SDM untuk pengembangan transformasi digital dalam kerangka penciptaan dan perluasan aktivitas ekonomi yang berkeadilan serta membuka akses terhadap bantuan pembinaan dan modal untuk pengembangan ekonomi digital
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkannya Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan infrastruktur TIK; 2. Peningkatan kualitas layanan Mall Pelayanan Publik; 3. Peningkatan sosialisasi sistem pelayanan publik berbasis Online 4. Peningkatan kinerja layanan kecamatan dan kelurahan
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan dukungan pemanfaatan teknologi mutakhir dan kualitas sumberdaya manusia; 2. Diversifikasi sumber-sumber pendapatan baru
Misi 4: Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		
Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kolaborasi penegakan hukum dengan <i>stakeholders</i>; 2. Meningkatkan kegiatan pembinaan pemuda 3. Mendorong peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan perumusan kebijakan pembangunan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan advokasi, dan edukasi kesetaraan gender; 2. Meningkatkan sumberdaya aparatur dalam advokasi untuk perlindungan perempuan dan anak
Misi 5: Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan		
Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana rinci tata ruang Kota Jambi 2. Peningkatan pengadaan lahan untuk RTH Taman dan Perluasan Hutan Kota 3. Perlindungan dan revitalisasi sempadan sungai 4. Peningkatan pemantauan dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p data-bbox="1023 248 1378 304">pengendalian kualitas air dan udara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="986 315 1390 344">5. Peningkatan ruas jalan utama; <li data-bbox="986 353 1433 506">6. Pembangunan jalan interseksi baru untuk mengurangi beban jalan utama dan mengembangkan aksesibilitas Kawasan permukiman baru; <li data-bbox="986 515 1369 607">7. Penataan pesimpangan, dan peningkatan infrastruktur pendukung jalan <li data-bbox="986 616 1417 645">8. Pengembangan Angkutan Publik <li data-bbox="986 654 1422 710">9. Rehabilitasi jaringan distribusi air minum <li data-bbox="986 719 1437 810">10. Pengembangan jaringan distribusi air minum untuk kawasan pengembangan permukiman kota <li data-bbox="986 819 1410 972">11. Peningkatan kinerja IPA Talang Gulo dan Penyediaan lahan dan pembangunan prasarana pengolahan sampah di tingkat sumber <li data-bbox="986 981 1417 1037">12. Meningkatkan jaringan pipa IPAL Skala Kota <li data-bbox="986 1046 1337 1137">13. Penyediaan lahan dan pembangunan IPAL Skala Permukiman <li data-bbox="986 1146 1331 1176">14. Pemutakhiran data RTLH <li data-bbox="986 1184 1394 1276">15. Peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pemenuhan kebutuhan RTLH <li data-bbox="986 1285 1422 1415">16. Normalisasi sistem drainase primer dan sekunder, dan pembangunan sistem pengendali banjir

Tujuan dan sasaran yang telah diturunkan kedalam beberapa strategi pembangunan dilanjutkan dengan perumusan program-program pembangunan daerah. Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah merencanakan beberapa program prioritas, dan didalam RPJMD ini dirumuskan kembali berikut dengan pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab setiap program prioritas dimaksud.

3.4.2 KEBIJAKAN KEWILAYAHAN KOTA JAMBI

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kota Jambi diarahkan untuk memperkuat peran Kota Jambi sebagai **pusat pertumbuhan utama Provinsi Jambi**, yang berfungsi sebagai simpul pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan tinggi, industri ringan, dan transportasi regional. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi menjadi lokus strategis dalam pengembangan kawasan perkotaan terpadu Jambi–Muaro Jambi serta menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah tengah Provinsi Jambi.

Arah pembangunan kewilayahan Kota Jambi difokuskan pada **penguatan daya saing perkotaan, penataan ruang yang berkelanjutan, serta pemerataan kualitas layanan publik antar-kecamatan**. Kebijakan kewilayahan Kota Jambi disinergikan dengan arah pengembangan kewilayahan Provinsi Jambi yang menempatkan Kota Jambi sebagai **inti Kawasan Perkotaan Jambi–Muaro Jambi**. Wilayah ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan layanan dasar yang menjangkau kabupaten sekitarnya.

Pembangunan kawasan perkotaan diarahkan pada **peningkatan kualitas infrastruktur dasar**, seperti sistem penyediaan air minum regional (SPAM), drainase dan pengendalian banjir, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, dan pekerja produktif. Upaya ini dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan **ruang terbuka hijau perkotaan** dan revitalisasi kawasan perairan seperti **Danau Sipin** untuk memperkuat fungsi ekologi dan pariwisata kota.

Secara kewilayahan, pengembangan Kota Jambi dibagi berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan:

- **Kawasan pusat kota (Telanaipura, Jambi Timur, dan Pasar Jambi)**

diarahkan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta pengembangan pendidikan tinggi dan kesehatan rujukan provinsi;

- **Kawasan penyangga (Alam Barajo, Danau Sipin, Jambi Selatan, dan Paal Merah)** difokuskan pada pengendalian banjir, penataan permukiman, pengembangan perumahan layak, serta penyediaan ruang terbuka hijau;
- **Kawasan penggerak ekonomi (Kotabaru dan Jelutung)** difokuskan pada pengembangan pusat industri kecil dan menengah, serta sentra perdagangan modern;
- **Kawasan tepi sungai (Danau Teluk dan Pelayangan)** diarahkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata budaya dan sejarah yang terintegrasi dengan Situs Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi.

Selain itu, arah pembangunan kewilayahan Kota Jambi juga menekankan penguatan **ekonomi kreatif dan industri halal** sebagai bagian dari pengembangan koridor ekonomi Jambi–Muaro Jambi. Peningkatan daya saing lokal dilakukan melalui digitalisasi UMKM, penguatan kapasitas pelaku usaha kreatif, serta promosi produk unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.

3.4.3 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

A. Pentahapan Pembangunan Daerah

Kerangka tahapan pembangunan Kota Jambi 5 (lima) tahun kedepan harus konsisten dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Jambi tahap I. Tahap pertama memprioritaskan penguatan fondasi transformasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Transformasi sosial dititikberatkan untuk peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial;
- b) Transformasi ekonomi dititikberatkan kepada pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan iptek, sektor perdagangan,

jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau;

- c) Transformasi tata kelola, arah kebijakan didorong untuk memperbaiki kelembagaan perangkat daerah, kualitas ASN, serta upaya peningkatan pendapatan daerah;
- d) Peningkatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum dengan pembahuran regulasi hukum daerah, peningkatan kolaborasi lintas instansi penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum ditengah heterogenitas perkotaan;
- e) Penguatan kebijakan untuk tujuan pelestarian kebudayaan;
- f) Peningkatan regulasi penyelenggaraan lingkungan hidup kota, SDM pengelola lingkungan, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup;
- g) Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dan energi;
- h) Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalahan utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat;
- i) Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak; dan
- j) Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Penyelarasan Arah Kebijakan Tahap I RPJPD
dengan Sasaran RPJMD 2025-2029

NO	ARAH KEBIJAKAN TAHAP I RPJPD	SASARAN RPJMD 2025-2029
1	Peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat; • Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan • Penurunan Prevalensi Stunting • Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga • Penurunan Angka Kemiskinan; • Peningkatan Ketahanan Pangan • Meningkatnya kualitas keluarga
2	Pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan iptek, sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pertumbuhan sektor tersier • Peningkatan realisasi investasi • Terkendalinya Inflasi • Penurunan Gini Ratio • Penurunan Pengangguran • Peningkatan Daya Saing Daerah
3	Memperbaiki kelembagaan perangkat daerah, kualitas ASN, serta upaya peningkatan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pemerintah dan pelayanan publik berbasis TIK • Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Pembahuran regulasi hukum daerah, peningkatan kolaborasi lintas instansi penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat Dalam menciptakan ketertiban umum ditengah heterogenitas perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat • Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Penguatan kebijakan untuk tujuan pelestarian kebudayaan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
6	Peningkatan regulasi penyelenggaraan lingkungan hidup kota, SDM pengelola lingkungan, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
7	Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dan energi	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
8	Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalahan utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
9	Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim
10	Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah	Meningkatnya kinerja layanan Infrastruktur Perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim

Tabel 3.4
Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Jambi 2025-2029



B. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan Kota Jambi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi Tahun 2025-2030 merupakan program-program prioritas yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang selanjutnya disinkronkan dengan program nomenklatur perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.5
Program Prioritas RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2030

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
VISI: Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera						
Misi 1: Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu(AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang kesehatan	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia	
		Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD • Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) • Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat 	Program pengelolaan pendidikan	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal /Kesetaraan	Program Pendidikan Tenaga Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		Penurunan Prevalensi Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita	Program Pemenuhan UpayaKesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya PeranPemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Tercapainya Peningkatan Keluargayang Berkualitas	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan KeluargaSejahtera (KS)	Persentase keluargayang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	
Misi 2: Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier	Meningkatnya bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program "KOTA TANGGUH" Penataan kota yang kompak, inklusif dan taat aturan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yangmemiliki kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					danPerlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang dtingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Pedagangan	
		Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kemudahan Investasi Realisasi total terhadap target investasi 	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinventasi	Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinventasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Terkendalnya Inflasi	Meningkatnya kelancaran distribusidan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Penurunan Gini Ratio				
		Penurunan Pengangguran	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke informal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					Usaha Mikro(UMKM)	
		Peningkatan Daya Saing Daerah				
Misi 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya tatakelola organisasi pemerintah daerah	Indeks kematangan organisasi	Program Penataan Organisasi	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tatakelola anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru dialokasikan melalui TKD Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik 	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tatakelola perbendaharaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar Persentase penurunan SILPA 		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Misi 4: Penguatan Ketertiban dan Ketentraman	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum,	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	bermasyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak				
Misi 5: Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya Hasil TURBINLAK Serta kinerja Fungsi dan Manfaat Pada Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai Indeks Kinerja Hasil Penilaian Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi terhadap perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian.
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan status Kota
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Drainase kewenangan Pemerintah Kota
			Meningkatnya kualitas system drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap system penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan rumahtangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik	Program Keanekaragaman Hayati	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Air • Indeks Kualitas Udara Intensitas GRK	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	

Sebagai wujud upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dilaksanakan program kerja prioritas yang juga merupakan janji Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri dari 11 (sebelas) program kerja prioritas, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Program Kerja Prioritas

NO	PROGRAM KERJA PRIORITAS	DESKRIPSI	PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	KARTU BAHAGIA	Pembangunan sistem aplikasi "KARTU BAHAGIA" yang terintegrasi (Bantuan biaya Pendidikan, Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial
2	BANK HARKAT	(Bantuan kelompok usaha masyarakat) Menciptakan ekosistem kelompok usaha yang kuat di tingkat komunitas untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM 	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM
3	KAMPUNG BAHAGIA	Mewujudkan lingkungan yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan RT, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi berazaskan kegotongroyongan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, dan Anak
4	KOTA TANGGUH	Penataan ruang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) serta peningkatan infrastruktur, sarana prasarana dan utilitas Kota Jambi, Pengurangan risiko dan dampak bencana,	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengelolaan Sumberdaya Air • Program Pengelolaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR • Dinas Lingkungan Hidup • Pol PP
		Peningkatan Trantibum, Peningkatan PAD serta Stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan 	

NO	PROGRAM KERJA PRIORITAS	DESKRIPSI	PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Sistem Drainase • Program pengelolaan Persampahan • Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
5	APEL KOTA	(Aparatur yang melayani, kompetendan berintegritas) Tata kelola pemerintahan, Restrukturisasi serta <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	SETDA
6	CALL CENTER BAHAGIA	(Respon cepat pengaduan masyarakat yang terintegrasi) Penanganan pengaduan masyarakat yang responsif dan terintegrasi dengan memanfaatkan IT	• Program Penanggulangan Bencana • Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran • Program Rehabilitasi Sosial	• BPBD • Dinas Pemadam Kebakaran • Dinas Sosial
7	BALAP	(Bahagia Berintegritas Layanan Anti Pungli) Menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/kota	SETDA
8	BAHAGIA BERBUDAYA	Pelestarian potensia set budaya dan sejarah benda dan tak benda (<i>Tangible & Intangible</i>) serta memberi ruang yang luas bagi tumbuh dan berkembangnya budaya dan etnik nusantara dan dunia untuk mendorong perkembangan pariwisata daerah	• Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata
9	LANSIA BAHAGIA	Memastikan bahwa para lanjut usia (lansia) dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, nyaman, dan berkualitas	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
10	RUMEL	Menciptakan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing, serta mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM KERJA PRIORITAS	DESKRIPSI	PROGRAM NOMENKLATUR	OPD PENANGGUNG JAWAB
		pembangunan daerah		
11	BALIKAT	(Balai Latihan Kerja tematik) Memberikan pelatihan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri serta dunia kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM

Tabel 3.7
ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA JAMBI 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	Penguatan Kualitas Sumber daya Manusia	Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Agamis, Berkarakter, dan Berdaya Saing	meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin agar lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas individu dalam keluarga	
2	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kota yang merata dan berkelanjutan	meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang sejalan dengan sektor-sektor ekonomi dominan di Kota Jambi dengan Penyiapan, penataan ruang pusat-pusat ekonomi dan budaya kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam	
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 2. Peningkatan kerjasama pelatihan penyelenggaraan pembangunan bagi ASN 3. Meningkatkan infrastruktur dan SDM pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan 	
4	Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.	Meningkatnya Ketertiban, Ketentraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Mendorong peningkatan kolaborasi penciptaan pengamanan lingkungan dengan instansi penegak hukum.	
			Meningkatkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui Siskamling dan platform digital pelaporan secara <i>online</i>	
			Meningkatkan kegiatan pendidikan perencanaan keluarga, pengasuhan anak, pembinaan remaja, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga	

NO	MISI	TUJUAN	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
			Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan dan politik.	
5	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pemenuhan kebutuhan dan kualitas kinerja infrastruktur kota untuk mendukung ekonomi dan sosial yang sekaligus adaptif terhadap perubahan iklim	

B A B IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, selanjutnya diimplementasikan kedalam rencana yang lebih riil dalam bentuk program pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah. Program pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah tersebut, juga dirumuskan dengan mempertimbangkan kapasitas riil fiskal daerah. Kondisi ini dimaksudkan agar penetapan target dan besaran anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan dapat lebih realistis terlaksana karena didukung dengan kesediaan kemampuan/kapasitas fiskal daerah.

Rumusan indikasi program perangkat daerah disertai dengan besaran pendanaan yang dibutuhkan, dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selain itu juga dengan memaksimalkan potensi atau peluang untuk sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari non APBD.

Penyajian program dan anggaran indikatif, selain disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan, juga berbasis pada nomenklatur program berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga RPJMD dapat lebih jelas dalam menjadi perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Program-program perangkat daerah tersebut disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program Peringkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN														
Program Pengelolaan Pendidikan														DISDIK
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	90	92	76.452.551.000	94	107.489.897.000	96	114.739.066.000	98	123.072.125.000	100	129.707.474.500		
Program Pengembangan Kurikulum														DISDIK
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan				55.000.000		60.500.000		66.300.000		72.930.000		80.223.000		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan														DISDIK
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan				90.500.000		99.550.000		107.000.000		119.615.000		131.576.500		
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan														DISDIK
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan				105.750.000		116.500.000		125.500.000		145.000.000		159.500.000		
URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat														DINKES
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat				107.314.026.000		127.800.000.000			131.000.000.000		135.607.315.000		138.646.060.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan														DINKES
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan				105.000.000		300.000.000			385.000.000		420.000.000		450.000.000	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman														DINKES
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman				85.000.000		120.000.000			150.000.000		185.000.000		220.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														DINKES
Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan				245.000.000		300.000.000			350.000.000		385.000.000		425.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														DPUPR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi				39.950.000.000		43.200.000.000		43.000.000.000		44.350.000.000		45.850.000.000	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													DPUPR
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	82,27	84,27	7.650.000.000	86,27	9.550.000.000	88,27	9.680.000.000	90,27	9.900.000.000	92,00	10.000.000.000	
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional													DPUPR
Meningkatnya layanan persampahan regional				1.820.000.000		2.520.000.000		3.660.000.000		3.720.000.000		3.920.000.000	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah													DPUPR
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				8.930.000.000		11.320.000.000		11.420.000.000		12.450.000.000		13.480.000.000	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase													DPUPR
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan				8.950.000.000		10.600.000.000		11.000.000.000		11.200.000.000		11.400.000.000	
Program Penataan Bangunan Gedung													DPUPR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas bangunan gedung				52.850.000.000		56.700.000.000		57.900.000.000		59.950.000.000		60.000.000.000	
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya													DPUPR
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata				19.840.000.000		21.500.000.000		22.300.000.000		22.700.000.000		23.000.000.000	
Program Penyelenggaraan Jalan													DPUPR
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman				104.350.000.000		114.750.000.000		115.395.000.000		115.500.000.000		115.900.000.000	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi													DPUPR
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi				1.145.000.000		1.290.000.000		1.310.000.000		1.320.000.000		1.340.000.000	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang													DPUPR
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang				1.110.000.000		1.182.000.000		1.314.000.000		1.325.000.000		1.450.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Program Pengembangan Perumahan													DPRKP
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	83	84	427.686.295	85	444.070.610	86	444.070.610	87	450.952.022	88	457.971.063	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
program pemerintah														
Program Kawasan Permukiman													DPRKP	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	70,20	72,52	277.742.000	74,83	3.189.629.100	77,15	2.870.129.100	79,46	2.322.461.682	81,78	1.866.410.916		
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh													DPRKP	
Persentase terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	47,2	3,33	2.177.477.435	6,67	2.286.351.307	10	2.286.351.307	13,33	2.332.078.333	16,67	2.378.719.900		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)													DPRKP	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	93	94	27.191.740.395	95	27.900.588.014	96	28.937.263.014	97	30.095.453.435	98	31.138.460.062		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum													SATPOL PP	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	78	81	145.863.259	85	150.863.259	88	195.753.800	92	225.753.800	95	202.237.208		
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	55	60	578.386.018	65	615.851.944	70	675.850.500	75	825.850.500	80	825.850.500		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	50	55	206.621.974	60	181.314.805	65	195.450.900	70	225.450.900	75	375.456.000	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	18	36	195.486.539	54	239.235.193	72	254.850.800	90	284.850.800	100	284.850.800	
Program Penanggulangan Bencana													
				3.000.000.000		3.269.868.000		3.249.333.000		3.356.390.000		3.421.382.000	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran													DISDAMKAR
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	735.220.348	100	803.742.383	100	887.816.621	100	983.998.284	100	1.087.898.111	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	5.138.778.360	100	6.698.601.690	100	6.000.911.285	100	6.106.217.036	100	5.764.608.809	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
Program Pemberdayaan Sosial													DINSOS
Meningkatnya pemberdayaan sosial				1.357.950.000		1.388.951.000		1.428.200.000		1.455.700.000		1.489.200.000	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan													DINSOS

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya layanan penangangan warga negara migran korban tindak kekerasan				40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Program Rehabilitasi Sosial													DINSOS
Meningkatnya rehabilitasi sosial				1.307.690.000		1.407.500.000		1.438.000.000		1.373.500.000		1.380.500.000	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial													DINSOS
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial				1.520.950.000		1.987.340.000		2.013.503.000		2.023.182.000		2.028.500.000	
Program Penanganan Bencana													DINSOS
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana				502.450.000		557.825.000		595.625.000		560.000.000		610.000.000	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan													DINSOS
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
Program Perencanaan Tenaga Kerja													DTKKUKM
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja				0,000		120.000.000		0,000		0,000		0,000	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja													DTKKUKM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	70	70	120.091.374	72	120.091.374	74	130.091.374	76	140.091.374	78	150.091.374	
Program Penempatan Tenaga Kerja													DTKKUKM
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	51,5	52	129.908.626	53	129.908.626	54	139.908.626	55	149.908.626	56	155.908.626	
Program Hubungan Industrial													DTKKUKM
Meningkatnya pekerja				950.000.000		950.000.000		960.000.000		970.000.000		975.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan													DPMPPA
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	10,11	10,11	448.648.355	10,12	500.242.916	10,25	508.546.948	10,25	518.107.631	10,75	525.723.810	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	64,85	64,85		66,40		67,50		68,25		69,15		
Program Perlindungan Perempuan													DPMPPA
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	319.313.010	100	356.034.006	100	361.944.171	100	368.748.721	100	374.169.328	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga														DPMPPA
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	20	25	97.731.976	30	108.971.153	35	110.780.074	40	112.862.739	50	114.521.822		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak														DPMPPA
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	10	12	146.730.392	14	163.604.387	16	166.320.220	18	169.447.040	20	171.937.912		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)														DPMPPA
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	70	80	193.507.593	80	215.760.967	80,5	219.342.599	80,5	223.466.240	90	226.751.194		
Program Perlindungan Khusus Anak														DPMPPA
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	459.332.020	100	512.155.203	100	520.656.979	100	530.445.330	100	538.242.877		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
anak														
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75	75		76		77		78		80			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat														DPKP
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	93,2	93,46	310.000.000	93,72	422.000.000	93,98	444.000.000	94,24	447.000.000	94,5	452.000.000		
Program Penanganan Kerawanan Pangan														DPKP
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2	2	85.000.000	2	132.500.000	2	145.000.000	2	168.000.000	2	171.000.000		
Program Pengawasan Keamanan Pangan														DPKP
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100	100	225.000.000	100	265.000.000	100	295.000.000	100	315.000.000	100	330.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
Program Perencanaan Lingkungan Hidup														DLH
Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2	2	115.661.059	2	127.608.847	2	129.727.156	2	132.166.027	2	134.108.870		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup													DLH
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	46,72	46,75	1.393.287.562	46,78	1.537.214.169	46,80	1.562.731.945	46,82	1.592.111.324	46,84	1.615.515.382	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	90	90		90		90		90		90		
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)													DLH
Meningkatnya kualitas pengelolaan keaneekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	13,137	13,139	7.400.182.338	13,140	8.164.621.181	13,141	8.300.154.002	13,142	8.456.197.003	13,143	8.580.503.205	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)													DLH
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	41.868.879	100	46.193.934	100	46.960.754	100	47.843.617	100	48.546.919	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)													DLH
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	100	100	188.556.988	100	208.034.925	100	211.488.308	100	215.464.290	100	218.631.618	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(%)												
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat													DLH
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	61.153.475	100	67.470.629	100	68.590.642	100	69.880.147	100	70.907.387	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat													DLH
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	115.000.000	100	126.879.500	100	128.985.702	100	131.410.634	100	133.342.372	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup													DLH
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	79.688.718	100	87.920.562	100	89.380.045	100	91.060.391	100	92.398.980	
Program Pengelolaan Persampahan													DLH
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	56,50	58,10	31.990.123.416	59,00	35.371.294.571	60,00	35.970.766.545	61,00	36.660.956.607	62,00	37.210.772.397	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
Program Pendaftaran Penduduk													DISDUKCAPIL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				185.384.360		195.384.360		195.384.360		200.384.360		200.384.360	
Program Pencatatan Sipil													DISDUKCAPIL
Meningkanya kualitas layanan Pencatatan Sipil				206.304.980		216.304.980		216.304.980		221.304.980		221.304.980	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													DISDUKCAPIL
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan				1.899.884.471		1.949.884.471		1.949.884.471		1.964.884.471		1.984.884.471	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan													DISDUKCAPIL
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan				51.651.500		51.651.500		51.651.500		51.651.500		51.651.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat													DPMPA
Meningkatnya kapasitas Lembaga Ke, asyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan				4.042.967.556		4.285.545.609		4.356.685.666		4.438.591.357		4.503.838.650	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Program Pengendalian Penduduk													DPPKB

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2,02	2,02	38.417.632	2,02	279.554.000	2,02	307.509.400	2,02	338.260.340	2,02	372.086.374	
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	75,6	80,7		84		86,2		87,5		88,4		
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	7.6-	7.3-		7.1-		6.9-		6.7-		6.5-		
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)													DPPKB
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	93	93,5	1.874.607.000	94,1	2.496.351.996	94,7	1.923.201.924	95,3	1.336.894.533	95,99	853.739.495	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)													DPPKB
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	45,5	46,85	1.176.964.000	47,30	675.360.000	48,20	721.435.171	49,15	736.585.172	50,05	532.772.180	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)													DISHUB

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0	45,86	7.412.376.800	94,43	8.160.981.500	175,71	8.372.666.000	266,71	9.980.001.500	302,37	10.322.759.000	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	26	36		56		76		86		100		
Program Pengelolaan Pelayaran													DISHUB
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Sungai dan Danau	Konektivitas Laut (Unit)	8	9	88.574.200	10	240.000.000	11	80.000.000	12	194.174.500	13	80.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik													DISKOMINFO
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah				2.686.400.000		3.900.000.000		4.050.000.000		3.150.000.000		3.125.000.000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika													DISKOMINFO
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika				3.803.593.720		4.410.795.600		4.653.000.000		4.897.500.000		4.900.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi													DTKKUKM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	13,25	0,000	16,25	21.558.403	19,25	22.558.403	22,25	23.558.403	25,25	25.558.403	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian												DTKKUKM	
Meningkatnya kualitas SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	0	13,25	122.295.620	16,25	122.295.620	19,25	132.295.620	22,25	142.295.620	25,59	162.295.620	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi												DTKKUKM	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	17,59	127.704.380	19,59	127.704.380	21,59	137.704.380	23,59	147.704.380	25,59	167.704.380	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)												DTKKUKM	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	80	81	200.000.000	83	200.000.000	85	210.000.000	87	220.000.000	89	240.000.000	
	Pertumbuhan Wirasaha (Persentase)	80	81		82		85		87		89		
Program Pengembangan UMKM												DTKKUKM	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	25	0,000	27	800.000.000	29	820.000.000	31	830.000.000	33	850.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal														DPMPTSP
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap target investasi (Rp. Juta Per Tahun)	1.903,94	2.001,04	268.178.000	2.108,26	278.000.000	2.212,32	290.000.000	2.317,35	320.000.000	2.424,98	340.000.000		
Program Promosi Penanaman Modal														DPMPTSP
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal				260.000.000		288.000.000		290.000.000		300.000.000		320.000.000		
Program Pelayanan Penanaman Modal														DPMPTSP
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko				245.000.000		260.000.000		280.000.000		295.000.000		325.000.000		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal														DPMPTSP
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal				240.000.000		250.000.000		270.000.000		290.000.000		300.000.000		
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal														DPMPTSP
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal				220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		290.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan														DISPORA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,62	0,67	398.221.725	0,71	725.000.000	0,76	725.000.000	0,80	825.000.000	0,85	825.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan													DISPORA
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga				6.557.226.275		6.250.000.000		6.550.000.000		6.435.000.000		6.725.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan													DISPORA
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Pelajar SD/SMP dalam Kepramukaan (%)	10	11,67	1.175.000.000	13,33	1.425.000.000	15	1.425.000.000	16,67	1.535.000.000	18,33	1.535.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral													DISKOMINFO
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)				32.200.000		60.000.000		120.000.000		180.000.000		200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi													DISKOMINFO
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah				78.200.000		51.000.000		51.000.000		85.000.000		85.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
Program Pengembangan Kebudayaan														DISPARBUD
Persentase Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah				794.765.050		924.241.555		931.665.711		940.665.711		947.665.711		
Program Pengembangan Kesenian Tradisional														DISKOMINFO
Persentase Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Daerah				145.250.286		147.373.316		148.752.847		150.328.132		153.328.132		
Program Pembinaan Sejarah														DISKOMINFO
Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya														DISKOMINFO
Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				51.035.857		55.139.443		57.139.443		59.928.726		62.721.599		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
Program Pembinaan Perpustakaan														DKP
Outcome I: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	80	80	467.366.009	81,6	514.102.610	83,23	565.512.871	84,89	677.064.158	86,59	677.064.158		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno														DKP
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	20	20	43.177.500	20	47.495.250	20	52.263.665	20	57.490.032	20	57.490.032		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
Program Pengelolaan Arsip														DKP
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	17,5	18	266.268.126	19,25	292.894.939	19,75	318.500.000	20,25	350.350.000	20,75	350.350.000		
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip														DKP
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	11,42	16,86	195.087.442	18,41	214.596.186	20,15	216.288.010	21,73	238.140.779	22,86	238.140.779		
Program Perizinan Penggunaan Arsip														DKP
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	20	20	14.500.000	20	15.950.000	20	14.500.000	20	15.950.000	20	14.500.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap														DPKP
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	627	632	75.000.000	638	160.000.000	644	175.000.000	670	157.500.000	676	198.800.000		
Program Pengelolaan Perikanan														DPKP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Budidaya													
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.220	1.232	540.000.000	1.244	637.663.000	1.256	720.500.000	1.268	731.500.000	1.270	758.000.000	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan													DPKP
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Km ²)	0	0,035	0,000	0,035	75.000.000	0,035	90.000.000	0,035	90.000.000	0,035	105.000.000	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan													DPKP
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42,5	43	125.000.000	43,5	155.000.000	44	160.000.000	44,5	185.000.000	45	200.910.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata													DISPARBUD
Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata				779.443.345		993.387.680		1.001.126.448		1.019.439.093		1.061.183.300	
Program Pemasaran Pariwisata													DISPARBUD
Cakupan Pemasaran Pariwisata				757.481.832		974.230.015		1.000.555.317		1.015.553.017		1.053.029.151	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual													DISPARBUD

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan intelektual				94.426.409		98.869.050		99.255.955		105.681.551		109.249.706	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif													DISPARBUD
Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				688.225.403		894.047.943		901.752.737		915.752.737		918.630.812	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian													DPKP
meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	100	100	520.000.000	100	620.000.000	100	630.000.000	100	715.000.000	100	755.000.000	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian													DPKP
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	10	10	650.000.000	10	705.000.000	10	705.000.000	10	715.000.000	10	735.000.000	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner													DPKP
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	485.000.000	1	595.000.000	1	615.000.000	1	700.761.000	1	705.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
veteriner														
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian														DPKP
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	90	90	80.000.000	90	100.000.000	90	103.537.481	90	150.000.000	90	125.000.000		
Program Penyuluhan Pertanian														DPKP
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian				190.000.000		260.000.000		270.000.000		350.000.000		320.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan														DPP
Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi				115.000.000		128.500.000		137.850.000		148.135.000		164.448.500		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan														DPP
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				1.090.000.000		1.287.000.000		1.237.200.000		1.275.920.000		1.318.512.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting														DPP
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				507.000.000		624.500.000		667.650.000		739.965.000		764.961.500		
Program Pengembangan Ekspor														DPP
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen														DPP
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				265.310.082		274.779.242		282.698.192		289.905.152		296.297.962		
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri														DPP
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				918.000.000		930.000.000		940.000.000		950.000.000		960.000.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri														DPP
Meningkatnya realisasi pembangunan industri				690.000.000		1.378.000.000		1.505.000.000		1.435.000.000		1.370.000.000		
Program Pengendalian Izin Usaha Industri														DPP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional													DPP
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri				80.000.000		94.000.000		109.000.000		124.000.000		135.000.000	
SEKRETARIAT DAERAH													
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat													SETDA
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	28.521.724.750	100	32.510.438.508	100	33.309.733.675	100	34.209.686.764	100	34.976.353.917	
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
Program Perekonomian Dan Pembangunan													SETDA
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	2.813.315.636	100	3.070.388.654	100	3.307.292.606	100	3.586.824.198	100	3.791.709.658	
SEKRETARIAT DPRD													
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD													SETWAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	30.474.041.898	100	37.765.653.928	100	38.234.069.700	100	37.781.531.928	100	38.634.069.700	
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	2.957.414.546	100	3.746.654.546	100	3.821.587.600	100	3.646.654.546	100	3.859.932.825	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	80	80		80		80		80		80		
PERENCANAAN													
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah													BAPPEDA
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				1.220.000.000		980.000.000		980.000.000		1.030.000.000		1.080.000.000	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah													BAPPEDA
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan				250.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000		500.000.000	
Meingkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang				400.000.000		550.000.000		585.000.000		625.000.000		650.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
pemerintahan dan pembangunan manusia														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA				200.000.000		300.000.000		385.000.000		425.000.000		500.000.000		
KEUANGAN														
Program Pengelolaan Keuangan Daerah														BPKAD
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	864.031.000	100	1.245.334.000	100	1.312.924.000	100	1.390.756.000	100	1.452.757.000		
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	35,00	33,00	2.081.270.000	30,00	2.462.518.000	30,00	2.530.078.000	30,00	2.607.898.000	30,00	2.669.878.000		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	30,00	35,00		40,00		40,00		40,00		40,00			
Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	100	3.982.727.000	100	3.982.727.000	100	3.982.727.000	100	3.982.727.000	100	3.982.727.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	94,75	95,00	751.796.000	95,25	1.133.086.000	95,50	1.200.674.000	95,75	1.278.507.000	96,00	1.340.513.000	
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	78,50	78,75		79,00		79,25		79,50		79,75		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah												BPKAD	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	9.35%	9.40%	1.188.172.000	9.50%	1.569.476.000	9.60%	1.637.076.000	9.70%	1.714.908.000	9.80%	1.776.908.000	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah													
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan				2.875.027.495		3.040.016.887		3.284.358.399		2.704.712.396		2.724.094.932	BPPRD
KEPEGAWAIAN													
Program Kepegawaian Daerah												BKPSDMD	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	70	70	646.788.000	70	646.900.000	70	646.600.000	70	650.600.000	70	655.600.000	
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	86,5	87	296.000.000	88	329.000.000	89	327.000.000	90	325.000.000	91	323.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	80,30	80,67	415.000.000	83,36	415.000.000	87,66	422.000.000	93,29	423.000.000	94,81	425.000.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	29	30	350.000.000	30	350.000.000	35	400.000.000	40	353.923.000	45	350.000.000	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia													BKPSDMD
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar (Persentase)	19,20	19,48	1.535.800.000	20,82	1.535.800.000	23,09	1.635.800.000	27,16	1.785.800.000	27,16	1.735.800.000	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	60,25	61,19	524.000.000	62,54	524.000.000	64,57	524.000.000	66,13	574.000.000	67,65	524.000.000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah													BAPPEDA
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan				250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Program Riset Dan Inovasi Daerah													BAPPEDA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan				320.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
INSPEKTORAT DAERAH													
Program Penyelenggaraan Pengawasan													INSPEKTORAT
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan				1.484.050.000		1.461.650.000		1.678.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi													INSPEKTORAT
Jumlah Perangkat Daerah Pengembangan Zona Integritas				102.485.000		265.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000	
KECAMATAN													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	0	0		0		0		0		0		
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	73	73		74		75		76		77		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				11.229.189.767		12.352.108.744		12.795.306.169		13.181.654.233		13.587.365.557	
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.742.123.624		10.676.706.624		10.740.516.624		10.833.221.624		10.937.326.624	
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				9.214.262.709		10.135.688.980		11.149.257.878		12.264.183.666		13.490.602.033	
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				5.532.067.600		6.132.067.600		6.320.874.600		6.420.874.600		6.494.042.600	
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.190.853.779		9.009.939.157		9.910.933.073		10.892.661.605		11.981.927.765	
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				15.248.141.950		16.858.304.450		17.089.636.595		17.370.114.154		16.906.430.870	
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				8.115.736.000		8.927.309.600		9.036.558.260		9.228.855.860		9.405.765.581	
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				7.272.819.967		8.855.984.887		8.980.349.080		9.266.828.759		9.416.323.359	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	7.711.975.047	8.117.868.470	7.919.988.643	8.523.761.894	9.252.719.288	8.949.949.988	9.861.097.288	9.397.447.488	9.179.232.657	9.867.319.862	8.765.603.721	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	73	73	11.598.267.134	74	13.844.590.972	75	14.501.652.747	76	15.181.336.340	77	15.844.727.282	
Meningkatnya Kualitas dokumen akuntabilitas				9.193.197.302		9.320.278.052		9.538.034.668		9.666.211.003		10.054.262.279	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik													
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	91	92		93		94		95		596		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				383.550.642		421.905.706		464.096.277		510.505.905		560.056.495	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan administrasi Kecamatan				514.028.378		576.976.796		591.317.400		633.823.721		659.887.121	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				3.244.333.606		3.568.766.967		3.925.643.663		4.318.208.030		4.750.028.833	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				842.357.500		927.780.000		1.020.558.000		1.122.613.800		1.234.875.180	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				379.650.000		388.000.000		397.150.000		406.300.000		526.500.000	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				150.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Adm. Kecamatan				155.543.821		171.098.203		188.208.024		197.028.826		227.731.708	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				181.198.701		345.000.000		263.950.000		208.434.267		158.915.295	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan				38.993.001		251.112.660		251.112.660		266.648.828		279.981.270	
Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				19.636.230		2.225.300.000		2.237.110.000		2.245.950.000		2.255.350.000	
Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				274.500.000		301.950.000		332.145.000		365.359.500		381.036.950	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan													
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				16.121.171.144		17.820.560.159		17.169.186.374		16.477.537.011		15.553.040.812	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan				19.090.568.800		19.536.678.028		19.536.678.028		19.536.678.028		19.536.678.028	
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.870.000.000		4.257.000.000		4.257.990.000		4.259.079.000		4.260.276.900	
Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				24.066.386.797		26.473.025.477		26.473.025.477		27.796.676.750		28.719.181.256	
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				3.876.918.400		3.941.837.400		3.941.837.400		3.941.837.400		4.041.837.400	
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				17.043.393.720		18.747.733.092		18.749.141.950		18.934.757.041		18.953.232.745	
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13.130.454.999		14.525.042.498		13.703.904.349		12.833.246.358		11.708.084.595	
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.431.869.698		2.473.024.948		2.431.825.332		2.511.631.997		2.169.422.721	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan				11.837.996.655		12.208.296.317		12.394.965.520		12.395.965.520		12.482.965.520	
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan				15.172.881.000		13.315.693.376		13.682.155.376		14.087.030.376		14.372.701.376	
Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				9.925.000.000		10.915.000.000		10.915.000.000		10.915.000.000		11.510.200.000	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum													
Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tenteram				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				18.462.400		180.976.400		180.976.400		199.526.481		209.502.805	
Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan Kondusif				46.000.000		53.000.000		59.000.000		66.000.000		74.000.000	
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				45.331.346		49.864.481		54.850.929		60.336.021		66.369.623	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				58.463.000		332.000.000		336.000.000		340.000.000		344.000.000	
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				105.150.442		115.665.486		127.232.035		139.955.238		153.950.762	
Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				176.500.000		194.150.000		213.565.000		234.141.426		257.555.569	
Persentase Peningkatan Lingkungan Yang Aman dan Kondusif				81.959.600		90.155.560		99.171.116		109.088.228		119.997.050	
Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan				150.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	
Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				757.049.550		840.028.250		924.031.075		1.016.434.183		1.118.077.601	
Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, tertib, dan tenteram				59.131.530		120.000.000		95.000.000		90.000.000		56.222.173	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				140.000.000		166.500.000		193.150.000		219.965.000		246.961.500	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum													
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				1.174.020.159		491.422.175		491.422.175		515.993.284		541.792.948	
Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif aman, dan nyaman bagi masyarakat				581.998.835		920.000.000		946.109.225		991.397.365		940.619.222	
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				365.000.000		401.500.000		418.150.000		485.815.000		534.396.500	
Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum				600.000.000		800.000.000		800.000.000		817.379.000		817.379.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				493.249.346		638.164.480		701.980.928		726.514.879		752.166.367	
Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				663.562.146		654.000.000		659.500.000		669.000.000		680.000.000	
Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				621.816.063		683.997.669		752.397.436		827.637.180		906.400.898	
Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				61.818.016		67.999.818		74.799.799		82.279.779		90.507.757	
Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				896.773.000		986.450.300		1.085.095.330		1.193.604.863		1.312.965.349	
Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				620.000.000		642.000.000		664.000.000		686.000.000		708.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				693.621.000		806.313.400		886.944.740		916.639.214		920.000.000	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan													
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	2.060.000.000	100	2.176.000.000	100	2.231.500.000	100	2.287.000.000	100	2.337.000.000	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik													
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Peningkatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat (Persentase)	100	100	1.510.000.000	100	1.561.000.000	100	1.611.000.000	100	1.661.500.000	100	1.681.500.000	
	Persentase Pembinaan Partai Politik (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan													
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	890.000.000	100	911.000.000	100	961.000.000	100	966.500.000	100	966.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGGU NGJAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya													
Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	195.000.000	100	210.500.000	100	216.000.000	100	222.500.000	100	222.500.000	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial													
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	310.000.000	100	341.000.000	100	347.000.000	100	352.500.000	100	352.500.000	

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama RPJPD Kota Jambi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Peningkatan Pendapatan Per Kapita									
1.	a. PDRB Per Kapita (Juta)	Nilai	75,73	86,80	97,87	108,93	120-125	131,07	
	b. Kontribusi PDB Industri Pngolahan (%)	%	10,25	10,26	10,28	10,29	10,30	10,31	
	c. Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)	%	78,64	78,66	78,67	78,69	78,70	78,72	
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan									
2.	a. Tingkat Kemiskinan	%	7,50 – 7,25	7,19-7,00	6,88-6,75	6,56-6,50	6,25 – 5,75	5,75-5,50	
	b. Rasio Gini (Indeks)	Nilai	0,320-0,330	0,310-0,320	0,310	0,300-0,310	0,300-0,305	0,300	
	c. Kontribusi PDRB Kota Jambi Terhadap Provinsi (%)	%	13,89	13,95	14,02	14,08	14,14	14,20	
	d. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,65 - 6,70	6,46 - 6,36	6,35 – 6,30	6,29 – 6,26	6,25 – 5,75	5,50 – 5,35	
Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional yang Meningkat									
3.	a. Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67,75	68,00	68,25	68,50	68,75	69,00	
	b. Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,9	3,96	4,01	4,07	4,12	4,18	
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia									
4.	a. Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,93	81,14	81,34	81,55	81,75-82,25	81,96-82,25	
Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission									
5.	a. Intensitas Emisi GRK (TonC02e)	Nilai	31.274,90	41.163,05	51.051,21	60.939,36	70.827,51	80.715,66	
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hiduo	Nilai	58,78	58,99	59,21	59,42	59,63	59,84	

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,16	65,18	65,19	65,20	65,21	65,22	
2	Tingkat Pelayanan Jalan	0,57 (C)	0,56 (C)	0,54 (C)	0,5 (C)	0,44 (C)	0,40 (B)	
3	Indeks Harmoni Religi	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,33	95,48	95,64	95,79	95,92	96,18	
5	Indeks Pemerintah Daerah	NA	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	
6	Indeks Pelayanan Publik	3,97	3,98	4	4	4	4	
7	Realisasi Pendapatan Asli daerah	606.28	640.27	669.17	679.51	701.43	606.28	
8	Indeks Profesionalitas ASN	77	78,00	78,4	78,6	78,8	79	
9	Realisasi Investasi	1.903	2.001	2.108	2.212	2.317	2.424	
10	Indeks Daya Saing Daerah	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,31	
11	Prevalensi Stunting	9,38	8,75	8,13	8,00	6,88	6,50	
12	Indeks Ketahanan Pangan	86	86,52	87,04	87,56	88,08	88,60	

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kota Jambi
Tahun 2025-2030**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	8,53	8,09	7,66	6,78	6,78	6,34	
2	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1.293	1.393	1.493	1.593	1.693	1.793	
3	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	78	78,5	79,00	i	80,00	80,50	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,22	6,43	7,36	8,64	9,89	11,12	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/orang	17,00	21,50	26,00	30,50	35,00	39,50	
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	24,89	29,59	34,28	38,98	43,67	48,37	
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	12,4 Juta	11,00 Juta	9,60 Juta	8,20 Juta	6,80 Juta	5,40 Juta	
8	Indeks Resiko Bencana	%	123,24	123,01	122,78	122,54	122,31	122,08	
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,22	1,27	1,32	1,38	1,43	1,48	
10	Rasio Penduduk	%	101,17	101,67	101,89	102,03	102,23	102,35	
11	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	3.738,37	4.101,28	4.311,01	4.521,34	4.871,23	5.012,13	
12	Kapasitas Air Baku	%	1,1	1,34	1,58	1,81	2,05	2,29	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,65 - 6,70	6,68-6,74	6,70-6,78	6,73-6,81	6,75-6,85	6,78-6,89	
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,8 – 7,34	5,92-6,74	5,05-6,13	4,17-5,53	3,29-4,92	2,41-4,32	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	75,73	86,80	97,87	108,93	120 – 125	125 – 131,07	
4	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	43,00	45,50	48,00	50,50	53	55,50	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	64,85	64,85	66,40	67,50	68,25	69,15	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	80,93	81,14 – 81,26	81,34 – 81,59	81,55 – 81,92	81,75 – 82,25	81,96-82,58	Indeks Pembangunan Manusia untuk Kab/Kota

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100	
12	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
13	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
14	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
15	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	
16	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah	37	35	32	30	28	26	
17	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	67,48	68,23	68,98	69,73	70,48	71,23	
18	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	92,00	
19	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
20	<i>Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun</i>	%	7,6	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5	
21	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	93	93,5	94,1	94,7	95,3	95,99	
22	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	59,9	60,9	61,9	62,9	63,9	64,8	
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Nilai	90,2	90,9	91,6	92,2	92,8	93,4	
24	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Nilai	38,7	38,9	39,1	39,3	39,4	39,6	
25	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	90	90	90	90	90	90	
26	Skor Literasi (SD Sederajat)	%	62,87	65,37	67,78	70,37	72,87	75,37	
27	Skor Numerasi (SD Sederajat)	%	53,37	56,27	59,17	62,07	64,97	67,87	
28	Skor Literasi (SMP Sederajat)	%	78,18	79,28	80,38	81,48	82,58	83,68	
29	Skor Numerasi (SMP Sederajat)	%	67,25	68,75	70,25	71,75	73,25	74,75	
30	Angka Partipasi Sekolah (5-6) sesuai rapor pendidikan	Nilai	62,25	65,29	68,32	71,36	74,40	77,44	
31	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 sesuai rapor pendidikan	Nilai	99,42	99,78	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 sesuai rapor pendidikan	Nilai	49,33	57,54	64,03	70,52	71,28	72,04	
33	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Nilai	80,35	86,79	93,39	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	sesuai rapor pendidikan								
34	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 sesuai rapor pendidikan	Nilai	74,22	74,97	75,72	76,47	77,22	77,97	
35	Iklm Inklusivitas SD sesuai rapor pendidikan	Nilai	58,59	61,09	63,59	66,09	68,59	71,09	
36	Iklm Inklusivitas SMP sesuai rapor pendidikan	Nilai	60,63	63,03	65,43	67,83	70,23	72,63	
37	Iklm Keamanan SD sesuai pada rapor pendidikan	Nilai	72,60	73,50	74,40	75,30	76,20	77,10	
38	Iklm Keamanan SMP sesuai pada rapor pendidikan	Nilai	71,87	73,37	74,87	76,37	77,87	79,37	
39	Iklm Kebhinekaan SD sesuai pada rapor pendidikan	Nilai	70,92	71,92	72,92	73,92	74,92	75,92	
40	Iklm Kebhinekaan SMP sesuai pada rapor pendidikan	Nilai	71,47	72,47	73,47	74,47	75,47	76,47	
41	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	19,54	20,47	21,40	22,32	23,35	24,18	
42	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	51,50	51,69	51,88	52,06	52,25	52,44	
43	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial dan TenagaKerja	%	62,45	60,67	61,12	61,56	72,50	75,01	
44	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%	300	325	350	375	400	425	
45	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	60,16 – 60,23	60,33 – 60,67	60,73 – 61,12	61,30 – 61,56	62,00 – 63,00	63,13 – 64,00	
46	Indeks Ketimpangan Gender	%	0,35	0,34	0,32	0,31	0,29	0,28	
47	Indeks Zakat Nasional		0,64	0,66	0,69	0,71	0,74	0,76	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,25	10,26	10,28	10,29	10,30	10,31	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,64	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69	
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	6.163	6.193,75	62.24,50	6.255,25	6.286,00	6.316,75	
4	Proporsi PDRB Sektor Tersier	%	78,64	78,66	78,67	78,69	78,70	78,72	
5	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	%	68,29	68,74	69,20	69,65	70,10	70,55	
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan menengah (%)	%	47,25	47,53	47,80	48,08	48,35	48,63	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	11,00	11,25	11,50	11,75	12,00	12,25	
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Return on Asset (RoA) BUMD	%	5	5,15	5,30	5,45	5,60	5,75	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,40	69,52	73,45	75,62	78,93	81,03	
11	Persentase Pekerja Informal	%	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	
12	Pengeluaran iptek dan inovasi dibandingkan APBD (%)	%	8,07	8,30	8,54	8,77	9,00	9,23	
13	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	73,61	74,66	75,71	76,76	77,81	78,86	
14	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nilai	47,10	47,51	47,93	48,34	48,75	49,16	
15	Indeks Transformasi Digital Nasional	%	50	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21,40	21,44	21,48	21,52	21,56	21,60	
17	Ekspor Barang dan Jasa	%	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	70,20	72,52	74,83	77,15	79,46	81,78	
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,47	1,73	2,00	2,26	2,52	2,78	
20	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	%	31,31	32,44	33,56	34,69	36,81	36,94	
21	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD (%)	%	76,95	76,77	76,59	76,41	76,23	76,05	
22	Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	6,6	7,00	7,40	7,80	8,20	8,60	
23	Tingkat Inflasi	%	3,27	3,26	3,26	3,25	3,24	3,23	
24	Indeks Akses Keuangan Daerah	%	6,6	6,63	6,67	6,70	6,73	6,76	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	73,00	74,25	75,50	76,75	78,00	79,25	
2	Indeks System Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	4,35	4,36	4,37	4,37	4,38	4,39	
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,97	3,98	3,99	3,99	4,00	4,01	
4	Indeks Integritas Kota/Kabupaten	Nilai	75,03	75,55	76,06	76,58	77,09	77,61	
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	98 – 100	98 – 100	98 – 100	98 – 100	98 - 100	98 – 100	
7	Persentase Penyelesaian Konflik	Nilai	100	100	100	100	100	100	
8	Angka Kriminalitas	%	30	29,38	28,75	28,13	27,50	26,88	
9	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	%	2,96	3,00	3,03	3,07	3,10	3,14	
10	Persentase implementasi kerjasama daerah dari kerjasama yang dibangun	Nilai	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	(%)	70,20	70,39	71,27	74,30	77,31	80,29	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	55	60	65	70	75	80	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	78	81	85	88	92	95	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	18	36	54	72	90	100	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	50	55	60	65	70	75	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
	Penurunan Angka Kemiskinan Kota	%	7,50	7,20	6,88	6,56	6,25	5,75	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	10,11	10,11	10,12	10,25	10,25	10,75	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif								
5	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	89	90	90,5	91	91,5	92	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
	Konektivitas Darat	Persentase	0	45,86	94,43	175,71	266,71	302,37	
	Konektivitas Laut	Unit	8	9	10	11	12	13	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	26	36	56	76	86	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	100	10	20	20	20	30	
8	Keuangan								
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93,50	93,75	94,00	94,25	94,50	94,75	
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	
	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	
	Opini Laporan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	31.25:31.50	31.00:31.25	30.75:31.00	30.50:30.75	30.25:30.50	30.00:30.25	
	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50	
	Rasio PAD	%	26.00:26.50	26.50:27.00	27.00:27.50	27.50:28.00	28.00:28.50	28.50:29.00	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	100	100	
9	Kepegawaian								
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41,58	41,58	41,58	41,58	41,58	41,58	
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17	77,74	
10	Pendidikan Dan Pelatihan								
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,69	18,87	19,06	19,24	19,42	19,60	
11	Inspektorat Daerah								
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)						

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Nilai	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20	

B A B V

PENUTUP

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa RPJMD adalah dokumen yang telah memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dengan masa berlaku 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan partisipatif dan politis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi ini memuat dinamika/karakteristik Wilayah Kota Jambi terkini dan muatan kebijakan yang lebih tinggi sebagai pedoman perumusan rencana pembangunan Kota Jambi 5 (lima) Tahun kedepan sebagai yang telah memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas kepala daerah untuk sebagai hasil rumusan dari visi, misi, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan, antara pusat dan daerah (vertikal) dan antar kepemimpinan kepala daerah, dalam kerangka besar mewujudkan cita-cita Kota Jambi Bahagia Tahun 2030.

Substansi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 terletak pada pencapaian Program Prioritas Pembangunan yang menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jambi serta dokumen spasial, dalam hal ini RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044. Keselarasan dokumen mengindikasikan penyelenggaraan pembangunan telah memperhitungkan konsep pembangunan yang tematik, holistik, integral dan bersifat spasial. Pelaksanaan pembangunan akan termanifestasikan dengan senantiasa mencermati kapasitas dan daya dukung lingkungan untuk menjaga kesinambungan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini telah memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan, yang telah dimulai sejak proses perumusan rancangan teknokratik. Pembahasan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 juga telah melalui forum Konsultasi Publik yang berfungsi untuk menyaring aspirasi masyarakat guna penyempurnaan. Termasuk juga dengan mencermati adanya regulasi-regulasi yang bersifat teknis dari Pemerintah dan mempertimbangkan isu-isu dalam skala global dan nasional dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, telah mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan menggunakan indikator-indikator yang terukur dan *reasonable* serta memiliki landasan legal formal yang kuat.

Pada akhirnya, RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik dalam koridor pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Jambi akan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat perangkat daerah serta pengambilan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.